



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya menyelaraskan antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah, atau *Growth with Equity* peran pemerintah harus mempertimbangkan aspek-aspek terhadap upaya pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan sesuai dengan fokus pembangunan nasional yaitu ***Pro-Growth, Pro-poor, Pro-Job*** serta ***Pro-environment***.

Dalam memperluas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran di Provinsi Jambi, Dinas Nakertrans Provinsi Jambi memfokuskan pada upaya-upaya perluasan kesempatan kerja pro-job, yaitu dengan mendorong penciptaan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya agar permasalahan ketenagakerjaan terutama penganggur dan setengah penganggur semakin berkurang.

Melihat situasi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada Agustus 2019, angkatan kerja di Provinsi Jambi yaitu sebanyak 1.765.747 orang, dimana 1.691.747 (95,81 %) orang diantaranya sudah bekerja. Besarnya jumlah penduduk usia kerja (umur 15+) menjadikan TPAK Kota Jambi cukup rendah yaitu sebesar 66,84 persen, terendah ketiga dibanding kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Jambi. TPAK terendah terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebesar 59,39 persen namun demikian secara kuantitatif jumlah angkatan kerja di Kabupaten Muaro Jambi masih cukup besar yaitu 194,767 orang. TPAK tertinggi terjadi di Kabupaten Tanjabbar yaitu sebesar 70,56 persen dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 170.734 orang.



Secara kuantitatif, jumlah pengangguran tertinggi berada di Kota Jambi yaitu sebanyak 20.635 orang dari 73.965 orang total angkatan kerja di Kota Jambi, kondisi tersebut menjadikan TPT Kota Jambi sebesar 27,89 persen yang juga merupakan TPT tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi. TPT tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebesar 13,92 persen, sementara TPT terendah terjadi di Kota Sungai Penuh yaitu 2,46 persen, dengan jumlah pengangguran hanya berkisar seribu orang.

Jumlah penganggur di Provinsi Jambi Tahun 2019 sebanyak 73.965 orang atau terjadi penurunan sebesar 4.890 orang. Apabila dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2018 yang jumlahnya sebanyak 69.075 orang. Berdasarkan sumber yang sama, jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus tahun 2019 mencapai 1.765.747 orang, menurun sebanyak 24.690 orang atau (1,37 %) apabila dibandingkan angkatan kerja pada Agustus 2018 yang jumlahnya mencapai 1.790.437 orang. Penurunan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 berkaitan erat dengan naiknya jumlah penduduk bekerja dan pengangguran. Jumlah penduduk bekerja di Provinsi Jambi pada Agustus 2019 sebesar 1.691.782 orang, berkurang 29.580 orang dibanding keadaan Agustus 2018 sebesar 1.721.362 orang dan bertambah 33.965 orang jika dibanding keadaan Agustus 2017 sebesar 1.657.817 orang.

Sama dengan jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran juga naik dalam kurun waktu dua tahun terakhir, yaitu dari 66.816 orang pada Agustus 2017 kemudian naik menjadi 69.075 orang pada Agustus 2018 dan kembali meningkat pada Agustus 2019 menjadi 73.965 orang. Fluktuasi jumlah pengangguran juga diikuti angka TPT, yaitu dari 3,87 persen pada Agustus 2017 turun menjadi 3,86 persen pada Agustus 2018 kemudian TPT naik pada Agustus 2019 menjadi 4,19 persen.s

Penduduk usia kerja menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, meskipun memiliki potensi penduduk usia produktif yang besar, namun pada tahun



2019 sebagian besar masih merupakan tamatan pendidikan dasar mencapai 38,1 %, dan menengah (SMP dan SMA) mencapai sekitar 44,7 %. Sementara untuk tamatan pendidikan tinggi (universitas dan akademi) hanya 9,7% dari total penduduk usia kerja.

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi pada Agustus 2019 mencapai 1.765.747 orang, berkurang 24.690 orang dibanding angkatan kerja Agustus 2018 sebesar 1.790.437 orang dan naik 65.804 orang dibanding angkatan kerja Agustus 2017 sebesar 1.724.633 orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi pada Agustus 2019 sebesar 1.691.782 orang, berkurang 29.580 orang dibanding keadaan Agustus 2018 sebesar 1.721.362 orang dan bertambah 63.545 orang jika dibanding keadaan Agustus 2017 sebesar 1.657.8817 orang.

Dari 1.691.782 orang yang bekerja pada Agustus 2019, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan sebesar 666.820 orang (39,41 persen), diikuti berusaha sendiri 390.551 orang (23,08 persen), pekerja tidak dibayar 212.541 orang (12,56 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap 211.667 orang (12,51 persen). Sektor Pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu 738.416 orang (43,64 persen dari penduduk yang bekerja,) atau lebih dari setengah penduduk yang bekerja, berada di Sektor Pertanian.

Dalam konteks penciptaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran, diharapkan semua sektor atau lapangan usaha berkewajiban untuk mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja, sehingga sasaran yang telah ditetapkan pemerintah untuk menekan angka pengangguran sampai pada kisaran 2 persen pada akhir tahun 2019 dapat tercapai. Memang disadari bahwa sasaran tersebut tidak mudah untuk dicapai, terlebih perekonomian kita dihadapkan pada pengaruh kuat akibat krisis finansial global. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak baik itu pemerintah, swasta dan berbagai elemen masyarakat. Peran serta sektor mempunyai peran besar dalam



penciptaan kesempatan kerja untuk mengurangi penganggur serta meningkatkan kualitas tenaga kerja kita. Khusus di bidang pendidikan perlu dibuka peluang yang seluas-luasnya bagi penduduk usia kerja untuk melanjutkan pendidikan dengan menerapkan program wajib belajar 9 tahun yang sudah berjalan dan apabila memungkinkan ditambah menjadi wajib belajar 12 tahun serta pemberian beasiswa bagi mereka yang tidak mampu. Dalam kebijakan baru, kemampuan SDM akan dipercepat, karena faktor tenaga kerja merupakan faktor penting dalam kegiatan ekonomi, hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara maju seperti Jepang, Singapura dan Korea Selatan. Dilihat dari segi kekayaan alam, negara-negara tersebut tidak lebih kaya di banding Indonesia, namun negara-negara tersebut jauh lebih maju. Kemajuan negara tersebut banyak dipengaruhi oleh kapasitas tenaga kerjanya. Oleh sebab itu, dalam pembangunan ke depan perlu ditetapkan pengembangan berbasis sumber daya manusia. Maka untuk itu perlunya di susun Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi (PTKP), melalui PTKP dapat diperkirakan persediaan tenaga kerja yang ada dan kebutuhan tenaga kerja dimasa yang akan datang. Dengan demikian dapat dirumuskan berbagai kebijakan dan program, agar persediaan tenaga kerja ke depan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, begitu pula untuk mengembangkan pembangunan di berbagai sektor lapangan usaha diperlukan tenaga kerja seperti apa.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 543);
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 174/MEN/VII/2011 tentang Pedoman Pengukuran Pembangunan Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 04);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 ini adalah memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang diperlukan sehingga dapat digunakan sebagai bahan perumusan strategi, kebijakan dan program ketenagakerjaan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 ini adalah :

1. Memperkirakan ketersediaan secara kuantitatif jumlah tenaga kerja dengan berbagai karakteristiknya tahun 2020-2024.
2. Memprediksi kebutuhan tenaga kerja tahun 2020-2024 yang diturunkan berdasarkan permintaan sektoral.



3. Memprediksi angka pengangguran yang dihitung berdasarkan perbedaan antara kebutuhan tenaga kerja dan persediaan tenaga kerja pada periode yang sama.
4. Menyusun rekomendasi kebijakan dan program terkait masalah ketenagakerjaan secara sektoral.

1.4. METODOLOGI

Penghitungan persediaan tenaga kerja dengan pendekatan TPAK menggunakan data dan informasi antara lain :

- a. PUK menurut jenis kelamin, golongan umur, tingkat pendidikan, Kabupaten/Kota dan Pedesaan/Perkotaan
- b. TPAK menurut jenis kelamin, golongan umur, tingkat pendidikan Kabupaten/Kota dan Pedesaan/Perkotaan
- c. Angkatan Kerja menurut jenis kelamin, golongan umur, tingkat pendidikan Kabupaten/Kota dan Pedesaan/Perkotaan.

a. Proyeksi Penduduk Usia Kerja

PUK adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Perhitungan proyeksi PUK menggunakan rumus pertumbuhan geometrik yang dituliskan dengan rumus :

$$PUK_t = PUK_0 \times (1 + r)^n$$

Dimana : PUK_t = PUK tahun akhir (tahun proyeksi)
 PUK₀ = PUK tahun dasar
 r = pertumbuhan PUK
 n = selisih tahun akhir dan tahun dasar

Untuk menentukan laju pertumbuhan PUK menggunakan rumus :

$$r = \left\{ \left(\frac{PUK_n}{PUK_0} \right)^{1/t} - 1 \right\} \times 100$$



b. Proyeksi Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK)

Data dasar yang digunakan untuk proyeksi TPAK adalah TPAK hasil Sakernas bulan Agustus tahun 2013-2019 . Asumsi yang digunakan, pola TPAK Provinsi Jambi pada tahun proyeksi merupakan kelanjutan dari kecenderungan TPAK tahun 2013-2019. Perhitungan proyeksi dengan menggunakan rumus geometrik, yakni :

$$TPAK_t = TPAK_0 \times (1 + r)^n$$

Dimana :
 $TPAK_t$ = TPAK tahun akhir (tahun proyeksi)
 $TPAK_0$ = TPAK tahun dasar
 r = pertumbuhan TPAK
 n = selisih tahun akhir dan tahun dasar

c. Proyeksi Angkatan Kerja

Proyeksi angkatan kerja dapat dihitung dengan mudah setelah proyeksi PUK dan TPAK dilakukan. Proyeksi angkatan kerja dapat diperoleh dari hasil perkalian antara PUK dengan TPAK pada tahun-tahun proyeksi. Atau ditulis dengan rumus :

$$TPAK = AK/PUK, \text{ maka } AK = PUK \times TPAK$$

Catatan :

AK = Angkatan Kerja

PUK = Penduduk Usia Kerja

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

d. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Data dasar yang digunakan untuk proyeksi PDRB adalah PDRB Provinsi Jambi tahun 2013-2019 serta membandingkan dengan hasil proyeksi dari BPS Provinsi Provinsi



Jambi. Angka PDRB tersebut diperinci menurut sembilan sektor, menurut harga konstan tahun 2000. Perhitungan proyeksi PDRB menggunakan rumus geometrik:

$$PDRB_t = PDRB_0 \times (1 + r)^n$$

dimana : $PDRB_t$: angka PDRB untuk tahun akhir (tahun proyeksi)

$PDRB_0$: angka PDRB untuk tahun dasar

r : pertumbuhan PDRB

n : selisih antara tahun proyeksi dengan tahun dasar

e. Proyeksi Kesempatan Kerja

Data yang digunakan untuk proyeksi jumlah kesempatan kerja adalah jumlah kesempatan kerja secara sektoral hasil Sakernas tahun 2013-2019, dan PDRB tahun 2013-2019. Proyeksi kesempatan kerja dihitung dengan menggunakan metode elastisitas, yaitu rasio antara perubahan atau pertumbuhan kesempatan kerja dengan pertumbuhan PDRB. Formula elastisitas adalah :

$$E = \frac{\Delta KK}{\Delta PDRB}$$

dimana :

E : Elastisitas

KK : pertumbuhan KK

$PDRB$: pertumbuhan PDRB

Menghitung laju pertumbuhan kesempatan kerja menurut lapangan usaha sampai dengan tahun proyeksi menggunakan rumus :

$$KK = E_a \times PDRB_a$$

Dimana :

KK = Pertumbuhan kesempatan kerja baru

E_a = Elastisitas perubahan

$PDRB_a$ = Perkiraan laju pertumbuhan ekonomi



Menghitung proyeksi kesempatan kerja menurut lapangan usaha sampai dengan tahun proyeksi menggunakan rumus :

$$KK_t = KK_0 \times (1 + r)^n$$

Dimana :

KK_t = Proyeksi kesempatan kerja

KK₀ = Data dasar penduduk yang bekerja

r = Pertumbuhan kesempatan kerja

n = Jarak / selisih tahun proyeksi dengan tahun data dasar

f. Perkiraan Penganggur Terbuka

Perkiraan jumlah pengangguran di Provinsi Jambi tahun 2021-2025 menggunakan data dasar sebagai berikut :

- Hasil proyeksi angkatan kerja tahun 2020-2024
- Hasil proyeksi kesempatan kerja tahun 2020-2024
- Perkiraan jumlah pengangguran dalam penulisan ini secara implisit mengasumsikan bahwa jumlah orang yang menganggur merupakan sisa dari jumlah angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka proyeksi jumlah pengangguran tahun 2021-2025 dihitung dengan rumus:

$$\text{Penganggur} = \text{Hasil Proyeksi AK} - \text{Hasil Proyeksi KK}$$



g. Perkiraan Kebutuhan Pelatihan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Dalam memperkirakan kebutuhan latihan dan penempatan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dengan menggunakan pendekatan *industrialstatus metric*, *education status metric* dan geometrik yang dikalikan dengan tambahan kebutuhan kesempatan kerja maupun rencana perlindungan tenaga kerja.

1.5. SUMBER DATA

Sumber data yang diperoleh dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 adalah :

- a. Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus Tahun 2013-2019
- b. PDRB Provinsi Jambi Tahun 2013-2019
- c. Data dan informasi lainnya yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik, Bappeda Provinsi Jambi, instansi sektoral dan instansi penyedia data serta informasi lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

1.6. PENGERTIAN

1. Kebutuhan Tenaga Kerja

Kebutuhan tenaga kerja (kesempatan kerja) adalah jumlah lapangan kerja dalam satuan orang yang dapat disediakan oleh seluruh sektor ekonomi dalam kegiatan produksi. Dalam arti yang lebih luas, kebutuhan ini tidak hanya menyangkut jumlahnya, tetapi juga kualitasnya (pendidikan atau keahliannya).

Penganggur = Hasil Proyeksi AK – Hasil Proyeksi KK



2. Penduduk Usia Kerja (PUK)

Penduduk usia kerja / Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang telah dianggap mampu dan mau melaksanakan pekerjaan. Tenaga kerja ini dikelompokkan menurut tenaga kerja yang sudah bekerja, mencari kerja, bersekolah, mengurus rumah tangga dan mereka yang tidak masuk dalam kategori diatas (cacat, pensiun dan lain-lain)

3. Persediaan Tenaga Kerja

Persediaan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang sudah siap untuk bekerja, disebut angkatan kerja (*labour force*) yang dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas.

4. Penduduk Usia Kerja (PUK)

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

5. Angkatan Kerja (AK)

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Atau dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja adalah sekelompok penduduk usia kerja yang potensial untuk bekerja. Pengertian potensial adalah kesiapan setiap orang untuk masuk di pasar kerja baik saat itu sedang bekerja maupun mencari pekerjaan.

6. Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

7. Penganggur Terbuka (PT)

Penganggur Terbuka terdiri dari :



- a. Mereka yang mencari pekerjaan
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

8. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)

Tingkat penganggur terbuka merupakan rasio jumlah Penganggur Terbuka terhadap jumlah Angkatan Kerja.

9. Setengah Penganggur

Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut pengannguran terpaksa)

10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja

11. Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha

Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi di mana seseorang bekerja seperti digolongkan dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI)/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI).

12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

- a. Menurut Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun)



- b. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan jumlah balas jasa atas faktor-faktor produksi yang diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi berupa uang dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, termasuk pajak tak langsung dan penyusutan barang modal tetap di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.7. SISTEMATIKA

Penulisan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi 2020-2024 ini dibagi dalam 7 (tujuh) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI JAMBI

BAB III : PERKIRAAN DAN PERENCANAAN PERSEDIAAN TENAGA KERJA

BAB IV : PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

BAB V : PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KESEIMBANGAN ANTARA
PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KETENAGAKERJAAN

BAB VII : PENUTUP



BAB II

KONDISI KETENAGAKERJAAN

DI PROVINSI JAMBI

2.1. PEREKONOMIAN

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada periode waktu tahun 2016-2019 berfluktuasi pada kisaran antara 4,73 persen dengan rata-rata sebesar 4,54 persen per tahun. Dilihat dari laju pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi Jambi berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Bila dirinci berdasarkan tahun, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 4,74 persen, sementara laju pertumbuhan terendah pada tahun 2016 sebesar 4,37 persen. Pada tahun 2019 ekonomi Provinsi Jambi tumbuh sebesar 4,40persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi di tahun 2019 mengalami pertumbuhan, hanya saja prosesnya melambat. Melambatnya proses pertumbuhan ekonomi di Jambi salah satu penyebabnya adalah kurangnya ekspor pertambangan batu bara, turunnya komoditi karet dan beberapa faktor lain. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang membuat lambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, maka pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi periode 2016-2019 masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini menjadi tantangan pemerintah daerah Provinsi Jambi untuk membuat kebijakan yang dapat membuat pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi meningkat dan sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional.



Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi selama periode 2016-2019, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Jambi pada periode yang sama juga mengalami hal yang sama, PDRB ADHK tumbuh dari sisi produksi dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada tahun 2016 sebanyak Rp. 130.499,6 (juta), kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2019 menjadi Rp. 149.209,7 (juta), dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK pada periode 2016-2019 adalah rata-rata sebesar 4,52persen per tahun. Dan pertumbuhan PDRB perkapita secara riil rata-rata 6,13 persen per tahun.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2019 tumbuh 4,40 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,31persen. Kemudian untuk Struktur ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2019 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yakni sebesar 27,20 persen. Diikuti oleh sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,94 persen.

Tabel 2.1

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi
Atas Dasar Harga Konstan 2010,
Tahun 2014-2019 (Milyar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)			
		2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34.934	36.809	37.979	38.799
B	Pertambangan dan Penggalian	31.017	32.207	34.207	35.977
C	Industri Pengolahan	14.268	14.641	15.137	15.576
D	Pengadaan Listrik dan Gas	68	69	73	78



E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	179	183	191	199
F	Konstruksi	9.157	9.818	10.331	11.043
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.579	13.123	13.933	14.951
H	Transportasi dan Pergudangan	4.235	4.489	4.698	4.872
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.406	1.518	1.620	1.700
J	Informasi dan Komunikasi	4.620	4.925	5.306	5.624
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.108	3.203	3.198	3.260
L	Real Estate	1.883	1.970	2.069	2.212
M, N	Jasa Perusahaan	1.377	1.436	1.503	1.563
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.556	4.671	4.875	5.113
P	Jasa Pendidikan	4.277	4.458	4.701	4.971
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.491	1.573	1.660	1.778
R,S,T, U	Jasa Lainnya	1.347	1.408	1.486	1.548
PDRB		130.501	136.502	142.968	149.265

2.2. PENDUDUK USIA KERJA

Perkembangan jumlah penduduk usia kerja dalam lima tahun terakhir meningkat, jumlah penduduk usia kerja tahun 2018 mencapai 2.615.290 jiwa lebih besar dari tahun 2013, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 1.790.437 jiwa dan bukan angkatan kerja 824.850 jiwa. Penyebaran penduduk usia kerja paling banyak



terdapat di Kota Jambi yaitu sebanyak 451.865 jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2013 – 2019 mencapai 12 persen disebabkan sebagian oleh pertumbuhan alami dan sebagian lagi adanya pendatang.

2.2.1. Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur

Selama periode tahun 2013 s.d tahun 2019 penduduk usia kerja di Provinsi Jambi didominasi antara umur 15-54 tahun, umur merupakan indikator penting untuk mengukur produktivitas tenaga kerja, usia rata-rata dibawah 55 tahun merupakan usia yang produktif dalam meningkatkan produktivitasnya. Jumlah penduduk usia kerja dengan rata-rata antara 15-19 tahun di Provinsi Jambi selama rentang waktu tahun 2013-2019 sebanyak 12,63% atau rata-rata pertahunnya sebanyak 315.917 orang.

Tabel 2.2
Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

GOLONGAN UMUR	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15-19	325.478	332.267	301.601	304.239	321.986	310.363	315.483
20-24	273.813	271.173	302.598	302.274	275.934	302.460	304.943
25-29	300.462	272.035	301.743	304.789	253.310	308.832	308.649
30-34	331.406	320.122	294.581	296.617	318.514	300.525	302.525
35-39	243.419	255.912	282.209	287.819	339.280	295.290	298.243
40-44	234.476	257.183	245.172	254.004	246.436	271.032	278.805
45-49	173.974	184.107	203.395	211.152	215.490	227.239	235.195
50-54	152.861	171.499	166.994	173.062	184.864	186.036	193.030
55-59	90.898	114.522	129.781	136.579	144.473	148.864	154.397
60+	191.698	216.263	221.390	235.015	254.108	264.649	280.661
Jumlah	2.318.485	2.395.083	2.450.464	2.505.550	2.554.395	2.615.290	2.671.931

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019



2.2.2. Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, keadaan tenaga kerja hingga pada 2019 masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah dan SD sebesar 7.771.389 orang (44,38 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebesar 4.409.872 orang (25,18 persen).

Tabel 2.3
Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

PENDIDIKAN	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<SD	431.163	436.516	408.985	356.010	420.488	402.124	379.425
SD	580.920	650.849	669.567	685.647	650.398	658.381	638.792
SMTA	561.875	538.488	558.765	576.362	572.856	577.573	621.829
SMTA (Umum & Kejuruan)	562.096	588.324	618.194	672.800	687.522	721.232	771.648
Diploma I/ II/III & Univ	182.431	180.906	194.953	214.731	223.131	255.980	260.237
Jumlah	2.318.485	2.395.083	2.450.464	2.505.550	2.554.395	2.615.290	2.671.931

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019

2.2.3. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin.

Secara absolut jumlah penduduk di Provinsi Jambi menunjukkan adanya peningkatan baik penduduk laki-laki maupun perempuan hingga tahun 2019. Apabila dilihat secara relatif penduduk usia kerja laki-laki selama periode tahun 2013-2019 proporsinya cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan rata-rata sebesar 16,6 persen. Sementara proporsi penduduk usia kerja berjenis kelamin perempuan juga sebanyak 16,6 persen.



Tabel 2.4
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

JENIS KELAMIN	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Laki - Laki	1.183.271	1.225.155	1.252.996	1.280.864	1.305.738	1.336.674	1.364.383
Perempuan	1.135.214	1.169.928	1.197.468	1.224.686	1.248.657	1.278.616	1.307.548
Jumlah	2.318.485	2.395.083	2.450.464	2.505.550	2.554.395	2.615.290	2.671.931

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019.

2.2.4. Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Penduduk usia kerja di 11 (sebelas) kabupaten kota di Provinsi Jambi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 hampir semuanya mengalami kenaikan.

Penduduk usia kerja dengan proporsi terbesar berada di Kota Jambi, dengan rata-rata per tahunnya sebesar 17,00 persen atau sebanyak 435.446 orang. Hingga Tahun 2019 jumlah penduduk usia kerja di Kota Jambi mencapai 459.362 orang dari total 2.671.931 orang penduduk usia kerja yang tersebar di 11 Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.



Tabel 2.5
Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

GOLONGAN UMUR	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Kerinci	171.290	171.290	176.141	-	179.387	181.588	183.655
Kab. Merangin	245.296	253.699	259.489	-	270.076	276.443	281.938
Kab. Sarolangun	181.493	188.736	194.038	-	204.321	210.161	215.933
Kab. Batang Hari	177.018	182.289	185.786	-	192.118	195.706	199.007
Kab. Muaro Jambi	266.488	278.350	287.832	-	306.256	316.870	327.935
Kab. Tanjung Jabung Timur	151.306	154.536	156.616	-	160.438	162.982	165.166
Kab. Tanjung Jabung Barat	206.827	214.451	220.056	-	230.375	236.552	241.971
Kab. Tebo	221.432	229.362	235.080	-	246.062	252.054	257.717
Kab. Bungo	226.638	236.045	242.922	-	256.090	263.772	270.816
kota jambi	409.137	420.428	428.542	-	443.343	451.865	459.362
Kota Sungai Penuh	61.560	62.847	63.962	-	65.929	67.297	68.431
Jumlah	2.318.485	2.392.033	2.450.464	250.550	2.554.395	2.615.290	2.671.931

Keterangan:

*) Pada tahun 2016, Kabupaten/ Kota tidak mengadakan survey



2.3. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Situasi ketenagakerjaan di kabupaten/kota se Provinsi Jambi, menempatkan kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi yaitu sebesar 70,56 persen, sementara TPAK terendah terjadi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 59,39 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin baik Provinsi Jambi maupun nasional, TPAK perempuan selalu lebih rendah dari laki-laki, TPAK laki-laki mencapai lebih dari 80 persen sementara TPAK perempuan masih dikisaran 40 sampai dengan 52 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa laki-laki masih menjadi tulang punggung pencari nafkah keluarga.

2.3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut golongan umur dari tahun 2013-2019 untuk golongan umur 15-19 tahun dan 65+ terlihat cenderung menurun secara fluktuatif. Salah satu faktor terjadinya penurunan TPAK umur 5-19 Tahun antara lain disebabkan karena adanya program pendidikan dasar 9 tahun, sehingga sebagian besar kelompok umur tersebut masih mengenyam pendidikan, sedangkan disisi lain semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi usia 15-19 yang cukup tinggi. Hal tersebut tampaknya memberikan pengaruh cukup berarti terhadap melambatnya laju pertumbuhan angkatan kerja untuk golongan umur 15-19 tahun. Sehubungan dengan itu, maka penambahan jumlah angkatan kerja untuk golongan umur 15-19 tahun tersebut pada tahun-tahun berikutnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan penambahan jumlah penduduk usia kerja.



Tabel 2.6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

GOLONGAN UMUR	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15-19	23,51	26,48	24,79	29,9	26,79	28,11	25,36
20-24	60,86	63,52	64,29	67,41	66,45	71,41	64,57
25-29	70,72	73,09	71,92	74,06	73,79	74,37	73,08
30-34	70,28	73,46	76,85	75,25	77,19	77,59	73,66
35-39	74,84	77,13	76,23	77,11	78,69	79,45	76,66
40-44	77,12	82,56	79,29	83,87	81,62	79,39	80,53
45-49	78,26	79,04	81,53	81,87	81,06	81,19	80,08
50-54	75,64	79,87	78,09	77,67	78,21	78,74	76,79
55-59	67,74	69,87	71,04	71,31	76,49	75,44	75,87
60+	45,87	48,25	49,4	46,32	48,94	49,6	47,60
Jumlah	62,66	65,59	66,14	67,54	67,52	68,46	66,09

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019, diolah Pusdatinaker

Dilihat perkembangan tahun 2013-2019 TPAK menurut golongan umur 20-24 tahun masih cukup tinggi. Kondisi ini menggambarkan meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi/diploma yang baru menyelesaikan jenjang pendidikan dan mencari pekerjaan. Sementara golongan umur antara 45-49 TPAK-nya mengalami kenaikan dan sangat berfluktuasi. Dari data ini menggambarkan bahwa golongan umur antara 35-59 tahun merupakan kelompok usia produktif untuk melakukan pekerjaan yang mempunyai hubungan kerja atau berstatus formal. Sedangkan untuk golongan umur 15-19 tahun, masih merupakan usia sekolah sehingga diarahkan agar TPAK nya selalu menurun dan mempunyai dampak mengurangi angkatan kerja memasuki pasar kerja.

Namun apabila diperhatikan TPAK golongan umur 60+ tahun keatas menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan sampai dengan tahun 2018, kondisi



tersebut menggambarkan bahwa mereka walau telah memasuki kelompok usia pensiun tetapi masih tetap melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya.

2.3.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

PENDIDIKAN	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<= SD	60,13	66,36	65,99	67,68	67,08	67,53	65,99
SMTA Umum	66,81	68,35	68,91	71,14	70,62	70,32	68,63
SMTA Kejuruan						74,72	
Diploma I/ II/III	88,24	88,74	89,64	87,96	89,65	78,72	84,53
Universitas						90,5	
Jumlah	62,66	65,59	66,14	67,54	67,52	68,46	66,09

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019, diolah Pusdatinaker

Apabila dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2013-2019 mengalami kenaikan tiap tahunnya, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan dimana TPAK lulusan pendidikan SD sebesar 67,53 persen pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 65,99 persen dan pada tahun 2019.

TPAK lulusan pendidikan SMTP selama tahun 2013-2019 terus mengalami kenaikan dari sebesar 51,13 persen tahun 2013 menjadi 55,36 persen tahun 2019 atau naik sebesar 4,23 point. Sedangkan untuk TPAK tingkat pendidikan SMTA Umum dan Kejuruan sempat naik menjadi 71,14 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2013, namun kembali turun menjadi 68,63 persen pada tahun 2019. Untuk



Universitas kondisinya semakin meningkat TPAKnya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja, maka semakin tinggi pula partisipasi terhadap dunia kerja. Kondisi juga disebabkan oleh tingginya jumlah kelulusan jenjang pendidikan tinggi dan tidak sempat memasuki dunia kerja. Apabila dilihat dari TPAK lulusan Universitas pada tahun 2013-2019 kondisinya menggambarkan bahwa terjadi kenaikan meskipun menunjukkan trend yang berfluktuatif dari tahun 2018, kemudian kembali naik pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 di atas.

2.3.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Dapat kita lihat TPAK laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, yakni tahun 2013 sebanyak 82,92 persen naik menjadi 84,34 tahun 2019. Sedangkan untuk perempuan tahun 2013 sebanyak 41,55 persen naik menjadi 47,03 persen tahun 2019. Hal ini dipengaruhi peran ganda mereka dalam rumah tangga, terutama perempuan cenderung keluar dari pasar kerja ketika masa perkawinan, melahirkan dan membesarkan anak dan kemudian kembali ke dunia kerja ketika anak-anak sudah besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

JENIS KELAMIN	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Laki - Laki	82,92	83,85	84,65	85,65	84,00	84,26	84,34
Perempuan	41,55	46,46	46,77	48,6	50,28	51,95	47,03
Jumlah	62,66	65,59	66,14	67,54	67,52	68,46	66,09

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019



2.3.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Selama tahun 2013-2019 tingkat partisipasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi cenderung mengalami kenaikan secara fluktuatif. TPAK kota jambi merupakan Kabupaten yang memiliki TPAK yang cenderung positif kenaikannya setiap tahun, dimana pada tahun 2013 TPAK-nya sebanyak 60,8 persen, maka selama rentang waktu tahun 2014 hingga tahun 2019 TPAKnya terus meningkat menjadi 66,84% tanpa mengalami penurunan.

Namun demikian secara umum, TPAK Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi angkanya mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Walaupun terjadi penurunan di tahun 2019. Penurunan yang cukup tajam terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dari sebesar 75,42 persen pada tahun 2018, tetapi tahun 2019 jumlahnya menurun drastis hingga menjadi 70,56 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

KABUPATEN / KOTA	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Kerinci	69,32	69,32	71,39	-	69,46	70,89	66,11
Kab. Merangin	60,9	67,6	64,63	-	69,82	69,90	69,14
Kab. Sarolangun	66,05	66,76	70,5	-	70,08	67,28	65,36
Kab. Batang Hari	65,25	64,22	63,82	-	64,39	65,17	60,63
Kab. Muaro Jambi	58,09	61,19	61,13	-	62,3	64,11	59,39
Kab. Tanjung Jabung Timur	64,75	70,3	68,18	-	75,97	71,53	70,09
Kab. Tanjung Jabung Barat	59,43	66,83	67,12	-	70,24	75,42	70,56
Kab. Tebo	63,23	72,75	71,97	-	70,61	70,79	70,54



Kab. Bungo	64,89	66,09	63,8	-	65,89	67,43	64,22
kota jambi	60,8	62,39	64,04	-	64,06	65,79	66,84
Kota Sungai Penuh	61,37	65,41	67,03	-	66,05	71,12	63,75
Lainnya *)							
Jumlah	62,68	65,59	66,14	67,54	67,52	68,46	66,09

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019

Keterangan:

*) Pada tahun 2016, Kabupaten/ Kota tidak mengadakan survey

2.4. ANGKATAN KERJA

Secara struktural angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja berumur 15 tahun keatas, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi pada tahun 2013 yakni 1.452.832 orang naik menjadi 1.765.747 orang tahun 2019 atau sebanyak 312.915 orang. Secara umum struktur angkatan kerja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa karakteristik yang secara rinci dipaparkan pada uraian berikut.

2.4.1. Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

Bila dilihat dari sisi golongan umur, angkatan kerja di Provinsi Jambi selama tahun 2013 sampai dengan 2019 masih didominasi golongan umur 30-34 tahun yakni tahun 2013 sebanyak 232.918 orang naik menjadi 225.549 orang tahun 2019 atau sebanyak 13.060 orang. Kemudian diikuti golongan umur 25-29 tahun yakni tahun 2013 sebanyak 212.489 orang naik menjadi 222.826 orang tahun 2019 atau sebanyak 10.092 orang serta golongan umur 35-39 yakni tahun 2013 sebanyak 182.175 orang naik menjadi 228.635 atau 46.460 orang.



Tabel 2.10
Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

GOLONGAN UMUR	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15-19	76.511	87.997	74.760	90.979	86.260	87.250	80.018
20-24	166.643	172.250	194.526	203.754	183.352	215.980	196.902
25-29	212.489	198.839	217.002	225.739	186.906	229.684	225.549
30-34	232.918	235.176	226.388	223.197	245.852	233.174	222.826
35-39	182.175	197.377	215.881	221.930	266.979	234.619	228.635
40-44	180.831	212.332	194.402	213.045	201.147	215.182	224.518
45-49	136.152	145.518	165.821	172.875	174.685	184.494	188.342
50-54	115.619	136.971	130.401	134.425	144.583	146.490	148.228
55-59	61.570	80.012	92.195	97.396	110.511	112.297	117.147
60+	87.924	104.350	109.376	108.853	124.358	131.267	133.582
Jumlah	1.452.832	1.570.822	1.620.752	1.692.193	1.724.633	1.790.437	1.765.747

Angkatan kerja kelompok umur 60-64 tahun jumlah maupun proporsinya paling rendah dibanding kelompok lainnya, namun cenderung terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan umur harapan hidup (UHH) yakni tahun 2013 sebanyak 87.924 orang naik menjadi 133.582 orang tahun 2019 atau sebanyak 45.658 orang sehingga mendorong jumlah penduduk usia kerja pada kelompok usia ini. Faktor Umur di Provinsi Jambi, terlihat tidak menjadi halangan untuk tetap berkarya. Namun demikian bagi sebagian penduduk yang ada di pedesaan tetap bekerja di usia tua merupakan pilihan untuk bisa tetap mencukupi kebutuhan sehari-hari.



2.4.2. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Secara umum angkatan kerja menurut tingkat pendidikan selama tahun 2013-2019 masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja berpendidikan SD kebawah, yakni dari 629.023 orang tahun 2013, naik menjadi 716.147 orang, kenaikan tersebut hingga terjadi pada pada tahun 2018 dan sedikit menurun di tahun 2019 yakni menjadi 671.932 orang. Bila ditelusuri angkatan kerja per pendidikan, maka proporsi angkatan kerja belum dapat menggeser pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya proporsi angkatan kerja mulai berpendidikan SD kebawah dan angkatan kerja pada tingkat pendidikan di atasnya. Namun demikian dominasi angkatan kerja dengan pendidikan SMTA/Umum, SMP dan SD ke bawah merupakan proporsi jumlah angkatan kerja terbesar di Provinsi Jambi selama rentang waktu tahun 2013 hingga 2019. Sementara itu untuk angkatan kerja dengan jenjang pendidikan SMTA Kejuruan meningkat setiap tahunnya, yang pada tahun 2013 berjumlah 375.516 orang, naik menjadi 529.602 orang atau naik sebanyak 154.086 orang.

Tabel 2.11
Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

PENDIDIKAN	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<= SD	629,023	721,571	711,708	704,950	718,320	716,147	671,932
SMTA Umum	375,516	402,091	425,998	478,660	485,532	384,767	529,602
SMK						130,074	
Diploma I/ II/III	160,979	160,529	174,754	188,874	200,035	52,182	219,989
Univ						171,676	
Jumlah	1,452,832	1,570,822	1,620,752	1,692,193	1,724,633	1,790,437	1,765,747

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019



Jumlah angkatan kerja berpendidikan SMTA ke atas diharapkan akan terus mengalami peningkatan terutama SMTA Kejuruan yang terlihat meningkat cukup signifikan baik jumlah maupun proporsinya, sehingga struktur angkatan kerja beberapa tahun ke depan diperkirakan akan mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula dengan jumlah angkatan kerja dengan pendidik lulusan Diploma menunjukkan kenaikan, serta angkatan kerja lulusan Universitas mengalami kenaikan yang cukup berarti baik jumlah maupun proporsinya, meskipun demikian persentase jumlahnya relatif masih cukup kecil bila dibanding dengan persentase jumlah angkatan kerja pada pendidik SD ke bawah, SMP dan SMA/Umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.11 diatas.

2.4.3. Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Komposisi angkatan kerja menurut jenis kelamin dilihat dari tahun 2013-2019 didominasi oleh angkatan kerja yang berjenis kelamin laki-laki, berkisar 67,90 persen. Pada tahun 2013 angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki berjumlah 981.167 orang (67,5 persen) dan perempuan berjumlah 471.665 orang (32,5 persen). Sampai dengan tahun 2019 angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki meningkat tajam dibanding angkatan kerja berjenis perempuan.

Dengan demikian proporsi angkatan kerja di Provinsi Jambi selama rentang waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 didominasi oleh angkatan kerja angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut ini.



Tabel 2.12
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

JENIS KELAMIN	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Laki - Laki	981,167	1,027,247	1,060,639	1,097,025	1,096,801	1,126,234	1,150,762
Perempuan	471,665	543,575	560,113	595,168	627,832	664,203	614,985
Jumlah	1,452,832	1,570,822	1,620,752	1,692,193	1,724,633	1,790,437	1,765,747

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019

Selain komposisi angkatan kerja di Provinsi Jambi didominasi oleh angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki, dengan trend yang terus meningkat setiap tahunnya, maka untuk komposisi angkatan kerja berjenis kelamin perempuan, trendnya juga terus mengalami kenaikan per tahunnya.

Kenaikan komposisi angkatan kerja perempuan tersebut secara umum dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup perempuan, yang sebagian besar mengambil pilihan untuk menjadi wanita karir, selain pekerjaan formal yang mempekerjakan perempuan juga semakin bertambah, terutama sektor industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.12 di atas.

2.4.4. Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Keadaan angkatan kerja selama periode 2013-2019 menurut Kabupaten Kota tidak jauh berbeda dengan keadaan penduduk usia kerja pada periode yang sama. Sebagian besar angkatan kerja di Provinsi Jambi berada di Kota Jambi, dengan rata-rata mencapai 16,7 persen per tahunnya. Urutan kedua berada di Kabupaten Muaro Jambi



dengan rata-rata sebesar 10,8 persen per tahunnya. Sementara itu di posisi ketiga berada di Kabupaten Merangin dengan rata-rata sebesar 10,2 persen per tahunnya dan diurutan ke empat yaitu Kabupaten Bungo dengan rata-rata pr tahunnya sebesar 10,1 persen. Sementara itu angkatan kerja paling sedikit dibanding 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi (tidak termasuk Kota Sungai Penuh), berada di Kabupaten Tanjabbar dengan rata-rata per tahun sebesar 9,2 persen, diikuti oleh Kabupaten Batang Hari dengan rata-rata sebesar 7,3 persen per tahun. Keadaan angkatan kerja tahun 2013-2019 tergambar dalam tabel 2.13.

Tabel 2.13
Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

KABUPATEN / KOTA	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Kerinci	118,738	117,851	125,755	-	124,603	128,730	121,421
Kab. Merangin	149,397	161,363	167,702	-	188,580	193,221	194,936
Kab. Sarolangun	119,878	125,995	136,788	-	143,197	141,403	141,141
Kab. Batang Hari	115,499	117,060	118,563	-	123,704	127,537	120,650
Kab. Muaro Jambi	154,803	170,323	175,959	-	190,808	203,136	194,767
Kab. Tanjung Jabung Timur	97,968	108,644	106,782	-	121,886	116,574	115,757
Kab. Tanjung Jabung Barat	122,920	143,319	147,698	-	161,822	178,400	170,734
Kab. Tebo	140,018	166,859	169,192	-	173,737	178,431	181,786
Kab. Bungo	147,073	156,008	154,992	-	168,733	177,855	173,907
kota jambi	248,761	262,291	274,449	-	284,018	297,290	307,022
Kota Sungai Penuh	37,777	41,109	42,872	-	43,545	47,860	43,626
Lainnya *)							
Jumlah	1,452,832	1,570,822	1,620,752	1,692,193	1,724,633	1,790,437	1,765,747

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019, diolah Pusdatinaker

Keterangan:

*)



2.5. PENDUDUK YANG BEKERJA

Sesuai konsep, yang dimaksud bekerja adalah orang yang melakukan sesuatu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan /keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus-putus. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi pada Agustus 2019 sebesar 1.691.782 , naik sebanyak 309.311 orang dari tahun 2013 yaitu sebesar 1.382.471 orang.

Untuk melihat terjadinya peningkatan dan penurunan ini akan diperhatikan dari pergeseran penduduk yang bekerja baik menurut jenis kelamin, lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, jabatan, jam kerja, golongan umur dan pendidikan yang ditamatkan.

2.5.1. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Situasi perekonomian Provinsi Jambi tahun 2013-2019 yang cenderung menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan, sehingga mempunyai dampak terhadap peningkatan didalam penyerapan tenaga kerja diberbagai sektor lapangan usaha. Penyerapan tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian, perdagangan dan jasa kemasyarakatan. Pada tahun 2013 penyerapan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 735.824 orang dan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 768.716 orang. Untuk bidang perdagangan pada tahun 2013 sebanyak 233.504 dan naik menjadi 262.535 pada tahun 2019.

Sementara itu penduduk yang bekerja pada sektor jasa kemasyarakatan merupakan sektor ketiga yang menyumbang perekonomian di Provinsi Jambi dari sektor ketenagakerjaan. Pada tahun 2013 sebanyak 212.204 orang, pada tahun 2019 jumlahnya berada diatas 300 ribu-an. Selanjutnya sektor yang paling sedikit penyerapan tenaga kerjanya adalah sektor listrik, gas dan air bersih dimana pada tahun 2013 hanya



menyumbang sebanyak 1.493 orang tenaga kerja, dan naik pada tahun 2019 menjadi 6000 an.

Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor Industri di Provinsi Jambi, juga telah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Provinsi Jambi, dimana pada tahun 2013 sektor ini telah memberikan sumbangan sebanyak 52.543 orang yang bekerja pada lapangan usaha industri, dan naik menjadi 94.573 orang pada tahun 2019. Meskipun berfluktuatif, namun kenaikan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan usaha pada sektor industri terus bertambah dari tahun ke tahun, hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya konsumsi barang, pangan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Jambi dari sektor industri, seperti industri makanan, industri pengolahan dan industri rumah tangga (home industry), serta produk-produk industri kerajinan khas daerah yang mulai diminati banyak kalangan, termasuk industri pariwisata.

Tabel 2.14
Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

No	LAPANGAN USAHA	TAHUN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian	735,824	736,204	819,545	800,719	805,086	Lihat di kolom 2	Lihat di kolom 2
2.	Pertambangan dan Penggalian	26,268	33,853	26,732	41,920	34,537		
3.	Industri	52,543	52,473	61,998	71,547	74,317		
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	1,493	4,362	2,394	6,736	5,639		
5.	Konstruksi	60,699	61,806	64,985	88,403	84,386		
6.	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	233,504	251,811	261,623	291,469	293,101		
7.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	52,785	55,521	55,030	57,087	62,069		
8.	Lembaga Keuangan, Real Estate Usaha Persewaan dan Jasa	21,927	25,439	21,314	25,668	24,802		
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	212,204	269,569	236,782	240,973	273,880		
	Jumlah	1,397,247	1,491,038	1,550,403	1,624,522	1,657,817		



Lapangan Usaha	2018	2019
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	815,049	768,716
B Pertambangan dan Penggalian	44,410	49,302
C Industri Pengolahan	85,674	94,573
D Pengadaan Listrik dan Gas	3,238	2,843
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,620	3,928
F Konstruksi	92,368	86,553
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	265,575	262,535
H Transportasi dan Pergudangan	51,933	54,941
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	64,480	77,380
J Informasi dan Komunikasi	6,521	7,125
K Jasa Keuangan dan Asuransi	14,649	11,368
L Real Estat	1,679	1,435
M,N Jasa Perusahaan	15,315	15,775
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	85,236	86,522
P Jasa Pendidikan	96,610	87,960
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27,323	27,219
R,S,T,U Jasa Lainnya	46,682	53,607
Total	1,721,362	1,691,782

2.5.2. Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur

Perkembangan jumlah penduduk usia kerja dalam lima tahun terakhir meningkat, jumlah penduduk usia kerja tahun 2019 mencapai 1.691.782 jiwa lebih besar 309.311 dari tahun 2013, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 1.382.471 jiwa.



Tabel 2.15
Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

GOLONGAN UMUR	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15-19	54,061	65,286	58,372	68,185	70,659	68,945	60,997
20-24	144,204	143,539	171,203	191,990	160,136	189,130	168,887
25-29	198,822	188,283	203,780	211,539	176,565	218,356	211,835
30-34	229,116	226,383	219,981	214,336	239,302	228,946	218,933
35-39	179,170	195,755	211,670	219,772	262,725	231,832	226,969
40-44	179,351	209,318	192,309	211,087	198,209	212,206	220,584
45-49	134,307	143,651	163,680	170,627	173,723	183,705	186,580
50-54	114,877	136,316	129,948	132,401	143,793	145,906	147,561
55-59	61,180	78,405	90,216	96,769	109,389	111,123	116,090
60+	87,383	104,102	109,244	107,816	123,316	131,213	133,346
Jumlah	1,382,471	1,491,038	1,550,403	1,624,522	1,657,817	1,721,362	1,691,782

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019, diolah Pusdatinaker

2.5.3. Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan

Di Provinsi Jambi, pada Agustus 2013 terdapat sebanyak 612.338 orang atau 44,29 persen dari total penduduk bekerja adalah berpendidikan SD kebawah. Sebesar 341.253 orang pekerja berpendidikan SMU/SMK, kemudian 275.115 orang pekerja berpendidikan SMP dan 153.765 orang lulusan perguruan tinggi.

Perbaikan kualitas tenaga kerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya tenaga kerja berpendidikan rendah (SD ke bawah) dan meningkatnya tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (diploma dan universitas). Bisa dilihat dari kenaikannya pada tahun 2019. Pada jenjang lulusan SD, pada tahun 2019 memang ada kenaikan dibandingkan tahun 2019, namun masih dibawah dibandingkan jenjang kelulusan



lainnya. Pada tahun 2019, lulusan SD sebanyak 661.502. Untuk SMPT 337.277, SMTA/SMK sebanyak 484.843 serta lulusan D3/ Univ sebanyak 208.161

Besarnya kenaikan penduduk yang bekerja dengan pendidikan Diploma dan Universitas ini menandakan semakin meningkatnya kualitas pekerja di Provinsi Jambi, sehingga diharapkan produktivitas akan semakin meningkat yang dapat berdampak pada kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.16
Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

PENDIDIKAN	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
< SD	612,338	707,898	701,310	691,764	707,048	706,906	661,501
SMTP	275,115	272,003	299,565	306,196	310,523	326,994	337,277
SMTA	341,253	364,159	387,356	446,101	450,087	356,348	484,843
SMK						119,991	
Diploma I/ II/III	153,765	146,978	162,172	180,461	190,159	49,523	208,161
Univ						161,600	
Jumlah	1,382,471	1,491,038	1,550,403	1,624,522	1,657,817	1,721,362	1,691,782

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019, diolah Pusdatinaker

2.5.4. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin

Jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki yang bekerja selama periode 2013-2019 lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja perempuan. Penduduk yang bekerja laki-laki sebanyak 941.255 orang pada tahun 2013, meningkat menjadi 1.108.298 pada tahun 2019. Untuk jumlah penduduk perempuan



yang bekerja pada tahun 2013 sebesar 441.216 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 583.484.

Melihat jumlah pekerja laki-laki di Provinsi Jambi masih didominasi pekerja laki-laki dibanding pekerja perempuan yang sangat tinggi kesenjangan, yaitu 65 berbanding 35 persen penduduk . bekerja berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2.17
Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

JENIS KELAMIN	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Laki - Laki	941,255	984,040	1,018,211	1,054,721	1,060,241	1,088,179	1,108,298
Perempuan	441,216	506,998	532,192	569,801	597,576	633,183	583,484
Jumlah	1,382,471	1,491,038	1,550,403	1,624,522	1,657,817	1,721,362	1,691,782

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019, diolah Pusdatinaker

2.5.5. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan/Jabatan

Selaras dengan komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, ditinjau berdasarkan jabatannya penduduk yang bekerja selama tahun 2013-2019 didominasi oleh mereka yang bekerja sebagai tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Proporsi penduduk yang bekerja sebagai tenaga usaha pertanian pada tahun 2013 sebesar 51,40 persen, dan pada tahun 2019 kembali turun menjadi 43,64 persen.

Untuk 3 jenis pekerjaan/ jabatan yang memiliki jumlah terkecil yaitu tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan pada tahun 2013 sebesar 13.472 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 17.073. Untuk tenaga usaha jasa pada tahun 2013 sebesar



39.371 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 79.584. Dan tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis pada tahun 2013 sebanyak 97.417 dan tahun 2019 meningkat menjadi 128.881 orang.

Sejalan dengan berkembangnya teknologi komputerisasi dan teknologi informasi, sangat mendukung setiap organisasi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Melalui teknologi komputerisasi yang dapat berkembang menjadi teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja pada jenis jabatan ketatausahaan, usaha pertanian, tenaga usaha jasa dan yang lainnya. Akan tetapi, di sisi lain kemajuan teknologi tersebut juga mampu mendorong tumbuhnya tenaga-tenaga profesional seperti tenaga ahli di bidang teknologi informasi, komputer dan sebagainya, sehingga jumlahnya mengalami peningkatan selama tahun 2013-2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan/Jabatan
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

JENIS PEKERJAAN/ JABATAN *)	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0/1	97,417	100,762	117,637	121,820	120,231	130,313	128,881
2	13,472	18,230	16,753	9,614	14,965	16,497	17,073
3	81,050	65,552	70,459	75,752	99,931	103,267	81,556
4	211,070	230,398	234,406	265,575	231,156	250,754	258,608
5	39,371	110,870	56,460	49,396	73,139	67,622	79,584
6	710,726	718,534	796,525	769,878	792,328	794,207	738,416
7/8/9	220,373	240,964	247,446	317,058	301,997	337,515	358,524
X/00	8,992	5,728	10,717	15,429	24,070	21,187	29,140
Jumlah	1,382,471	1,491,038	1,550,403	1,624,522	1,657,817	1,721,362	1,691,782



Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019, diolah Pusdatinaker

*)Keterangan:

- 0/1. Tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis
2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan
3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis
4. Tenaga usaha penjualan
5. Tenaga usaha jasa
6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan
- 7/8/9. Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar
- X/00. Lainnya

2.5.6. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Penduduk yang bekerja dengan status informal selama tujuh tahun cenderung berfluktuasi. Pekerja dengan status berusaha buruh/karyawan/pegawai merupakan terbesar dengan proporsi yang terus meningkat sampai tahun 2019. Sementara status berusaha dibantu buruh tidak tetap proporsinya hanya mengalami sedikit kenaikan yang. Sedangkan proporsi pekerja bebas di Non pertanian hanya berkisar 2,80 persen per tahunnya.

Pekerja dengan status berusaha buruh/karyawan/pegawai pada tahun 2013 sebesar 37,12 persen dan pada tahun 2019 menjadi 39,41 persen. Kenaikan dan trend perubahan yang meningkat pada pekerja dengan status berusaha buruh/karyawan/pegawai selama rentang waktu diatas, menunjukkan bahwa pekerja sektor formal di Provinsi Jambi telah terjadi peningkatan secara positif, hal ini ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan usaha pada sektor formal yang semakin menggeliat, yang sebagian mereka bekerja sebagai karyawan di perusahaan yang bergerak pada bidang usaha dan jasa perdagangan, sektor pemerintah dan swasta lainnya yang mempekerjakan karyawannya sebagai pegawai tetap.

Sementara itu untuk pekerja dengan status berusaha sendiri juga menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat meskipun berfluktuatif. Tahun 2013 sebesar



23,81 persen dan pada tahun 2019 dengan jumlah 23,08 persen, dengan rata-rata pertahunnya sebesar 21,76 persen.

Untuk pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap, proporsinya terus menurun dari sebesar 14,39 persen pada tahun 2013, menjadi 12,51 persen pada tahun 2019.

Hal yang menarik dari tabel 2.19 terlihat bahwa proporsi penduduk yang bekerja dengan status pekerja tidak dibayar ternyata jumlahnya cukup besar, yaitu dengan proporsi rata-rata selama tahun 2013-2019 sebesar 14,52 persen atau 230.190 orang dari total penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi. Pada tahun 2013 penduduk yang bekerja dengan status pekerja tidak dibayar sebanyak 188.103 orang atau 13,60 persen sampai dengan tahun 2019 jumlahnya turun menjadi 212.541 atau 12,56 persen.

Terjadinya trend penduduk yang bekerja dengan status pekerja tidak dibayar, mengindikasikan bahwa jumlah pekerja yang bekerja pada sektor rumah tangga semakin dibutuhkan, hal ini untuk mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan income bagi usaha rumah tangga yang memiliki keterbatasan aksesibilitas, seperti modal, tempat usaha, manajemen dan faktor produksi lainnya, sehingga tidak mampu memberikan gaji/penghasilan atas usahanya kepada orang lain yang dipekerjakan pada bidang usahanya, sehingga harus mempekerjakan keluarga sendiri. Selain itu keuntungan yang diperoleh bisa dijadikan tambahan modal dan kebutuhan hidup sehari-hari bagi keluarganya.

Disamping itu masih dominannya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor informal dari tahun ke tahun mengindikasikan berbagai hal antara lain rendahnya produktivitas kerja, rendahnya kemampuan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja sehingga berdampak pada banyaknya setengah pengangguran dan meningkatnya pekerja paruh waktu. Disamping itu karena pekerja informal tidak terikat oleh suatu peraturan hukum yang mengikat dan tidak terdaftar, berdampak pada kurangnya



perlindungan jaminan kerja bagi pekerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa secara riil sektor informal masih berfungsi sebagai jaring pengaman dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.19
Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

STATUS PEKERJAAN	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Berusaha sendiri	329,252	319,942	324,447	336,717	350,570	364,445	390,551
2. berusaha dibantu buruh tidak tetap	199,002	263,154	223,851	289,050	256,330	260,267	211,667
3. Berusaha dibantu buruh tetap	60,150	61,928	61,175	66,871	67,805	79,554	69,260
4. Buruh/ Karyawan/ Pegawai	513,279	496,310	579,926	548,925	619,663	680,043	666,820
5. Pekerja bebas di Pertanian	56,220	53,655	77,817	60,820	86,546	118,505	99,098
6. pekerja bebas di Non Pertanian	36,465	45,576	52,601	49,010	38,954		41,845
7. Pekerja Tidak dibayar	188,103	250,473	230,586	273,129	237,949	218,548	212,541
Jumlah	1,382,471	1,491,038	1,550,403	1,624,522	1,657,817	1,721,362	1,691,782

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019, diolah Pusdatinaker

2.5.7. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja

Perekonomian nasional yang membaik biasanya tercermin dari meningkatnya berbagai kegiatan produksi barang dan jasa di berbagai sektor lapangan usaha. Peningkatan tersebut dapat dicapai jika penduduk yang bekerja diatas jam kerja normal (lebih 35 jam seminggu). Dilihat dari penduduk yang bekerja menurut jam kerja selama tahun 2013-2019 di Provinsi Jambi menggambarkan bahwa penduduk yang bekerja di atas 35 jam perminggu jumlahnya cukup besar dan mengalami kenaikan yang fluktuatif. Pada tahun 2013 penduduk yang bekerja antara 35-60 jam kerja sebanyak 513.130



orang (37,11 persen). Dan pada tahun 2019 naik drastis menjadi 1.029.950. Berarti kenaikan mencapai 516.820.

Tabel 2.20
Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

JAM KERJA	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0*)	163.373	42.152	27.776	27.508	24.901	25.712	27.735
1 – 9	107.764	40.308	34.322	37.666	49.184	46.609	48.064
10 -14	104.310	66.636	48.148	60.649	69.294	56.435	65.967
15 – 24	271.084	290.668	261.416	232.288	259.214	249.841	244.543
25 – 34	215.521	280.798	312.986	266.395	276.281	269.348	275.523
35 – 44	240.902	348.573	414.908	449.276	393.296	452.635	438.788
45 – 59	216.576	330.820	345.675	393.845	418.477	459.546	426.236
60+	77.717	91.083	105.172	156.895	167.170	161.236	164.926
JUMLAH	1.397.247	1.491.038	1.550.403	1.624.522	1.657.817	1.721.362	1.691.782

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019,

*) sementara tidak bekerja

Menurunnya proporsi penduduk yang bekerja 35-44 jam kerja dan 55+ jam kerja kemungkinan disebabkan karena membaiknya berbagai indikator perekonomian nasional belum memberikan dampak langsung terhadap perkembangan kegiatan produksi dan kesejahteraan pekerja di beberapa sektor lapangan usaha tertentu. Sebagai akibatnya adalah masih tingginya kasus perselisihan hubungan industrial yang berujung pada unjuk rasa/pemogokkan dan pemutusan hubungan kerja. Sebaliknya penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal yang disebut bekerja tidak penuh mengalami penurunan sampai tahun 2019, yakni pada tahun 2013 sebanyak 862.052 dan menjadi 661.832 pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.20.



2.5.8. Penduduk Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota

Di Provinsi Jambi penduduk yang bekerja terbesar berada di Kota Jambi yakni mencapai 230.234 orang pada tahun 2013, dan naik kembali pada tahun 2019 menjadi 286.387 orang, dengan demikian proporsi penduduk bekerja di Kota Jambi rata-rata mencapai 16,32 persen per tahunnya.

Terbesar kedua yaitu Kabupaten Merangin yaitu pada tahun 2013 sebesar 140.420 naik 47.103 menjadi 187.523 pada tahun 2019.

Tabel 2.21
Penduduk Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

KABUPATEN / KOTA	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Kerinci	110,273	112,623	121,140	-	120,538	125,009	118,080
Kab. Merangin	140,420	157,248	158,682	-	180,842	186,190	187,523
Kab. Sarolangun	115,517	120,786	130,586	-	139,970	135,498	135,156
Kab. Batang Hari	108,642	110,401	114,560	-	119,290	122,421	114,983
Kab. Muaro Jambi	150,498	162,894	166,449	-	180,532	193,672	184,465
Kab. Tanjung Jabung Timur	94,513	106,765	105,246	-	119,009	114,413	113,773
Kab. Tanjung Jabung Barat	116,899	141,401	143,738	-	156,851	174,005	166,179
Kab. Tebo	138,994	160,420	165,912	-	170,293	174,740	176,355
Kab. Bungo	140,630	146,111	150,375	-	160,485	172,357	167,075
kota jambi	230,243	235,722	254,351	-	268,264	277,802	286,387
Kota Sungai Penuh	35,842	36,667	39,364	-	41,743	45,255	41,806
Lainnya *)							
Jumlah	1,397,247	1,491,038	1,550,403	1,624,522	1,657,817	1,721,362	1,691,782

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019, diolah Pusdatinaker

Keterangan:

*) Daerah dengan *responden rate* tidak memenuhi syarat untuk dilakukan estimasi



2.6. PENGANGGUR TERBUKA

Penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi pada Agustus 2019 mencapai 4,19 persen, mengalami peningkatan dibandingkan keadaan Agustus 2018 sebesar 3,86 persen juga meningkat dibandingkan TPT Agustus 2017 sebesar 5,50 persen. Secara kuantitas jumlah pengangguran Provinsi Jambi berfluktuasi, yaitu sebesar 7,04 juta pada Agustus 2017, kemudian turun menjadi 7,00 juta pada Agustus 2018 dan kembali meningkat pada Agustus 2019 menjadi 7,05 juta orang.

2.6.1. Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur

Dari tabel 2.22 dapat kita lihat bahwa sebagian besar penganggur di Provinsi Jambi berada dalam kelompok usia muda dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi serta umumnya belum mempunyai ketrampilan khusus dan belum memiliki pengalaman kerja. Sektor informal, termasuk sektor pertanian yang selama ini menjadi katup pengaman dalam penyerapan tenaga kerja sepertinya masih belum mampu menyerap secara optimal para penganggur yang sebagian besar berada b dalam usia yang sangat produktif. Harapan yang tinggi dari para penganggur muda ini terutama yang berpendidikan tinggi untuk mendapatkan lapangan kerja di sektor formal yang produktif dan sesuai dengan jurusannya, sukar untuk terwujud karena kualifikasi mereka yang terbatas, diantaranya minim keterampilan dan pengalaman kerja. Selain itu, latar belakang pendidikannya yang tidak relevan dengan lapangan kerja ditambah jumlah



lapangan kerja di sektor formal yang memang masih terbatas membuat jumlah penganggur muda ini tetap tinggi setiap tahunnya.

Tabel 2.22
Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

GOLONGAN UMUR	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15-19	22,450	22,711	16,388	22,794	15,601	18,305	19,021
20-24	22,439	28,711	23,323	11,764	23,216	26,850	28,015
25-29	13,667	10,556	13,222	14,200	10,341	11,328	13,714
30-34	3,802	8,793	6,407	8,861	6,550	4,228	3,893
35-39	3,005	1,622	4,211	2,158	4,254	2,787	1,666
40-44	1,480	3,014	2,093	1,958	2,938	2,976	3,934
45-49	1,845	1,867	2,141	2,248	962	789	1,762
50-54	742	655	453	2,024	790	584	667
55-59	390	1,607	1,979	627	1,122	1,174	1,057
60+	541	248	132	1,037	1,042	54	236
Jumlah	70,361	79,784	70,349	67,671	66,816	69,075	73,965

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019, diolah Pusdatinaker

Apabila dilihat dari golongan umur, pengangguran tertinggi di Provinsi Jambi pada golongan umur 20-24 tahun yaitu berkisar 32,8 persen per tahunnya, kemudian golongan umur 15-19 tahun juga relatif tinggi berkisar 27,55 persen per tahunnya. Sementara pengangguran terendah pada golongan umur 65 tahun ke atas. Penganggur pada golongan usia 15-19 tahun pada tahun 2013 sebesar 22.450 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 19.021. Penurunan jumlah pengangguran tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, makin membaiknya perekonomian



Provinsi Jambi sehingga terbukanya perluasan kesempatan kerja diberbagai sektor lapangan usaha yang dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran.

Berdasarkan kelompok umur, kecenderungannya adalah semakin tinggi umur angkatan kerja semakin rendah pula tingkat penganggurannya. Pada Tabel 2.22 terlihat, pada kelompok umur 15-24 tahun merupakan penduduk usia sekolah yang selayaknya melakukan kegiatan pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi dan belum siap untuk memasuki pasar kerja. Namun pada kenyataannya tingkat pengangguran pada kelompok umur ini dari tahun 2013-2019 justru masih cukup tinggi. Tingkat pengangguran terbuka golongan umur 20-24 tahun juga terjadi kenaikan yaitu pada tahun 2013 sebesar 22.439 dan menjadi 28.015 pada tahun 2019.

2.6.2. Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan

Penganggur terbuka menurut tingkat pendidikan tahun 2013-2019 menunjukkan adanya peningkatan pada semua jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD, pada tahun 2013 sebesar 20.604 dan pada tahun 2019 turun hampir separoh yaitu sebanyak 10.431. Untuk jenjang pendidikan SMTA Umum pada tahun 2013 sebesar 15.123 dan pada tahun 2019 menjadi 29.009. Dan jenjang SMTA Kejuruan juga mengalami kenaikan dari 5.719 pada tahun 2013 menjadi 15.750 pada tahun 2019

Pada tahun 2013-2019 tingkat penganggur terbuka yang berpendidikan SMTA Umum, SMTA Kejuruan, Diploma maupun Universitas masih cukup tinggi, dimana pada tahun 2013 penganggur berpendidikan SMTA umum/ Kejuruan mencapai 48,69 persen turun menjadi 60,51 persen tahun 2019.



Tabel 2.23
Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

PENDIDIKAN	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
< SD	16,685	13,673	10,398	13,186	11,272	9,241	10,431
SMTP	12,199	14,628	8,727	13,513	10,223	8,597	6,947
SMTA Umum	34,263	37,932		21,995	35,445	28,419	29,009
SMTA Kejuruan			38,642	10,564			
Diploma I/ II/III	7,214	13,551	12,582	2,925	9,876	2,659	1,655
Universitas				5,488		10,076	10,173
Jumlah	70,361	79,784	70,349	67,671	66,816	69,075	73,965

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019,

2.6.3. Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, laki-laki merupakan penganggur terbanyak yaitu dengan proporsi mencapai 57,27 persen rata-rata per tahunnya. Sementara penganggur berjenis kelamin perempuan sebesar 42,72 persen rata-rata pertahunnya.

Pada tahun 2013 jumlah penganggur berjenis kelamin laki-laki sebanyak 39.912 orang atau berbanding positif dengan penganggur berjenis kelamin perempuan sebanyak 30.449 orang atau 56,72 persen berbanding 43,27 persen. Dan pada tahun 2019 penganggur berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42.464 orang atau 57,41 persen, naik sebanyak 2.552 sedangkan perempuan naik 1.052 menjadi 31.501 orang atau 42,58 persen.



Tabel 2.24
Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

JENIS KELAMIN	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Laki - Laki	39,912	43,207	42,428	42,304	36,560	38,055	42,464
Perempuan	30,449	36,577	27,921	25,367	30,256	31,020	31,501
Jumlah	70,361	79,784	70,349	67,671	66,816	69,075	73,965

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019

2.6.4. Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota

Penganggur terbuka di Provinsi Jambi dari tahun 2013-2019 terbanyak di Kota Jambi, dengan proporsi rata-rata jumlah penganggur selama tahun 2013-2019 sebanyak 121.062 orang atau 24,62 persen. Pada tahun 2013 jumlah penganggur di Provinsi Jambi mencapai 70.361 orang, naik menjadi 73.965 orang pada tahun 2019. Apabila dilihat dari proporsi jumlah pendudukan, Kota Jambi merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Jambi dibanding Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Jambi.

Sementara 3 (tiga) Kabupaten yang mengalami penurunan atau peningkatan secara signifikan, yaitu Kabupaten Kerinci, yaitu pada tahun 2013 jumlah penganggur terbuka sebanyak 8.465 dan tahun 2019 turun menjadi 3.341 jumlah penurunannya adalah sebesar 5.124. Kabupaten Muaro Jambi, jumlah penganggur terbuka pada tahun 2013 sebesar 4.305 naik menjadi 10.302 pada tahun 2019. Dan Kabupaten Tebo, pada tahun 2013 sebanyak 1.024 menjadi 5.431 pada tahun 2019.



Tabel 2.25
Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Jambi Tahun 2013-2019

KABUPATEN / KOTA	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Kerinci	8,465	5,228	4,615	-	4,065	3,721	3,341
Kab. Merangin	8,977	1,749	9,020	-	7,738	7,031	7,413
Kab. Sarolangun	4,361	5,209	6,202	-	3,227	5,905	5,985
Kab. Batang Hari	6,857	5,239	4,003	-	4,414	5,116	5,667
Kab. Muaro Jambi	4,305	7,429	9,510	-	10,276	9,464	10,302
Kab. Tanjung Jabung Timur	3,455	963	1,536	-	2,877	2,161	1,984
Kab. Tanjung Jabung Barat	6,021	1,918	3,960	-	4,971	4,395	4,555
Kab. Tebo	1,024	4,819	3,290	-	3,444	3,691	5,431
Kab. Bungo	6,443	9,897	4,617	-	8,248	5,498	6,832
kota jambi	18,518	26,569	20,098	-	15,754	19,488	20,635
Kota Sungai Penuh	1,935	4,442	3,508	-	1,802	2,605	1,820
Lainnya *)							
Jumlah	70,361	73,462	70,359	67,671	66,816	69,075	73,965

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2019

2.7. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Produktivitas tenaga kerja memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena pendapatan daerah banyak diperoleh dengan cara meningkatkan keefektifitasan dan mutu tenaga kerja. Sampai dengan tahun 2019 nilai tambah setiap tenaga kerja di Provinsi Jambi relatif masih rendah.

Berdasarkan Tabel 2.26 terlihat bahwa sektor Real Estate merupakan sektor yang mempunyai nilai produktivitas tertinggi, dengan produktivitas per tahunnya sebesar Rp. 1.267,93 juta/tenaga kerja. Sementara sektor yang berada diposisi ke 2 (dua) ditempati



sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 873,65 juta/TK/Tahunnya. Produktivitas ke 3 (tiga) yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 757,25 juta/TK/Tahun. Sementara untuk produktivitas terendah berada di sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya menyumbang sebesar Rp. 25,52 juta/TK/Tahun.

Tabel 2.26
Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Jambi Tahun 2014-2019 (Jt/TK)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,30	40,08	43,63	45,72	46,60	50,47
2. B Pertambangan dan Penggalian	914,31	1.155,17	739,91	932,54	770,25	729,73
3. C Industri Pengolahan	240,23	212,50	196,49	179,55	176,68	164,70
4. D Pengadaan Listrik dan Gas	16,35	41,97	11,49	33,30	22,54	27,44
5. E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	59,95	47,97	49,60	35,93	41,34	50,66
6. F Konstruksi	138,47	136,09	103,58	116,35	111,85	127,59
7. G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	46,32	49,78	49,92	53,86	52,46	56,95
8. H Transportasi dan Pergudangan	72,41	74,47	89,10	80,33	90,46	88,68
9. I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37,92	29,85	25,59	23,37	25,12	21,97
10. J Informasi dan Komunikasi	490,32	1.377,22	437,46	635,48	813,68	789,33
11. K Jasa Keuangan dan Asuransi	183,68	218,85	268,25	230,85	218,31	286,77
12. L Real Estate	-	-	2.590,10	2.243,74	1.232,28	1.541,46
13. M,N Jasa Perusahaan	131,28	160,59	128,51	169,50	98,14	99,08
14. O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	76,13	68,10	70,41	54,58	57,19	59,09
15. P Jasa Pendidikan	49,95	43,27	44,36	50,78	48,66	56,51
16. Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77,89	79,49	56,71	51,92	60,75	65,32
17. R,S,T,U Jasa Lainnya	10,98	35,09	37,51	30,62	31,83	28,88
Jumlah	2.588,50	3.770,49	4.942,63	4.968,41	3.898,16	4.244,63



2.8. PELATIHAN TENAGA KERJA

Dalam perspektif pembangunan ketenagakerjaan, paling tidak ada 3 (tiga) hal yang harus menjadi perhatian utama dalam menyusun arah kebijakan strategis dan rencana prioritas yang harus dilakukan. **Pertama** Mempersiapkan tenaga kerja yang produktif, inovatif dan memiliki skill. Kondisi diharapkan agar para tenaga kerja kita mampu menjawab berbagai tantangan, terutama dunia kerja global yang menuntut skill yang tinggi, dan keterampilan yang memadai dan mampu meningkatkan produktivitas yang menghasilkan kinerja bagi pasar kerja, baik pasar kerja yang berorientasi kepada hasil produksi, maupun pasar kerja mandiri, yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan pendapatan dan mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerjanya dengan layak. **Kedua** Memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja bagi para tenaga kerja. Orientasi kedua ini mengandung makna strategis, bahwa ketika kualitas sumber daya manusia tenaga kerja meningkat, maka upaya yang harus dilakukan adalah memperluas kesempatan kerja dan peluang kerja bagi mereka, artinya pasar kerja harus mampu menyerap dan menyiapkan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. **Ketiga** Mewujudkan perlindungan bagi para tenaga kerja. Perlindungan bagi tenaga kerja merupakan hak dasar dan hak asasi yang harus diperlakukan secara adil dan berkeadilan, yaitu dengan menempatkan posisi tenaga kerja sebagai bagian sumber daya dan investasi yang besar dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Perlindungan tenaga kerja dapat diartikan sebagai bentuk upaya melindungi tenaga kerja dari tindakan atau usaha yang dapat merugikan tenaga kerja itu sendiri yang dilakukan oleh pengguna secara tidak adil, selain perlindungan yang harus diterima oleh tenaga kerja, upaya pengawasan pada saat mereka bekerja juga merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan pengguna tenaga kerja melalui penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), jaminan sosial tenaga



kerja, sistem upah yang layak serta menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang harmonis, bagi pengguna maupun tenaga kerja yang bersangkutan.

Terhadap 3 (tiga) aspek sebagaimana dikemukakan diatas, maka sesuai dengan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2010-2025 adalah mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat, baik dalam sektor formal maupun bagi pekerja informal, peningkatan kesejahteraan pekerja informal, terciptanya pasar yang fleksibel yang ditandai dengan produktivitas tenaga kerja, pengelolaan pelatihan tenaga kerja bagi program pelatihan strategis, kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan dinamika kebutuhan industri dan persaingan global, hubungan industrialis yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang memuaskan bagi semua pihak.

Dalam kontelasi perspektif pertama yang dijelaskan diatas, maka dengan melihat struktur ketenakerjaan yang dihadapi saat ini, khususnya di Provinsi Jambi bahwa permasalahan utama yang kita hadapi adalah masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja. Dalam struktur angkatan kerja yang ada saat ini (hingga tahun 2019), jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi sebagian besar atau lebih kurang 50% berpendidikan Sekolah Dasar yang bekerja diberbagai sektor, baik industri maupun jasa, dan sektor lainnya. Hal ini tentu menjadi tantangan yang besar bagi kita, terutama menghadapi ketatnya persaingan global, dan kondisi ini tentu dalam jangka panjang akan dapat menghambat proses pembangunan yang lebih luas dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja kita yang merupakan modal bagi kesinambungan pembangunan. Meskipun demikian, bagi tenaga kerja yang memiliki pendidikan mulai dari tamatan SMTA, hingga Perguruan Tinggi masih sebagian kecil yang mampu bekerja pada sektor-sektor formal strategis, karena sebagian besar dari mereka juga belum mampu untuk bersaing secara terbuka.



Selain itu secara umum, selain permasalahan kualitas SDM tenaga kerja, permasalahan lain yang masih kita hadapi adalah angka pengangguran yang relatif cukup tinggi, meskipun secara nasional angka pengangguran di Provinsi Jambi masih berada dibawah rata-rata nasional, terbatasnya peluang kerja di sektor formal dan masih tingginya minat tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja indonesia tanpa adanya dukungan kesiapan tenaga kerja itu sendiri, masalah PHK, perselisihan hubungan industrial, masih terbatasnya tenaga fungsional pengawasan serta masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan K3 bagi tenaga kerjanya, dan perlindungan bagi tenaga kerja, hal ini masih merupakan tugas berat yang harus dilakukan ke depan.

Dalam Bidang Pelatihan Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan unsur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, masih diperlukan perkuatan dari berbagai aspek, mulai aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana serta aspek pembelajaran dan pelatihan yang diharapkan dapat berorientasi kepada kebutuhan pasar kerja. Oleh karenanya, diperlukan suatu pengkajian dan penelaahan secara komprehensif, dengan mencermati berbagai tuntutan yang semakin berkembang baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, serta mencermati berbagai permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan, sehingga diharapkan melalui upaya tersebut peran dan eksistensi UPTD Balai Pelatihan Kerja dan Produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, akan menjadi *leader* dalam mempersiapkan para tenaga kerja dan pencari kerja khususnya dalam memasuki pasar kerja global yang menuntut kesiapan, dan keterampilan yang lebih baik.

Pelatihan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai



satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Pelatihan kerja akan semakin penting peranannya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, dimana dibutuhkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja. Pelatihan-pelatihan yang dikelola oleh lembaga pelatihan memerlukan informasi mengenai jenis ketrampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Jenis pelatihan dapat direncanakan lebih baik apabila sistem informasi pasar kerja dapat dibangun. Hal ini juga dapat mengurangi berbagai kegiatan pelatihan yang tidak relevan terhadap permintaan pasar kerja. Terbentuknya sistem informasi pasar kerja sangat bermanfaat pula bagi pengambil kebijakan untuk menyusun kebutuhan pelatihan dalam rangka peningkatan daya saing.

Selain itu juga dibutuhkan penguatan dalam hal instruktur tenaga pelatih bagi tenaga kerja, peran instruktur sesuai kompetensi yang dimiliki akan sangat mempengaruhi keberhasilan program-program pelatihan di Provinsi Jambi. Dimana pada tahun 2019 jumlah instruktur yang ada di Provinsi Jambi sebanyak 20 orang terdiri dari 14 orang instruktur laki-laki dan 6 orang instruktur perempuan.



BAB III

PERKIRAAN DAN PERENCANAAN PERSEDIAAN TENAGA KERJA

Dalam perencanaan tenaga kerja, perkiraan persediaan tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting. Perkiraan persediaan tenaga kerja meliputi perkiraan penduduk usia kerja, perkiraan tingkat partisipasi angkatan kerja, dan perkiraan angkatan kerja. Informasi lain yang dibutuhkan dalam perkiraan persediaan tenaga kerja adalah pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian, migrasi masuk, migrasi keluar dan lainnya.

3.1. PERKIRAAN PENDUDUK USIA KERJA

Perkembangan penduduk usia kerja (PUK) sangat tergantung oleh naik turunnya jumlah penduduk. Bertambah kurangnya jumlah penduduk sendiri dipengaruhi oleh membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mencakup pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan produksi pangan, pelayanan medis, dan lainnya.

Secara nasional paling tidak ada 5 (lima) masalah pokok kependudukan yang dihadapi di Indonesia, yaitu jumlah penduduk (*number of Population*) yang besar, laju pertumbuhan penduduk (*population growth rate*) yang tinggi, pola persebaran dan kepadatan penduduk (*population distribution and density*) tidak merata, struktur umur penduduk (*population age structure*) muda dan kualitas penduduk (*quality of people*) yang belum tinggi.

Pemerintah telah menerapkan pengendalian jumlah penduduk melalui pembatasan kelahiran atau keluarga berencana yang diharapkan dapat memperlambat



bertambahnya jumlah penduduk. Sejalan dengan penambahan penduduk yang cukup besar, diperkirakan penduduk usia kerja pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 jumlah pada tahun 2019 yang tercatat 2.671.931 orang menjadi sekitar 2.717.213 orang pada tahun 2020 dan bertambah menjadi 2.771.677 orang pada tahun 2021, dan 2.825.703 orang pada tahun 2022, dan 2.877.891 orang pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 diperkirakan penduduk usia kerja di Provinsi Jambi akan bertambah menjadi 2.927.680 atau bertambah sebanyak 255.749 orang (9,57 persen) dari tahun 2019. Untuk lebih jelasnya tentang estimasi penduduk usia kerja untuk tahun 2020-2024, berikut bahasan mengenai penduduk usia kerja menurut beberapa karakteristik

3.1.1. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur

Di Provinsi Jambi pada periode tahun 2020–2024 mendatang, perkiraan penduduk usia kerja menurut golongan umur pertambahan terbesar diperkirakan pada golongan umur 35-39 tahun` yakni sebanyak 255.749 orang hingga tahun 2024 atau 9,57 persen, dengan rata-rata pertambahan per tahunnya berkisar antara 49.333 orang atau 19,9 persen, Perkiraan ini antara lain disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang diprediksi semakin baik 5 (lima) tahun ke depan, dan juga dipengaruhi faktor migrasi yang semakin tinggi.

Kemudian bila dilihat dari data yang ada, diperkirakan penduduk usia kerja menurut golongan umur mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 jumlah penduduk usia kerja sebanyak 2.717.213 orang dan diperkirakan terus bertambah menjadi 2.927.680 pada tahun 2024 orang, rata – rata pertambahan per tahun 51.150 orang, ini disebabkan oleh penambahan penduduk dan



pertumbuhan ekonomi lima tahun kedepan semakin membaik. Secara lebih lengkap diperlihatkan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (dalam ribu)

Golongan Umur	2020	2021	2022	2023	2024
15 - 19	312.229	309.009	305.822	302.668	299.547
20 - 24	312.186	319.601	327.191	334.963	342.918
25 - 29	316.543	324.639	332.942	341.458	350.191
30 - 34	305.927	315.515	322.218	329.063	336.054
35 - 39	307.515	317.075	326.932	337.096	347.576
40 - 44	283.343	287.955	292.641	297.404	302.245
45 - 49	242.298	249.615	257.153	264.919	272.919
50 - 54	197.457	201.986	206.621	211.360	216.209
55 - 59	156.076	159.062	161.879	163.935	164.758
60 +	283.640	287.221	292.303	295.024	295.263
Jumlah	2.717.213	2.771.677	2.825.703	2.877.891	2.927.680

Sumber : Tim PTK Prov. Jambi , 2020

3.1.2. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dalam hal ini dibatasi pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas (Umum), Sekolah Menengah Tingkat Atas (Kejuruan), Diploma, dan Universitas. Proporsi terbesar diperkirakan berada pada usia kerja dengan tingkat pendidikan SMA pada tahun 2020 sebanyak 63.91 persen dan bertambah menjadi 64.94 persen pada tahun 2024, rata – rata penambahan per tahun sebanyak 51.150 orang, adapun upaya untuk mencapai penduduk usia kerja yang handal dimasa yang akan datang perlu adanya peningkatan pendidikan dan pengetahuan yang baik bagi calon pekerja.



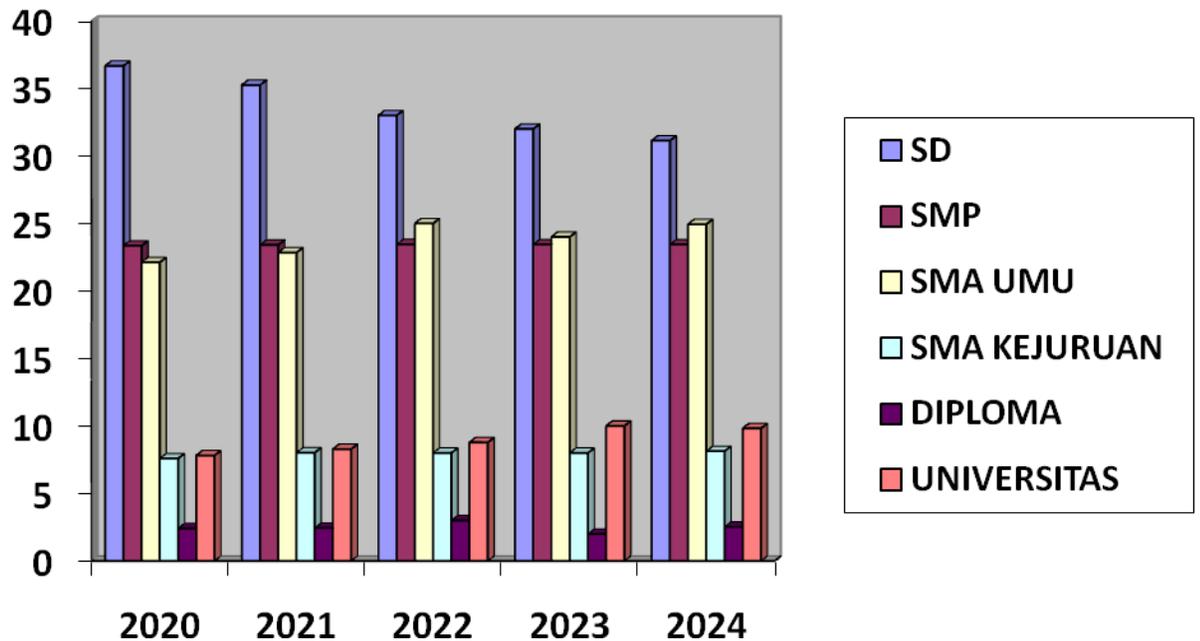
Tabel 3.2
Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Tingkat Pendidikan	2020	2021	2.022	2023	2024
Maksimum SD	996.620	977.387	956.965	935.009	911.516
SLTP	634.696	649.097	662.742	675.259	686.475
SMTA Umum	601.660	633.299	665.516	697.909	730.244
SMTA Kejuruan	206.349	214.464	222.536	230.428	238.067
Diploma	65.511	67.688	69.824	71.876	73.824
Universitas	212.377	229.742	248.121	267.410	287.555
Jumlah	2.717.213	2.771.677	2.825.703	2.877.891	2.927.680

Sumber : Tim PTK Prov. Jambi , 2020 (data diolah)

Dengan perkiraan penambahan yang relatif yang cukup besar pada usia kerja pada tingkat pendidikan SMA, diartikan bahwa Provinsi Jambi akan memiliki banyak calon pekerja yang akan memasuki pasar kerja diberbagai sektor formal, dandan setiap tahunnya akan tercipta calon pekerja dengan usia kerja yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 31.500 orang per tahunnya, dan yang paling sedikit penambahanya penduduk usia kerja tingkat pendidikan Diploma,I,II,III Akademi ini kemungkinan dikarenakan kebanyakan penduduk usia kerja tingkat SMA lasung kerja ada juga sebagian yang melanjut ke perguruan tinggi Berikut gambaran perkiraan perkembangan usia kerja menurut tingkat pendidikan di Provinsi Jambi pada gambar berikut.

Gambar 3.1
Persentase Pertambahan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024



3.1.3. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin

Selama lima tahun kedepan diperkirakan penduduk usia kerja untuk laki-laki secara kuantitas sedikit mengalami penambahan dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2020 penduduk usia kerja laki-laki jumlahnya diperkirakan mencapai sebanyak 1.387.020 orang dan bertambah menjadi 1.492.361 pada tahun 2024, sementara dari tahun 2020 -2024 diperkirakan mengalami kenaikan sebanyak 25.596 orang pertahun. Sedangkan untuk PUK perempuan diperkirakan tahun 2020 jumlahnya mencapai 1.330.193 orang dan bertambah menjadi 1.435.319 orang pada tahun 2024, dari tahun



2020-2024 diperkirakan mengalami peningkatan sebanyak 25.554. Peningkatan PUK laki-laki diperkirakan karena tanggung jawab mereka sebagai kepala rumah tangga sehingga mereka akan berusaha dengan cara apapun untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya kesetaraan gender maka mempengaruhi peran aktif perempuan di dunia pekerjaan, kondisi ini diperkirakan akan meningkatkan jumlah penduduk usia kerja perempuan, dimana angka perkiraan ini cukup fantastis dengan rasio yang hampir berdekatan, yaitu laki – laki 50,04 persen dan perempuan 49,95 persen.

Tabel 3.3
Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Jambi Tahun 2021-2024

Jenis Kelamin	2020	2021	2.022	2023	2024
Laki-laki	1.387.020	1.414.326	1.441.389	1.467.496	1.492.361
Perempuan	1.330.193	1.357.351	1.384.314	1.410.395	1.435.319
Jumlah	2.717.213	2.771.677	2.825.703	2.877.891	2.927.680

Sumber : Tim PTK Prov. Jambi 2020 (data diolah)

3.1.4. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Penduduk usia kerja dilihat menurut kabupaten kota selama lima tahun ke depan, diperkirakan penambahan terbanyak ada di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 20,26 persen dan bertambah menjadi 20.86 persen pada tahun 2024 rata- rata per tahun sebesar 19,5 persen.

Dari gambaran perkiraan jumlah penduduk usia kerja diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Muaro Jambi merupakan penduduk usia kerja terbesar selama 5 tahun ke depan, hal ini dikarenakan makin pesatnya perkembangan perusahaan perusahaan Besar yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi, Berikut perkiraan penduduk usia kerja menurut kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sebagaimana tabel berikut



Tabel 3.4
Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Jambi Tahun 2021-2024

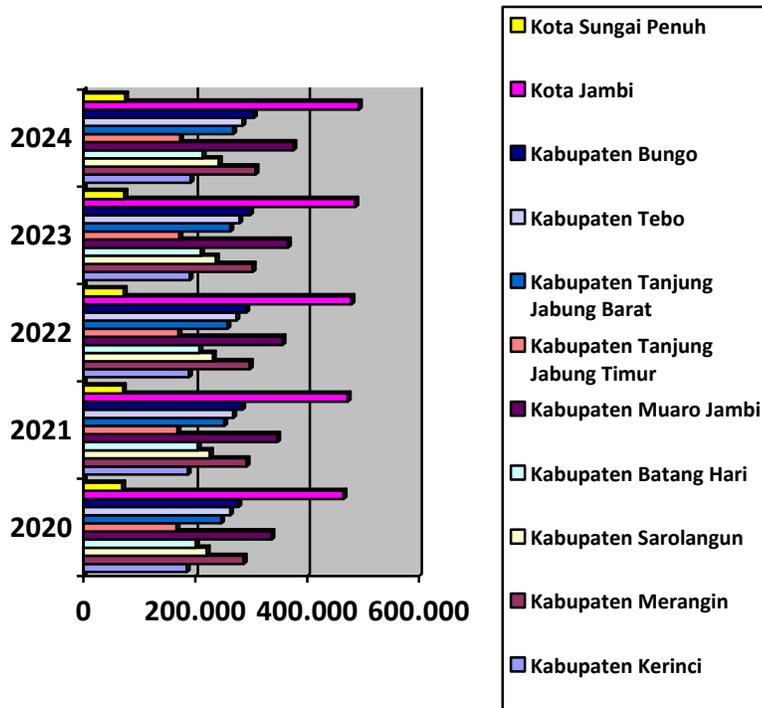
Nama Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kerinci	184.983	186.882	188.693	190.324	191.743
Kabupaten Merangin	286.464	291.939	297.349	302.546	307.471
Kabupaten Sarolangun	220.679	226.209	231.745	237.171	242.437
Kabupaten Batang Hari	201.483	204.605	207.656	210.535	213.203
Kabupaten Muaro Jambi	336.461	346.249	356.118	365.889	375.486
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	166.513	168.377	170.164	171.792	173.232
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	246.604	252.082	257.535	262.834	267.926
Kabupaten Tebo	262.432	268.038	273.608	279.004	284.172
Kabupaten Bungo	276.923	284.021	291.135	298.118	304.909
Kota Jambi	465.154	472.439	479.563	486.291	492.532
Kota Sungai Penuh	69.518	70.836	72.137	73.386	74.569
JUMLAH	2.717.213	2.771.677	2.825.703	2.877.891	2.927.680

Sumber : Tim PTK Prov. Jambi , 2020 (data diolah)

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk usia kerja yang tersebar di 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi hampir setiap tahunnya menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun ada beberapa daerah kabupaten dan kota pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Hal ini dapat tergambar pada grafik berikut.



Gambar 3.2
 Persentase Perkiraan Pertambahan Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten dan Kota
 Provinsi Jambi Tahun 2020-2021





3.2. PERKIRAAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Perkiraan tingkat partisipasi angkatan kerja ditentukan dengan cara membandingkan perkiraan angkatan kerja terhadap perkiraan penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Jambi pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 68,72 persen sedangkan pada tahun 2024 menjadi 69,85 persen. Selama periode 2021-2024 tersebut besarnya TPAK diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 0,75 poin.

3.2.1. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

Secara umum semakin tinggi golongan umur, maka tingkat partisipasi angkatan kerja semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pada Tabel 3.1.1 menunjukkan bahwa TPAK pada kelompok usia muda (15–19 tahun) masih cenderung rendah karena pada usia ini masih banyak yang bersekolah, kemudian pada kelompok usia (20-24 tahun) diperkirakan 5 tahun kedepan merupakan penambahan terbesar sebanyak 1 persen pertahun nya dilanjuti pada kelompok usia (30-34 tahun) sebanyak sebesar 0,90 persen penambahan setiap tahunnya. Selama tahun 2020-2024 diperkirakan hampir pada semua golongan umur mengalami peningkatan penambahan, tapi masih ada yang cenderung masih kecil penambahannya pada golongan umur 55-59 tahun karena pada usia ini etos kerja menurun dan 15-19 tahun.



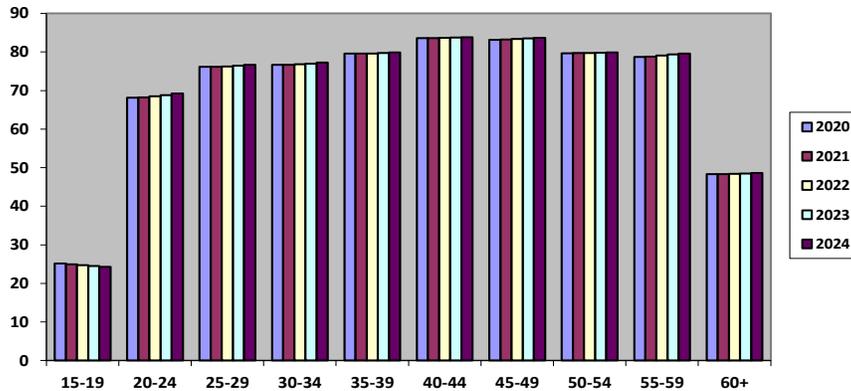
Tabel 3.5
Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur
Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 (dalam persen)

Golongan Umur	2020	2021	2022	2023	2024
15 - 19	25,15	24,91	24,69	24,47	24,25
20 - 24	68,12	68,20	68,50	68,80	69,28
25 - 29	76,15	76,18	76,26	76,44	76,69
30 - 34	76,69	76,71	76,80	76,97	77,23
35 - 39	79,59	79,60	79,62	79,73	79,88
40 - 44	83,58	83,60	83,68	83,76	83,79
45 - 49	83,17	83,24	83,37	83,53	83,71
50 - 54	79,69	79,72	79,76	79,85	79,88
55 - 59	78,73	78,81	79,11	79,36	79,59
60 +	48,34	48,36	48,42	48,50	48,61
TPAK	68,72	68,93	69,18	69,49	69,85

Sumber : Tim PTK Prov. Jambi, 2020 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat kita lihat diperkirakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari tahun 2020 sampai dengan 2024 setiap tahun nya mengalami peningkatan yang signifikan,kecuali tingkat pada tingakat golongan umur 15 – 19 mengalami penurunan tiap tahunnya diperkirakan penyebab utamanya adalah golongan umur ini berstatus masih pelajar, Sementara TPAK golongan umur 25-29 tahun merupakan laju pertumbuhan terkecil . Untuk melihat persentase perkiraan pertumbuhan TPAK golongan umur Provinsi Jambi periode 2020-2024 sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.3
Persentase Perkiraan Laju Pertumbuhan TPAK Menurut Golongan Umur
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024



3.2.2. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Salah satu indikator yang menunjukkan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan. Sejalan dengan diimplementasikannya program wajib belajar 9 tahun serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap tingkat pendidikan yang lebih baik mengakibatkan kualitas angkatan kerja di Provinsi Jambi secara umum menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Program tersebut telah memberikan dampak positif terhadap angkatan kerja di Provinsi Jambi, seperti kualitas angkatan kerja akan semakin bergeser dengan banyaknya angkatan kerja yang berpendidikan SMP di satu sisi, sedangkan di sisi lain semakin menurunnya jumlah angkatan kerja berpendidikan SD. Selain itu juga akan menurunkan jumlah tambahan angkatan kerja baru.



Tabel 3.6.
Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

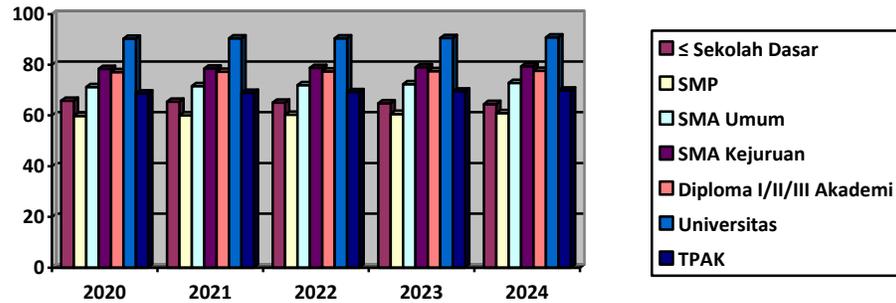
Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
≤ Sekolah Dasar	65,80	65,39	65,09	64,79	64,50
SMP	59,78	60,08	60,34	60,61	60,95
SMA Umum	71,19	71,55	71,93	72,36	72,79
SMA Kejuruan	78,34	78,52	78,69	78,97	79,31
Diploma I/II/III Akademi	77,14	77,24	77,31	77,43	77,56
Universitas	90,23	90,36	90,44	90,57	90,81
TPAK	68,72	68,93	69,18	69,49	69,85

Sumber : Tim PTK Prov. Jambi, 2020 (data diolah)

Pada Tabel 3.6 terlihat bahwa perkembangan TPAK terus mengalami kenaikan dari tahun 2020 - 2024 rata – rata pertambahannya sebanyak 0,75 poin per tahun, perkembangan yang tertinggi pada tingkatan SMP pada tahun 2020 diperkirakan 57,92 poin naik berubah menjadi 60,29 poin pada tahun 2024, Rata – rata penambahan per tahun 0, 99 poin, dilanjutkan oleh tingkat pendidikan SMA Umum tahun 2020 diperkirakan 71,19 poin berubah menjadi 72,79 poin, rata – rata penambahan pertahun sebesar 0.81 poin per tahun. Dengan adanya perkiraan peningkatan TPAK maka diharapkan lapangan pekerjaan di Provinsi Jambi juga semakin banyak dan semakin mudah mendapat pekerjaan bagi calon pekerja.



Gambar 3.4
Perkiraan Pertambahan TPAK Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024



Sumber : Tim PTK Prov. Jambi, 2020 (data diolah)

3.2.3. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Perkiraan TPAK menurut jenis kelamin secara total hingga tahun 2024 tampak mengalami kenaikan, Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki cenderung naik sejak tahun 2020 (87,68 persen) hingga tahun 2024 naik menjadi (89,00 persen). Demikian halnya dengan TPAK perempuan, dalam periode yang sama diperkirakan akan mengalami peningkatan dari 48,95 persen menjadi 69,85 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin tingginya pendidikan kaum perempuan mendorong para perempuan untuk memasuki pasar kerja serta adanya pengakuan terhadap perempuan dalam dunia kerja semakin membaik dan juga dapat diartikan bahwa berbagai jenis pekerjaan yang selama ini didominasi laki-laki sudah dapat dikerjakan oleh tenaga kerja perempuan. Pergeseran TPAK tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.2.3. berikut.



Tabel 3.7.
Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	87,68	87,91	88,21	88,57	89,00
Perempuan	48,95	49,15	49,38	49,64	49,94
TPAK	68,72	68,93	69,18	69,49	69,85

Sumber : Tim PTK Prov. Jambi, 2020 (data diolah)

3.2.4. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Diperkiraan rata – rata pertambahan TPAK Kabupaten dan Kota selama periode 2020-2024 meningkat. Peningkatan tertinggi diperkirakan di Kabupaten Merangin, dari sebesar 72,98 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 75,11 persen tahun 2024, ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada Kota Jambi, dari sebesar 70,34 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 72,08 persen pada tahun 2024 disebabkan makin pesatnya perkembangan perusahaan perusahaan baru. Kemudian pada Kabupaten Tebo, dari sebesar 66,28 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 67,07 persen pada tahun 2024 diperkirakan disebabkan luasnya perkebunan. Kabupaten Batang Hari, Tanjab Timur dan Bungo diperkirakan juga akan meningkat.

Dari 11 Kabupaten Kota selama periode diatas diperkirakan rata-rata terkecil pertambahan per tahunnya berada pada Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2020 sebesar 61,29 persen dan meningkat menjadi 61.88 persen pada tahun 2024.



Tabel 3.8.
Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Nama Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kerinci	68,33	68,52	68,69	68,93	69,26
Kabupaten Merangin	72,98	73,39	73,85	74,50	75,11
Kabupaten Sarolangun	67,57	67,77	67,95	68,19	68,53
Kabupaten Batang Hari	62,21	62,32	62,43	62,57	62,81
Kabupaten Muaro Jambi	61,29	61,41	61,51	61,65	61,88
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	72,71	72,84	73,12	73,33	73,71
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	74,05	74,33	74,79	75,25	75,70
Kabupaten Tebo	72,77	72,94	73,10	73,28	73,57
Kabupaten Bungo	66,28	66,48	66,60	66,79	67,07
Kota Jambi	70,34	70,61	71,08	71,60	72,08
Kota Sungai Penuh	65,84	66,05	66,20	66,41	66,72
TPAK	68,72	68,93	69,18	69,49	69,85

Sumber : Tim PTK Prov. Jambi 2020 (data diolah)

3.3. PERKIRAAN ANGKATAN KERJA

Angkatan Kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja. Pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi sebanyak 1.700.650 orang. Pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja diperkirakan sebanyak 1.867.294 orang dan pada tahun 2024 diperkirakan meningkat lagi, sehingga menjadi 2.045.012 orang, peningkatan ini disebabkan seiring bertambahnya penduduk usia kerja maka akan semakin banyak



orang yang akan masuk ke kelompok angkatan kerja dan juga tuntutan ekonomi yang semakin meningkat .

3.3.1. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

Jumlah angkatan kerja berdasarkan golongan umur sebagian besar mengalami kenaikan tiap tahunnya kecuali pada golongan umur 15-19 tahun. Angkatan kerja pada tahun 2020 paling banyak pada golongan umur 35-39 tahun yakni mencapai sebanyak 244,751 orang meningkat menjadi 277,631 orang tahun 2024. Jumlah paling sedikit pada golongan umur 15-19 tahun yang berjumlah 78.511 orang tahun 2020 dan menurun pada tahun 2024 menjadi 72,634 orang.

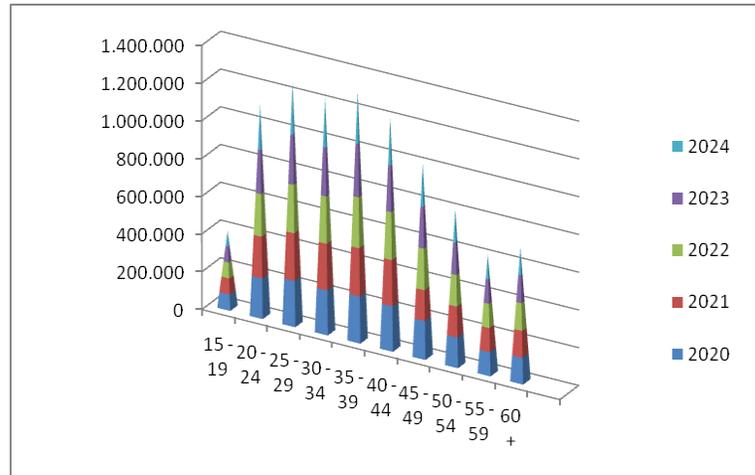
Tabel 3.9
Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Golongan Umur	2020	2021	2022	2023	2024
15 - 19	78.511	76.986	75.502	74.054	72.634
20 - 24	212.666	217.952	224.125	230.453	237.582
25 - 29	241.035	247.306	253.894	261.002	268.549
30 - 34	234.623	242.036	247.465	253.270	259.537
35 - 39	244.751	252.402	260.309	268.755	277.631
40 - 44	236.820	240.721	244.878	249.094	253.251
45 - 49	201.522	207.767	214.389	221.297	228.469
50 - 54	157.363	161.027	164.791	168.767	172.698
55 - 59	122.878	125.349	128.057	130.105	131.129
60 +	137.124	138.910	141.530	143.096	143.532
Jumlah	1.867.293	1.910.456	1.954.940	1.999.893	2.045.012

Sumber : Tim PTK Prov. Jambi 2020 (data diolah)



Gambar 3.5
Perkiraan Pertambahan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur
Provinsi Jambi Tahun 2015-2019



3.3.2. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Angkatan kerja pada tahun 2020-2024 menurut tingkat pendidikan diperkirakan akan mengalami kenaikan kecuali pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Pada tahun 2020 Angkatan kerja yang berpendidikan SD diperkirakan 655.768 orang atau 35,11 persen dan terus menurun hingga tahun 2024 sebanyak 687.883 atau 28,74 persen. Penurunan angkatan kerja yang berpendidikan maksimum SD ini diperkirakan karena meningkatnya kesadaran akan pendidikan yang lebih tinggi. Kenaikan tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan SMA Umum diperkirakan sebanyak 428.306 orang atau 22,93 persen pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2024 sebanyak 531.546 orang atau 25,99 persen, adapun perkiraan penyebab peningkatan penambahan angkatan kerja untuk tingkat menengah adalah penambahan terhadap kelulusan tingkat ini tiap tahunnya makin bertambah, dan begitu juga dengan tingkat perguruan tinggi tiap tahun meluluskan banyak sarjana dan upaya pemerintah untuk mempersiapkan angkatan kerja yang siap kerja adalah menyediakan dan memfasilitasi beberapa tempat pelatihan



kerja atau tempat magang ke perusahaan bahkan magang ke luar negeri secara gratis.

Tabel 3.10
Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
≤ Sekolah Dasar	655.768	639.070	622.878	605.799	587.883
SMP	379.399	389.961	399.876	409.286	418.400
SMA Umum	428.306	453.145	478.686	504.984	531.546
SMA Kejuruan	161.660	168.393	175.113	181.977	188.806
Diploma I/II/III Akademi	50.538	52.284	53.978	55.652	57.257
Universitas	191.623	207.604	224.409	242.196	261.120
Jumlah	1.867.293	1.910.456	1.954.940	1.999.893	2.045.012

Sumber : Tim PTK Prov. Jambi, 2020 (data diolah)

3.3.3. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Dari sisi kuantitas, jumlah angkatan kerja yang berjenis kelamin laki-laki diperkirakan lebih besar dibanding dengan perempuan. Jumlah angkatan kerja laki-laki pada tahun 2020 sebesar 1.216.103 orang atau 65,12 persen dan diperkirakan mengalami pertambahan hingga pada tahun 2024 sebesar 1.328.166 orang atau 64,94 persen, sedangkan diperkirakan jumlah angkatan kerja perempuan pada tahun 2020 sebesar 651.191 orang atau 34,87 persen dan diperkirakan mengalami peningkatan hingga 2024 sebesar 716.846 orang atau 35,05 persen. Tingginya jumlah angkatan kerja laki-laki dapat dimaklumi karena pada umumnya laki-laki merupakan kepala rumah tangga dan mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya sehingga tambahan angkatan kerja laki-laki lebih banyak dan lebih besar. Berikut disajikan perkiraan Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin.



Tabel 3.11

Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (Dalam Ribu)

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	1.216.103	1.243.355	1.271.426	1.299.763	1.328.166
Perempuan	651.191	667.101	683.513	700.130	716.846
Jumlah	1.867.293	1.910.456	1.954.940	1.999.893	2.045.012

Sumber : Tim PTK Prov. Jambi (data diolah)

3.3.4. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Diperkirakan angkatan kerja di Provinsi Jambi selama periode tahun 2020- 2024 Peningkatan tertinggi diperkirakan Kota Jambi sebanyak 327.210 orang atau 17,52 persen dan posisi kedua pada Kabupaten Merangin sebanyak 209.069 orang atau 10,22 persen kemudian posisi ketiga Kabupaten Muaro Jambi sebesar 1.044.330 orang atau 20,88 persen.



Tabel 3.12
Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

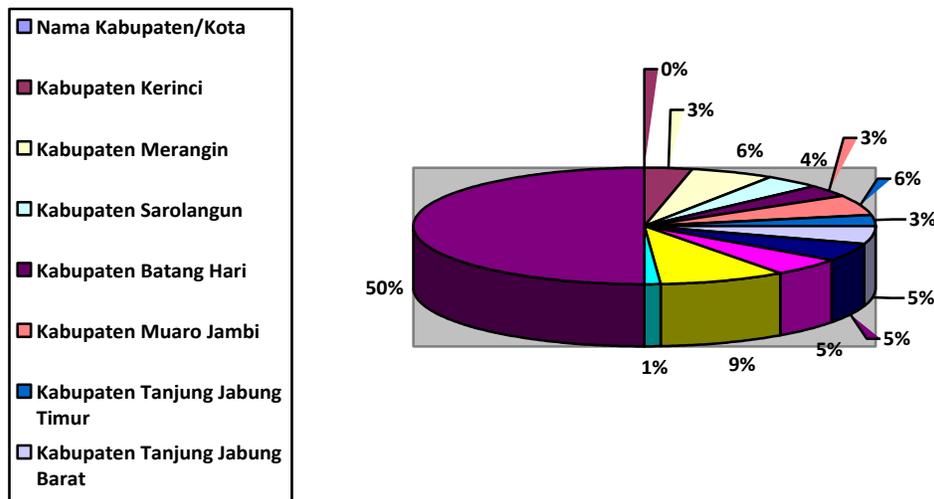
Nama Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kerinci	126.393	128.058	129.616	131.186	132.800
Kabupaten Merangin	209.069	214.245	219.606	225.398	230.931
Kabupaten Sarolangun	149.105	153.302	157.467	161.737	166.154
Kabupaten Batang Hari	125.352	127.501	129.633	131.735	133.909
Kabupaten Muaro Jambi	206.206	212.637	219.042	225.581	232.361
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	121.070	122.648	124.426	125.972	127.688
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	182.601	187.373	192.602	197.770	202.813
Kabupaten Tebo	190.977	195.499	199.997	204.463	209.071
Kabupaten Bungo	183.540	188.814	193.904	199.121	204.517
Kota Jambi	327.210	333.593	340.894	348.195	355.017
Kota Sungai Penuh	45.771	46.786	47.753	48.737	49.750
JUMLAH	1.867.293	1.910.456	1.954.940	1.999.893	2.045.012

Sumber : Tim PTK Prov. Jambi , 2020 (data diolah)



Selama tahun 2020-2024 atau lima tahun kedepan diperkirakan Penambahan angkatan kerja yang relatif sedikit di Kota Sungai Penuh sebanyak 45.771 orang atau 2,45 persen tersebut dimungkinkan karena mereka yang kebanyakan merupakan angkatan kerja muda banyak yang mencari pekerjaan keluar daerah dan luar negeri menjadi TKI. Kemudian ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 121.070 atau 6,48 persen kemungkinan juga bisa disebabkan karena peningkatan ekonomi keluarga mereka, banyak lulusan pendidikan SMA yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Peningkatan jumlah angkatan kerja di Kota Jambi disamping karena banyaknya migrasi dari luar Kabupaten dan daerah tetangga, tetapi justru banyak angkatan kerja dari luar Provinsi Jambi. Banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak kembali ke daerah asalnya dan mencari pekerjaan di Provinsi Jambi. Kecuali itu banyak pula yang masuk ke Provinsi Jambi untuk bekerja apa adanya, dan mereka kebanyakan bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling dan sebagainya.

Gambar 3.6
Perkiraan Persentase Angkatan Kerja Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi Tahun 2020





BAB IV

PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

Kesempatan kerja tahun 2020-2024 diperkirakan akan bertambah banyak. Hal ini karena membaiknya perekonomian pada tahun 2019, dan perekonomian ke depan diperkirakan semakin baik. pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,64 %. Selain peranan iklim investasi yang akan mempengaruhi pertumbuhan masing-masing sektor, maka faktor lainnya adalah perbaikan birokrasi. Untuk memberikan kejelasan, akan diuraikan peranan masing-masing sektor terhadap nilai produk domestik regional bruto.

4.1. PERKIRAAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020-2024

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara/daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian daerah tersebut berkembang dengan baik. Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan sarana utama ke arah tercapainya



pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat menentukan serangkaian sasaran ekonomi secara kuantitatif dalam periode tertentu. Perekonomian Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024 diperkirakan akan terus meningkat. Pada tahun 2020 dan diperkirakan perekonomian Provinsi Jambi akan mengalami pertumbuhan sebesar 0,46 persen dan pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 4,64 persen. Pertumbuhan sebesar itu diharapkan akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang besar sehingga mengurangi jumlah penganggur dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi.

Tabel 4.1
Perkiraan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024
(dalam Milyar)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1. A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	39.362	40.765	42.505	44.429	46.514
2. B Pertambangan dan Penggalian	34.747	35.637	36.822	38.160	39.630
3. C Industri Pengolahan	15.275	15.603	16.061	16.585	17.164
4. D Pengadaan Listrik dan Gas	77	80	84	88	92
5. E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	197	203	211	220	229
6. F Konstruksi	10.932	11.380	11.922	12.516	13.157
7. G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	15.069	15.804	16.670	17.611	18.620
8. H Transportasi dan Pergudangan	4.972	5.193	5.457	5.746	6.056
9. I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.734	1.822	1.926	2.038	2.158
10. J Informasi dan Komunikasi	5.752	6.068	6.435	6.831	7.254
11. K Jasa Keuangan dan Asuransi	3.298	3.391	3.511	3.647	3.796
12. L Real Estat	2.184	2.267	2.369	2.481	2.602
13. M,N Jasa Perusahaan	1.570	1.628	1.700	1.779	1.865



14. O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial W	5.056	5.214	5.416	5.640	5.885
15. P Jasa Pendidikan	4.989	5.201	5.455	5.734	6.034
16. Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.796	1.883	1.987	2.099	2.220
17. R,S,T,U Jasa Lainnya	1.570	1.638	1.720	1.809	1.905
PDRB	148.578	153.778	160.252	167.416	175.184

Sumber : Proyeksi, Data Diolah

Laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor Informasi dan Komunikasi yang diperkirakan pada tahun 2020 mencapai 2,26 persen dan pada tahun 2020 sebesar 6,19 persen. TIK merupakan teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). TIK telah menjadi fasilitas utama bagi berbagai kegiatan sektor kehidupan, dimana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan maupun penelitian. kemudian sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh hingga sebesar 1,97 persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2024 tumbuh menjadi 5,89 persen. Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial lainnya pada tahun 2020 diperkirakan akan tumbuh sebesar 0,98 persen dan pada tahun 2024 tumbuh menjadi 5,74 persen. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya permintaan jasa kesehatan.



Sumbangan sektor pertanian pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 26,49 persen dan pada tahun 2024 naik menjadi 26,55 persen. Untuk penyerapan Tenaga Kerja pada sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan pada tahun 2020 menyerap tenaga kerja sebanyak 780.666 dan pada Tahun 2024 menyerap tenaga kerja sebanyak 769.297 orang. Tingginya sumbangan sektor pertanian pada tahun tersebut disebabkan karena sebagian besar wilayah Provinsi Jambi adalah lahan dengan kultur pertanian dalam bentuk perkebunan.

Tabel 4.2
Perkiraan Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1. A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,45	3,56	4,27	4,53	4,69
2. B Pertambangan dan Penggalian	(3,42)	2,56	3,32	3,64	3,85
3. C Industri Pengolahan	(1,93)	2,15	2,93	3,26	3,50
4. D Pengadaan Listrik dan Gas	(0,34)	3,84	4,53	4,77	4,92
5. E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	(0,76)	3,09	3,82	4,11	4,30
6. F Konstruksi	(1,01)	4,10	4,76	4,98	5,12
7. G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	0,78	4,88	5,48	5,64	5,73
8. H Transportasi dan Pergudangan	2,05	4,45	5,09	5,29	5,40
9. I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,97	5,10	5,69	5,83	5,89
10. J Informasi dan Komunikasi	2,26	5,50	6,05	6,16	6,19
11. K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	2,82	3,57	3,87	4,07
12. L Real Estat	(1,29)	3,81	4,50	4,74	4,89
13. M,N Jasa Perusahaan	0,42	3,73	4,42	4,67	4,82
14. O Administrasi Pemerintahan,					



Pertahanan dan Jaminan Sosial W	(1,12)	3,13	3,86	4,14	4,34
15. P Jasa Pendidikan	0,36	4,24	4,90	5,11	5,24
16. Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,98	4,89	5,50	5,66	5,74
17. R,S,T,U Jasa Lainnya	1,47	4,33	4,98	5,18	5,30
Laju Pertumbuhan Ekonomi	(0,46)	3,50	4,21	4,47	4,64

Sumber : Proyeksi, Data Diolah

Sementara Sumbangan sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 23,39 persen, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 22,62 persen, untuk penyerapan Tenaga Kerja pada sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2020 menyerap tenaga kerja sebanyak 52.907 dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 62.449 orang. sektor yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Jambi. Namun demikian sektor ini masih mempunyai banyak peluang untuk dikembangkan.

Melimpahnya bahan galian yang memiliki nilai ekonomis relatif tinggi dan layak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan selain menambah kesempatan kerja yang ada juga meningkatkan nilai tambah bagi penduduk di Provinsi Jambi. Kebijakan pemerintah daerah dalam hal penggalian diarahkan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan galian dengan pemberdayaan masyarakat lokal agar dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Untuk menghindari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penggalian dapat tercapai apabila didukung oleh strategi pemberdayaan potensi barang bahan galian, peningkatan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, meningkatnya kajian akademik tentang potensi dan pemanfaatan sumber daya galian serta peningkatan nilai investasi di sektor penggalian.

Sementara itu, pembangunan di sektor penggalian dapat pula terhambat karena permasalahan dalam usaha pertambangan apabila tidak dikelola dengan baik dan



kurang memperhatikan kearifan lokal, maka ke depan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan jalan, yang pada gilirannya akan menimbulkan pembangunan biaya tinggi, namun apabila sektor ini dikelola dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai faktor kelestarian.

4.2. PERKIRAAN KESEMPATAN KERJA

Penciptaan kesempatan kerja merupakan salah satu langkah untuk penanggulangan pengangguran. Semakin banyak kesempatan kerja yang tercipta menyebabkan rendahnya atau berkurangnya pengangguran. Penciptaan kesempatan kerja di berbagai sektor atau lapangan usaha sangat diharapkan sehingga memberikan peluang kepada penduduk untuk bekerja. Perkiraan kesempatan kerja di Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024 merupakan perkiraan besarnya peluang kesempatan kerja pada tahun dimaksud. Kesempatan kerja pada tahun 2020–2024 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 yakni dari 1.800.558 orang meningkat menjadi 1.983.726 orang pada tahun 2024. Jadi pertambahan 5 tahun sebanyak 183.168 orang atau 0,092 persen.

4.2.1 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha

Untuk tahun 2020-2024, perkiraan kesempatan kerja menurut lapangan usaha masih didominasi oleh 3 sektor lapangan usaha yaitu sector pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil, dan industri pengolahan. Untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan memiliki kesempatan kerja sebanyak 780.666 orang pada tahun 2020, meningkat cukup tajam sebanyak 11.369 orang menjadi sebanyak 769.297 orang pada tahun 2024. Meningkatnya di sektor ini dikarenakan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan



dengan lahan yang luas sangat banyak. Sementara sector perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil peningkatan sebanyak 37.799 orang dari sebanyak 290.676 orang tahun 2020 menjadi 328.475 orang tahun 2024. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan yang mengikuti trend, seperti memvariasi kendaraan, perawatan kendaraan yang berkala demi menunjang kelancaran aktivitas sehari-hari. Sektor industri pengolahan berada pada urutan ketiga dengan proporsi 6,22 persen dari seluruh kesempatan kerja yang ada atau sebanyak 111.968 orang pada tahun 2020 dan tahun 2024 sebanyak 134.089 orang dengan proporsi sebesar 6,22 persen, atau dengan penambahan selama 5 tahun sebanyak 22.121 orang. Sektor industri meningkat karena semakin berkembangnya industri berskala kecil menengah dengan kemampuan produksi yang semakin banyak sehingga semakin terbuka kesempatan kerjanya. Secara rinci dapat dilihat pada table 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1. A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	780.666	773.833	771.992	770.558	769.297
2. B Pertambangan dan Penggalian	52.907	55.970	59.559	61.444	62.449
3. C Industri Pengolahan	111.968	119.839	121.475	130.470	134.089
4. D Pengadaan Listrik dan Gas	3.180	4.023	5.148	6.515	8.255
5. E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.356	5.433	6.450	7.960	8.689
6. F Konstruksi	92.812	96.253	103.538	106.790	111.417
7. G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	290.676	301.308	311.091	320.116	328.475
8. H Transportasi dan Pergudangan	61.044	66.657	68.318	69.983	72.929
9. I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	96.816	102.172	105.625	108.720	112.618
10. J Informasi dan Komunikasi	7.929	8.152	8.890	9.620	9.809
11. K Jasa Keuangan dan Asuransi	12.766	13.089	14.821	15.515	17.105



12. L Real Estat					
13. M,N Jasa Perusahaan	18.233	21.156	23.576	24.700	28.126
14. O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial W	96.887	99.187	108.844	118.220	128.477
15. P Jasa Pendidikan	91.314	92.142	93.960	95.449	97.660
16. Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30.403	31.510	32.723	35.038	37.484
17. R,S,T,U Jasa Lainnya	48.602	54.339	54.875	56.125	56.847
Jumlah	1.800.558	1.845.063	1.890.886	1.937.221	1.983.726

Sumber : Proyeksi, Data Diolah

4.2.2. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur

Kesempatan kerja tahun 2020-2024 untuk semua golongan umur diperkirakan akan mengalami peningkatan dan juga penurunan. Kesempatan kerja untuk usia produktif (golongan umur 25-54 tahun) memiliki proporsi 71,21 persen pada tahun 2020. Namun secara kuantitatif Peningkatan paling besar terjadi pada golongan umur 35-39 dengan peningkatan selama tahun 2020-2024 sebanyak 32.995 orang atau dengan pertumbuhan setiap tahunnya sebanyak 6.599 orang pertahun. Peningkatan ini disebabkan seiring bertambahnya penduduk usia kerja maka akan semakin banyak orang yang akan masuk ke kelompok angkatan kerja dan juga tuntutan ekonomi yang semakin meningkat Sementara itu untuk golongan umur 30-34 tahun terjadi peningkatan selama tahun 2020-2024 sebanyak 25.209 orang. Tambahan kesempatan kerja yang tergolong kecil pada usia 15-19 dan 20-24 tahun disebabkan karena pada golongan umur tersebut termasuk dalam usia sekolah, serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan perhatian terhadap partisipasi penduduk usia sekolah.



Tabel 4.4
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Golongan Umur	2020	2021	2022	2023	2024
15 - 19	61.269	60.127	59.013	57.900	57.022
20 - 24	186.926	192.599	199.247	206.122	213.548
25 - 29	228.193	234.762	241.519	248.949	256.740
30 - 34	231.640	239.130	244.640	250.481	256.849
35 - 39	243.181	250.883	258.812	267.269	276.176
40 - 44	233.842	237.838	242.093	246.392	250.650
45 - 49	199.878	206.147	212.834	219.764	226.969
50 - 54	156.752	160.424	164.224	168.205	172.144
55 - 59	121.925	124.405	127.121	129.177	130.211
60 +	136.951	138.747	141.384	142.965	143.419
Jumlah	1.800.558	1.845.063	1.890.886	1.937.221	1.983.726

Sumber : Proyeksi, Data Diolah

4.2.3. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas menjadi sebuah kebutuhan. Oleh karena itu kesempatan kerja untuk tingkat pendidikan Maksimum SD diperkirakan mengalami penurunan sebanyak 66.373 orang selama tahun 2020-2024, pada tahun 2020 diperkirakan jumlah kesempatan kerja yang tercipta sebanyak 649.607 orang dan pada tahun 2024 berkurang menjadi 583.234 orang. Penurunan angkatan kerja yang berpendidikan maksimum SD ini diperkirakan karena meningkatnya kesadaran akan pendidikan yang lebih tinggi. Kesempatan kerja untuk jenjang pendidikan SMP juga diperkirakan bertambah sebanyak 40.130 orang. Sedangkan untuk perkiraan kesempatan kerja dengan jenjang pendidikan Universitas diperkirakan akan mengalami kenaikan yakni sebanyak 182.173 orang pada tahun 2020 dan 251.962 orang pada tahun 2024, atau bertambah sebanyak 69.789 orang, hal ini dikarenakan jumlah kesempatan kerja yang tersedia masih sedikit. Sedangkan perkiraan jumlah kesempatan kerja yang dapat



dikatakan relatif masih kecil terdapat pada jenjang pendidikan Diploma, yakni sebanyak 48.992 orang pada tahun 2020 bertambah sebanyak 6.958 orang hingga tahun 2024 menjadi 55.950 orang.

Tabel 4.5
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
≤ Sekolah Dasar	649.607	633.430	617.590	600.827	583.234
SMP	372.625	383.559	393.769	403.500	412.755
SMA Umum	400.759	425.772	451.736	478.510	505.791
SMA Kejuruan	146.402	153.303	160.131	167.102	174.034
Diploma I/II/III Akademi	48.992	50.806	52.592	54.319	55.950
Universitas	182.173	198.194	215.069	232.963	251.962
Jumlah	1.800.558	1.845.063	1.890.886	1.937.221	1.983.726

Sumber : Proyeksi, Data Diolah

4.2.4. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Kesempatan kerja menurut jenis kelamin diperkirakan masih di dominasi oleh laki-laki. Hal ini terlihat dari komposisi jumlah kesempatan kerja untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.177.799 orang (65,41 persen) pada tahun 2020 dan bertambah sebanyak 114.235 orang (naik 9,70 persen) sehingga menjadi 1.292.034 di tahun 2024. Kesempatan kerja untuk jenis kelamin perempuan diperkirakan juga mengalami kenaikan sebanyak 68.934 orang (11,07 persen) dari tahun 2020 yang sebanyak 622.758 orang menjadi sebanyak 691.692 orang pada tahun 2024. Perkiraan kesempatan kerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan dikarenakan laki-laki sebagai tulang punggung keluarga sehingga harus mencari nafkah dan menjadi titah



yang tidak terelakan dari posisinya sebagai kepala rumah tangga untuk penghidupan yang layak.

Tabel 4.6
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	1.177.799	1.205.677	1.234.312	1.263.216	1.292.034
Perempuan	622.758	639.386	656.574	674.005	691.692
Jumlah	1.800.558	1.845.063	1.890.886	1.937.221	1.983.726

Sumber : Proyeksi, Data Diolah

4.2.5. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan

Status pekerjaan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu informal dan formal. Kategori informal memiliki presentase yang cukup besar dibandingkan dengan kategori formal. Hal ini terlihat pada tabel 4.8 di bawah, yang termasuk dalam kategori informal sebesar 55,67 persen pada tahun 2020 diperkirakan akan menurun menjadi 54,40 persen pada tahun 2024. Yang termasuk kedalam kategori informal adalah berusaha sendiri tanpa bantuan, berusaha dengan dibantu, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian serta pekerja tidak dibayar. Sedangkan kesempatan kerja formal tahun 2020 sebesar 44,33 persen naik menjadi 45,60 persen. Yang termasuk kedalam kategori formal adalah berusaha dengan buruh sebesar 4,11 persen dari seluruh kesempatan kerja yang ada pada tahun 2020 menurun menjadi 4,00 persen pada tahun 2024 dan pekerja/buruh/karyawan proporsinya meningkat dari 40,23 persen menjadi 41,61 persen. Dilihat dari jumlahnya, pekerja formal diperkirakan memiliki tambahan sebanyak 106.338 orang atau 11,75 persen dari total tambahan selama tahun 2020-2024.



Pada kategori informal terjadi kenaikan yang cukup signifikan baik jumlah maupun proporsinya. Kenaikan yang cukup besar ini terutama pada pekerja dengan status berusaha sendiri bertambah 43.094 orang, sedangkan untuk status berusaha dibantu meningkat 7.910 orang. Untuk status pekerja bebas di non pertanian meningkat sebanyak 1.718 orang, pekerja bebas di pertanian bertambah sebanyak 38.960 orang dan pekerja tak dibayar mengalami penurunan sebanyak 14.852 orang. Dilihat dari proporsinya juga mengalami peningkatan selama 5 tahun ke depan. Karena keterbatasan sektor formal, mereka memilih untuk berwirausaha sendiri untuk mengembangkan industri kreatif yang diperkirakan memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Status Pekerjaan	2020	2021	2022	2023	2024
1. Berusaha Sendiri	420.096	430.192	440.886	451.989	463.190
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar	212.150	214.407	215.617	217.597	220.060
3. Berusaha dibantu buruh tetap/Buruh dibayar	73.917	75.102	76.367	77.678	79.172
4. Buruh/karyawan	724.331	749.045	775.228	800.115	825.414
5. Pekerja Bebas di Pertanian	116.923	126.728	136.196	146.132	155.883
6. Pekerja Bebas di Non Pertanian	42.931	43.220	43.680	44.151	44.649
7. Pekerja keluarga / tak dibayar	210.209	206.369	202.912	199.561	195.357
Jumlah	1.800.558	1.845.063	1.890.886	1.937.221	1.983.726

Sumber : Proyeksi, Data Diolah



4.2.6. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama

Perkembangan perekonomian global yang terus mengalami perubahan, berimbas juga terhadap perekonomian Indonesia sebagai salah satu Negara yang berkembang. Perkiraan kesempatan kerja menurut jenis pekerjaan utama yang ada saat ini dapat berubah dimasa depan dikarenakan imbas dari perubahan yang terjadi.

Pada Table 4.8 berikut ini dapat dilihat bahwa kesempatan kerja di Provinsi Jambi menurut pekerjaan utama/jabatan pada tahun 2020-2024 diperkirakan akan didominasi tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, pekerja kasar dan lainnya, dimana pada tahun 2020 jumlahnya sebanyak 615.281 orang dengan proporsi sebesar 34,17 persen, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 yang bertambah sebanyak 65.699 orang sehingga menjadi 680.980 orang atau dengan proporsi sebesar 34,33 persen. Untuk kesempatan kerja tenaga usaha jasa diperkirakan pertumbuhannya bertambah selama rentang waktu 5 tahun, yakni bertambah sebanyak 49.556 orang hingga tahun 2024. Seiring dengan perkembangan dunia usaha di Provinsi Jambi, diperkirakan pada tahun 2020 akan terjadi penambahan tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan sebanyak 38.329 orang atau 8,42 persen.

Tabel 4.8
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Pekerjaan
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Jenis Pekerjaan Utama	2020	2021	2022	2023	2024
0/1. Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis	45.517	46.421	46.994	47.475	47.766
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	128.864	137.985	147.427	157.298	167.193
3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	37.672	38.545	38.944	39.348	39.594
4. Tenaga Usaha Penjualan	66.899	68.393	70.119	72.033	74.148
5. Tenaga Usaha Jasa	377.395	388.658	401.477	413.844	426.951
6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	528.929	534.848	539.636	544.465	547.094



7/8/9/X/00. Tenaga Produksi, Operator alat-alat Angkutan, Pekerja Kasar & lainnya	615.281	630.214	646.289	662.758	680.980
Jumlah	1.800.558	1.845.063	1.890.886	1.937.221	1.983.726

Sumber : Proyeksi, Data Diolah

4.2.7. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja

Jam kerja menunjukkan pemakaian waktu yang digunakan oleh tenaga kerja selama mereka bekerja. Jam kerja dibagi 2 kategori yaitu bekerja penuh (penduduk yang bekerja lebih dari 35 jam seminggu) dan setengah penganggur (penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu).

Kesempatan kerja pada jam kerja 0 s/d 34 jam dalam seminggu diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya dari sebesar 37,75 persen pada tahun 2020 dan menurun menjadi 37,04 persen pada tahun 2024. Kesempatan kerja pada jam kerja 35 jam ke atas diperkirakan akan meningkat cukup banyak sebesar 1.148.689 orang atau dengan proporsi sebesar 63,79 persen pada tahun 2020 menjadi 1.277.646 orang atau menjadi sebesar 64,40 persen di tahun 2024.

Tabel 4.9
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Jam Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
0	27.861	28.375	28.485	28.570	28.755
1-9	52.113	56.110	60.167	64.464	68.306
10-14	68.912	71.486	73.855	76.239	78.969
15-24	247.281	249.333	249.867	251.225	252.672
25-34	283.563	289.801	294.976	299.989	306.133
35-44	476.346	493.896	512.415	530.106	547.007
45-59	460.436	469.335	480.810	493.644	506.488
≥ 60	184.045	186.726	190.310	192.985	195.396
Jumlah	1.800.558	1.845.063	1.890.886	1.937.221	1.983.726

Sumber : Proyeksi, Data Diolah



4.2.8. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 4.10 di bawah, sampai dengan tahun 2020 kesempatan kerja Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi proporsi rata-rata sebesar 9,23 persen pada tahun 2024. Jumlah kesempatan kerja terbanyak berada di Kota Jambi dan Kabupaten Merangin. Kesempatan kerja di Kota Jambi pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 307.418 orang (17,07 persen) bertambah sebanyak 28.395 orang sehingga menjadi 335.813 orang pada tahun 2024, ini merupakan tambahan terbesar dari 10 Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi. Sedangkan kesempatan kerja di Kabupaten Merangin pada tahun 2020 diperkirakan sebanyak 202.101 orang (11,06 persen) bertambah sebanyak 22.348 orang sehingga menjadi 224.449 orang di Tahun 2024 mendatang. Meningkatnya kesempatan kerja di Kabupaten Merangin dan Kota Jambi disebabkan meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan baru. Sementara itu proporsi dengan rata-rata 10 persen diperkirakan akan terjadi Di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjab Barat dan Tebo, dengan pertambahan antara 18.000 – 27.000 orang selama 5 tahun ke depan. Hal ini dikarenakan luasnya lahan perkebunan di Kabupaten tersebut. Sedangkan Kabupaten yang memiliki proporsi 6-7 persen dari total kesempatan kerja di Provinsi Jambi selama tahun 2017 berada di Kabupaten Kerinci, Batang Hari, dan Tanjab Timur, dengan rata-rata pertambahan selama 5 tahun dibawah 10.000 orang. Sementara itu untuk proporsi terendah berada di Kota Sungai Penuh yang diperkirakan hanya menyumbang sebanyak 4.517 orang selama tahun 2020-2024 atau 2,46 persen dari total proporsi Provinsi Jambi. Karena sempitnya lahan perkebunan ataupun pertanian.



Tabel 4.10
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Nama Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kerinci	124.024	125.881	127.614	129.364	131.138
Kabupaten Merangin	202.101	207.401	212.877	218.784	224.449
Kabupaten Sarolangun	143.820	148.118	152.410	156.817	161.362
Kabupaten Batang Hari	120.611	122.910	125.151	127.364	129.634
Kabupaten Muaro Jambi	196.759	203.282	209.798	216.496	223.411
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	118.942	120.598	122.454	124.096	125.898
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	178.575	183.429	188.778	194.046	199.210
Kabupaten Tebo	186.446	191.115	195.723	200.307	205.018
Kabupaten Bungo	177.514	182.898	188.113	193.429	198.927
Kota Jambi	307.418	313.944	321.388	328.818	335.813
Kota Sungai Penuh	44.349	45.488	46.579	47.700	48.866
JUMLAH	1.800.558	1.845.063	1.890.886	1.937.221	1.983.726

Sumber : Proyeksi, Data Diolah

4.2.9. PERKIRAAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Besarnya produktivitas tenaga kerja merupakan gambaran besarnya aktifitas tenaga kerja yang dapat dihasilkan, tinggi rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja yang dicapai setiap sektor lapangan usaha tergantung pada nilai pendapatan dan banyaknya jumlah pekerja yang bekerja di sektor tersebut. Secara umum pada tahun 2020 produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jambi diperkirakan akan mencapai Rp.82.520.000/tenaga kerja. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai Rp. 88.310.000/tenaga kerja.



Tabel 4.11
Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	(juta Rp/TK)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	50,42	52,68	55,06	57,66	60,46
2. B Pertambangan dan Penggalian	656,76	636,72	618,23	621,06	634,61
3. C Industri Pengolahan	136,42	130,20	132,21	127,11	128,01
4. D Pengadaan Listrik dan Gas	24,31	19,96	16,30	13,50	11,17
5. E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	45,28	37,42	32,73	27,61	26,38
6. F Konstruksi	117,79	118,23	115,15	117,21	118,09
7. G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	51,84	52,45	53,59	55,02	56,69
8. H Transportasi dan Pergudangan	81,44	77,90	79,88	82,10	83,04
9. I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,91	17,84	18,23	18,75	19,17
10. J Informasi dan Komunikasi	725,41	744,33	723,83	710,10	739,57
11. K Jasa Keuangan dan Asuransi	258,31	259,04	236,93	235,09	221,91
12. L Real Estat					
13. M,N Jasa Perusahaan	86,08	76,95	72,11	72,04	66,32
14. O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial W	52,18	52,57	49,76	47,71	45,80
15. P Jasa Pendidikan	54,64	56,44	58,06	60,08	61,79
16. Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59,06	59,77	60,72	59,92	59,22
17. R,S,T,U Jasa Lainnya	32,31	30,15	31,34	32,23	33,51
Rata-rata Produktivitas Tenaga Kerja	82,52	83,35	84,75	86,42	88,31

Sumber : Proyeksi, Data Diolah



Bila dilihat menurut sektor/lapangan usaha maka pada tahun 2020 produktivitas tertinggi terdapat di sektor Informasi dan Komunikasi Rp.725,410.000/tenaga kerja, kemudian sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp.656.760.000/tenaga kerja selanjutnya diikuti sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp.258.310.000/tenaga kerja dan sektor industri pengolahan sebesar Rp.136.420.000/tenaga kerja, sementara sektor konstruksi berada di Rp.117.790.000/tenaga kerja.

Untuk tahun 2024 diperkirakan produktivitas tertinggi masih berada di sektor Informasi dan Komunikasi yakni mencapai Rp.739.570.000/tenaga kerja, yang disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian. Perkiraan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jambi disajikan dalam Tabel 4.11 di atas.



BAB V

PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KESEIMBANGAN ANTARA PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

5.1 PERKIRAAN PENGANGGUR TERBUKA

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah pengangguran merupakan masalah yang berdampak buruk pada aktivitas perekonomian masyarakat, baik pada kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Oleh sebab itu, usaha-usaha untuk mengatasi pengangguran harus dilakukan secara terus-menerus. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Karena meningkatnya aktifitas perekonomian maka, penganggur terbuka di Provinsi Jambi dalam lima tahun ke depan diperkirakan akan mengalami penurunan. Pada tahun 2020 diperkirakan jumlahnya sebanyak 66.736 orang dengan TPT sebesar 3,57 persen dan terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2024 menjadi sebanyak 61.286 orang dengan TPT sebesar 3,00 persen. Berikut akan dipaparkan penganggur terbuka dengan berbagai karakteristiknya.

5.1.1. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur

Jika ditinjau dari golongan umur diperkirakan jumlah pengangguran yang terbesar didominasi oleh golongan usia muda 15-19 tahun dan 20-24 tahun. Kondisi ini diperkirakan kurangnya lapangan kerja untuk usia muda dan khusus golongan usia 15-19 tahun tergolong dalam pekerja anak. Demikian juga untuk TPT yang tertinggi adalah



pada usia sekolah yaitu golongan umur 15-19 tahun yang diperkirakan TPTnya mencapai 21,96 persen pada tahun 2020 dan diperkirakan pada tahun 2024 akan mengalami penurunan menjadi 21,49 persen. TPT yang tergolong tinggi berikutnya adalah pada golongan umur 20-24 tahun yaitu sebesar 12,10 persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2024 diperkirakan juga mengalami penambahan menjadi 10,12 persen. Hal ini menunjukkan golongan umur tersebut sudah mulai dibutuhkan di dalam dunia kerja.

Tabel 5.1
Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (ribu)

Golongan Umur	2020	2021	2022	2023	2024
15 - 19	17.242	16.859	16.489	16.155	15.613
20 - 24	25.741	25.354	24.878	24.331	24.034
25 - 29	12.842	12.544	12.375	12.053	11.809
30 - 34	2.983	2.906	2.824	2.789	2.688
35 - 39	1.570	1.519	1.497	1.487	1.455
40 - 44	2.978	2.883	2.785	2.702	2.601
45 - 49	1.644	1.620	1.555	1.534	1.500
50 - 54	611	603	568	563	554
55 - 59	952	944	936	928	918
60 +	173	162	146	131	113
Jumlah	66.736	65.393	64.054	62.672	61.286

Sumber : Proyeksi, Data Diolah

Tingginya angka penganggur usia sekolah ini mengindikasikan bahwa upaya dalam menahan agar penduduk yang masih berusia sekolah ini masih harus ditingkatkan dan bukan menitikberatkan pada penambahan kesempatan kerja bagi mereka. Hal ini karena dalam upaya pengurangan penganggur ini selain menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya di sisi lain harus juga ditekankan pada peningkatan kualitas tenaga kerja secara fisik maupun psikis termasuk tingkat kematangan dalam bekerja. Ini sejalan dengan upaya pengurangan pekerja anak (di bawah 18 tahun) yang terus harus



ditingkatkan.

Tabel 5.2
Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (persen)

Golongan Umur	2020	2021	2022	2023	2024
15 - 19	21,96	21,90	21,84	21,81	21,49
20 - 24	12,10	11,63	11,10	10,56	10,12
25 - 29	5,33	5,07	4,87	4,62	4,40
30 - 34	1,27	1,20	1,14	1,10	1,04
35 - 39	0,64	0,60	0,58	0,55	0,52
40 - 44	1,26	1,20	1,14	1,08	1,03
45 - 49	0,82	0,78	0,73	0,69	0,66
50 - 54	0,39	0,37	0,34	0,33	0,32
55 - 59	0,78	0,75	0,73	0,71	0,70
60 +	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08
TPT	3,57	3,42	3,28	3,13	3,00

Sumber : Proyeksi, Data Diolah

5.1.2. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan

Penganggur terbuka menurut tingkat pendidikan diperkirakan selama lima tahun ke depan akan mengalami penurunan begitu juga dengan TPTnya akan terjadi penurunan pada setiap tingkat pendidikan. Penurunan terbesar terdapat pada tingkat pendidikan SLTA Umum yakni sebanyak 1.791 orang dengan penurunan TPT sebesar 1,59 persen. Selanjutnya disusul oleh tingkat pendidikan Maksimum SD dan SMP dengan nilai penurunan masing-masing sebanyak 1.512 orang dan 1.129 orang.



Tabel 5.3
Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
≤ Sekolah Dasar	6.161	5.641	5.288	4.972	4.649
SMP	6.774	6.402	6.107	5.786	5.645
SMA Umum	27.547	27.373	26.950	26.474	25.756
SMA Kejuruan	15.258	15.090	14.982	14.875	14.772
Diploma I/II/III Akademi	1.546	1.477	1.386	1.333	1.307
Universitas	9.450	9.411	9.340	9.233	9.159
Jumlah	66.736	65.393	64.054	62.672	61.286

Sumber : Proyeksi, Data Diolah

Apabila dilihat dari TPTnya, tingkat pendidikan yang mempunyai TPT terbesar terdapat pada SMA Kejuruan yakni sebesar 9,44 persen pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 7,82 persen pada tahun 2024. Masih tingginya jumlah penganggur maupun TPT tingkat pendidikan SMA Kejuruan perlu mendapat banyak perhatian yang serius dari pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dengan mengoptimalkan BLK milik pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian lulusan SMA Kejuruan ini agar dapat bersaing di pasar kerja. Semakin menurunnya penganggur terbuka lulusan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa lulusan pendidikan tinggi memang sangat diminati oleh pemberi kerja dikarenakan kualitas dan kompetensinya memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Tabel 5.4
Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
≤ Sekolah Dasar	0,94	0,88	0,85	0,82	0,79
SMP	1,79	1,64	1,53	1,41	1,35
SMA Umum	6,43	6,04	5,63	5,24	4,85
SMA Kejuruan	9,44	8,96	8,56	8,17	7,82



Diploma I/II/III Akademi Universitas	3,06 4,93	2,83 4,53	2,57 4,16	2,40 3,81	2,28 3,51
TPT	3,57	3,42	3,28	3,13	3,00

Sumber : Proyeksi, Data Diolah

5.1.3. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin

Penganggur terbuka menurut jenis kelamin di Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024 diperkirakan akan tetap di dominasi oleh penganggur terbuka laki-laki meskipun apabila dilihat berdasarkan tingkat partisipasi penganggurnya jenis kelamin perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2020 diperkirakan penganggur terbuka laki-laki sebanyak 38.303 orang dengan TPT sebesar 3,15 persen dan diperkirakan baik jumlah maupun TPTnya akan mengalami penurunan sehingga pada tahun 2024 menjadi sebanyak 36.133 orang dengan TPT sebesar 2,72 persen. Sedangkan penganggur perempuan pada tahun 2020 diperkirakan sebanyak 28.432 orang dengan TPT sebesar 4,37 persen dan tahun 2024 diperkirakan turun menjadi sebanyak 25.154 orang dengan TPT sebesar 3,51 persen.

Tabel 5.5
Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	38.303	37.678	37.115	36.547	36.133
Perempuan	28.432	27.715	26.939	26.125	25.154
Jumlah	66.736	65.393	64.054	62.672	61.286

Sumber : Proyeksi, Data Diolah

Berdasarkan data tersebut, meskipun diperkirakan akan mengalami penurunan penganggur laki-laki dan perempuan, pemerintah daerah harus bisa bekerja sama agar jumlah penganggur laki-laki dan perempuan di Jambi dapat terus menurun. Peran serta



perempuan dalam dunia kerja harus terus ditingkatkan dengan menciptakan lapangan kerja, pengembangan potensi tenaga kerja yang ada, khususnya tenaga kerja perempuan sehingga upaya optimalisasi penyerapan tenaga kerja perempuan dapat tercapai. Peningkatan kualitas tenaga kerja perempuan sangat diperlukan dalam rangka peningkatan daya saing tenaga kerja perempuan dalam memperoleh peluang kerja. Dengan semakin tingginya kesempatan kerja untuk tenaga kerja perempuan diharapkan dapat mengurangi tingginya angka pengangguran. Begitu juga dengan kesempatan kerja laki-laki karena laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab selain terhadap dirinya tapi sekaligus terhadap keluarganya.

Tabel 5.6
Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	3,15	3,03	2,92	2,81	2,72
Perempuan	4,37	4,15	3,94	3,73	3,51
TPT	3,57	3,42	3,28	3,13	3,00

Sumber : Proyeksi, Data Diolah

5.1.4. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota

Penganggur terbuka (PT) pada tahun 2020-2024 di Provinsi Jambi yang paling banyak adalah di Kota Jambi yakni sebanyak 19.792 orang pada tahun 2020 dan menurun menjadi 19.203 orang pada tahun 2024. Berikutnya adalah Kabupaten Muaro Jambi yakni sebanyak 9.447 orang dan menurun menjadi 8.950 orang pada tahun 2024. Jumlah penganggur yang cukup besar berikutnya adalah di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo. Sementara itu, dari segi Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) yang tertinggi berada di Kota Jambi, yaitu sebesar 6,05 persen pada tahun 2020 dan turun menjadi 5,41 persen pada tahun 2024. Berikutnya adalah di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari. Sementara untuk kabupaten/kota dengan TPT terendah



adalah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Kerinci.

Tabel 5.7
Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Nama Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kerinci	2.369	2.177	2.003	1.822	1.663
Kabupaten Merangin	6.968	6.844	6.729	6.615	6.482
Kabupaten Sarolangun	5.285	5.185	5.057	4.920	4.792
Kabupaten Batang Hari	4.741	4.591	4.482	4.371	4.275
Kabupaten Muaro Jambi	9.447	9.356	9.243	9.085	8.950
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.127	2.050	1.971	1.875	1.790
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	4.026	3.944	3.824	3.724	3.603
Kabupaten Tebo	4.532	4.384	4.273	4.156	4.053
Kabupaten Bungo	6.026	5.916	5.792	5.692	5.591
Kota Jambi	19.792	19.650	19.505	19.376	19.203
Kota Sungai Penuh	1.423	1.298	1.174	1.036	884
JUMLAH	66.736	65.393	64.054	62.672	61.286

Sumber : Proyeksi, Data Diolah

Tabel 5.8
Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Nama Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kerinci	1,87	1,70	1,54	1,39	1,25
Kabupaten Merangin	3,33	3,19	3,06	2,93	2,81
Kabupaten Sarolangun	3,54	3,38	3,21	3,04	2,88
Kabupaten Batang Hari	3,78	3,60	3,46	3,32	3,19
Kabupaten Muaro Jambi	4,58	4,40	4,22	4,03	3,85
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1,76	1,67	1,58	1,49	1,40
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2,20	2,10	1,99	1,88	1,78
Kabupaten Tebo	2,37	2,24	2,14	2,03	1,94
Kabupaten Bungo	3,28	3,13	2,99	2,86	2,73
Kota Jambi	6,05	5,89	5,72	5,56	5,41
Kota Sungai Penuh	3,11	2,77	2,46	2,13	1,78
JUMLAH	3,57	3,42	3,28	3,13	3,00

Sumber : Proyeksi, Data Diolah



BAB VI

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM KETENAGAKERJAAN

Aspek Ketenagakerjaan mempunyai sifat multi dimensional antara berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, politik dan sebagainya. Seluruh faktor tersebut berinteraksi dalam suatu rangkaian hubungan yang kompleks sehingga pembinaannya pun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi. Sektor ketenagakerjaan merupakan urat nadi perekonomian suatu daerah, bahkan sektor ketenagakerjaan memiliki peranan yang sangat penting dan berkontribusi positif dalam pembentukan PDRB, karena ketenagakerjaan memiliki aspek yang mempunyai kaitan erat dalam rangka keterlibatannya pada proses produksi barang atau jasa. Dengan demikian Sebagai bagian akhir dari Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Jambi Tahun 2020-2024, maka berikut disajikan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan. Pada hakekatnya bagian ini merupakan inti dari rencana tenaga kerja secara keseluruhan, karena memuat berbagai hal sebagai rumusan solusi terhadap masalah ketenagakerjaan yang dihadapi. Solusi yang diajukan tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut dirumuskan secara komprehensif sehingga diharapkan mampu menyentuh semua masalah ketenagakerjaan. Namun sesuai dengan masalah ketenagakerjaan yang ditempatkan sebagai prioritas dalam pemecahan masalah, maka penciptaan kesempatan kerja dalam rangka menanggulangi pengangguran mendapat porsi yang lebih dominan.

Masalah pokok ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini antara lain adalah (1) rendahnya pendayagunaan angkatan kerja yang tersedia yang mengakibatkan banyaknya pengangguran terbuka. (2) rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai



oleh tingkat pendidikan formal di Provinsi Jambi yang masih didominasi oleh tamatan sekolah dasar, termasuk di dalamnya mereka yang belum tamat dan yang tidak pernah sekolah dan (3) rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja serta (4) ketidakseimbangan antara pasar kerja pada sektor formal dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia.

Solusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan sangat membutuhkan upaya yang terpadu, terkoordinasi dan terencana dari banyak pihak yang terkait. Selain itu prasyarat utama lainnya yang harus dimiliki adalah adanya komitmen untuk pengarusutamaan ketenagakerjaan dalam setiap aspek pembangunan, yang benar-benar kuat dari semua pihak, mulai dari tingkat kebijakan hingga tingkat paling penting untuk menjamin bahwa kebijakan ketenagakerjaan, dan pembangunan yang telah dirumuskan dapat terwujud menjadi rangkaian kegiatan yang efektif. Bahwa sesungguhnya otoritas penciptaan kesempatan kerja yang ada pada Disnakertrans adalah mekanisme informasi pasar kerja, pelatihan, pembinaan hubungan industrial, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan produktivitas, sedangkan penciptaan kesempatan kerja yang terkait dengan perekonomian dan kebijakan lainnya secara praktis berada pada fungsi instansi lain, bukan pada instansi ketenagakerjaan.

Mengingat cakupan bidang ketenagakerjaan tersebut sangat luas dan rumit, maka peran aktif seluruh pihak menjadi salah satu kunci utama kesuksesan pembangunan ketenagakerjaan. Adapun kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang diperkirakan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut :

6.1 Rekomendasi Kebijakan Umum

Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan ketenagakerjaan sangat banyak dan kompleks. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan yang terarah dan terpadu, diantaranya melalui kebijakan umum. Yang



termasuk dalam kebijakan umum tersebut antara lain kebijakan pendidikan dan kesehatan masyarakat, kebijakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan kebijakan penarikan investasi.

6.1.1 Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan

Pada dasarnya tujuan pendidikan menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, menyebutkan bahwa sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya, dan pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pada hakekatnya kebijakan pendidikan dan kesehatan bertujuan bagi meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, terutama dari segi pendidikannya. Tersedianya penduduk usia kerja yang terdidik dan terampil merupakan dasar dari perencanaan tenaga kerja karena dengan demikian pada umumnya akan terbuka ketersediaan perluasan dan peluang pasar kerja yang lebih besar dan



berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas otomatis menjadi potensi berbagai pelaku usaha di dalam maupun di luar negeri. Proses pendidikan memiliki dua dimensi, dimensi yang pertama bahwa dengan melakukan pendidikan maka kualitas angkatan kerja semakin meningkat. Dengan meningkatnya kualitas maka dapat bersaing di pasar kerja dalam negeri dan luar negeri, serta dapat termotivasi dalam berwirausaha/menjadi interpreneur, sehingga dapat mengolah dan mengembangkan berbagai peluang dan sumber daya alam yang ada.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, arah kebijakan bidang pendidikan dan kesehatan adalah :

1. Beasiswa untuk 15.000 orang dalam 5 tahun (3000 orang/tahun)
2. Pembangunan sekolah kejuruan (SMK) dan sciencepark sesuai potensi daerah.
3. Bantuan BPJS bidang kesehatan kepada keluarga miskin yang belum ditanggung pusat dan kabupaten/kota.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kewaspadaan rawan gizi dan pangan.
5. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Selain itu ada beberapa kebijakan pemerintah dalam kondisi pandemi corona disease 19 yang melanda Indonesia maupun dunia adalah membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi, dimana sistem pembelajaran dengan menggunakan sistem daring (dalam jaringan) yaitu pembelajaran melalui jejaring komputer atau internet, dengan menyediakan paket internet (data cost), ketersediaan perangkat belajar (equipment availability) dan konektivitas internet dan listrik, sehingga selain pendidikan tetap berjalan juga mengajari siswa untuk lebih mengetahaipenggunaan sistem informasi berbasis teknologi (melek teknologi).



Kebijakan pemerintah lainnya yang cukup berpengaruh terhadap pengurangan angka pengangguran adalah dengan mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Kebijakan ini akan memberikan ruang kepada pihak industri atau asosiasi terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran, dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta untuk membantu pembangunan atau tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Pada pendidikan vokasi, pemerintah akan membentuk program magang dan penempatan langsung dengan pemain industri. Pelatihan guru dan mempekerjakan praktisi industri.

Dilain sisi, kebijakan di bidang kesehatan merupakan faktor pendukung peningkatan sumber daya manusia. Kesehatan merupakan modal awal dan sekaligus merupakan indikator tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Kebijakan di bidang kesehatan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sumber daya Manusia yang unggul adalah sumberdaya manusia yang memiliki keahlian atau keterampilan yang tinggisehingga mampu menawarkan dan melaksanakan jasa atau layanansesuai dengan aturan dalam bidang yang dijalannya, sertamempunyai sikap, sopan santun atau aturan lainnya yang mengaturhubungan antara kelompok manusia yang beradab dalampergaulan. Sumberdaya manusia tidak hanya menyangkut dari sisi kuantitastetapi juga dari sisi kualitas. Kualitas sumberdaya manusia menyangkutkemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak. Oleh karenanya aspek penting yang harus dipersiapkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas adalah faktor kesehatan dan pendidikan. Pendidikan dankesehatan memiliki peranan penting dalam melakukan aktivitas bagi manusia, selain menjadi modal dasar untuk membina danmengembangkan karakter serta perilaku manusia di dalam menatahidup dan kehidupannya.



Munculnya virus jenis baru yang disebut covid 19 sangat mengganggu aktivitas di semua sektor kehidupan, termasuk juga sektor ketenagakerjaan. Pandemi Covid 19 ini mengharuskan pemerintah untuk mempunyai kebijakan yang luar biasa. Kebijakan untuk menangani masalah kesehatan, melindungi masyarakat dengan jaminan sosial, dan menjaga dunia usaha jadi prioritas. Realokasi anggaran refocusing kegiatan serta penyesuaian besaran belanja wajib adalah cara utama pemerintah untuk mendanai kebutuhan penanganan covid 19.

Dalam bidang kesehatan di Provinsi Jambi, kebijakannya menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, yang telah ditetapkan antara lain adalah :

- 1) Penguatan pengelolaan jaminan kesehatan di kabupaten/kota.
- 2) Penguatan upaya kesehatan keluarga melalui pendekatan siklus hidup.
- 3) Penguatan upaya pencegahan penurunan dan pengendalian penyakit menular.
- 4) Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit tidak menular.
- 5) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 6) pemenuhan kebutuhan obat di RSUD dan RSJ.
- 7) Meningkatkan pelayanan penyakit jiwa dan bebas pasung.
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bermasyarakat.

6.1.2 Kebijakan Pengendalian Pertambahan Penduduk

Di dalam kebijakan umum selain dipengaruhi oleh kualitas penduduk adalah pengaturan kuantitas, yakni program keluarga berencana (KB). Melalui program ini tingkat kelahiran penduduk dapat dikendalikan. Pengendalian pertambahan penduduk merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik secara individu maupun institusi.

Pengendalian pertambahan penduduk sangat berdampak pada pertambahan angkatan kerja di masa yang akan datang. Untuk itu pengendalian pertambahan



penduduk harus diupayakan terusmenerus. Pertambahan penduduk dikendalikan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program.

Kebijakan pemerintah untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk adalah melalui :

1. Mencanangkan program Keluarga Berencana (KB), yaitu dengan membatasi dalam 1 (satu) keluarga cukup memiliki 2 (dua) anak saja.
2. Menggalak Program Transmigrasi. Transmigrasi merupakan program penduduk dari wilayah yang banyak atau padat penduduknya ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Transmigrasi ini akan mendorong terjadinya pemerataan penduduk.
3. Membuat undang undang yang menetapkan usia minimal menikah, karena sekarang banyak yang hamil diluar pihak, oleh karena itu Pemerintah membuat undang undang.
4. Mempermudah serta meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan. Pendidikan sangat berperan dalam kaitannya pengendalian pertumbuhan penduduk. Hal ini untuk para remaja yang ingin menikah di usia muda.

6.1.3 Kebijakan Penarikan Investasi

Investasi mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi, termasuk sektor pertanian. Dalam perspektif jangka panjang ekonomi makro, investasi akan meningkatkan stok kapital, dimana penambahan stok kapital akan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kondisi pandemi covid 19 ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga berdampak pada konsumsi, karena itu perlu ada dorongan dari pengeluaran pemerintah dan penambahan investasi.



Pada awal tahun 2021 ini Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan penandatanganan kerjasama kemitraan antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dimana kerjasama kemitraan ini dapat memberikan dampak positif bagi UMKM.

Pengembangan kemitraan strategis antara perusahaan besar dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan menggunakan prinsip saling menguntungkan dan meningkatkan daya saing di pasar global. Tujuannya agar UMKUM bisa masuk dalam rantai produksi global (Global value chains) dan meningkatkan peluang UMKM untuk bisa naik kelas, yang mikro naik kelas yang kecil, yang kecil naik kelas yang menengah, dan yang menengah naik ke kelas yang besar.

Kerjasama ini juga bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif, dengan artian kualitas usaha UMKM menjadi lebih baik, desainnya menjadi lebih baik, menagingnya menjadi lebih baik dan lebih bankable karena bisa belajar dari perusahaan perusahaan besar, baik itu perusahaan besar dalam negeri maupun perusahaan besar asing, menuju sebuah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan pemerataan ekonomi.

Beberapa kebijakan untuk mendorong pertumbuhan investasi adalah :

- a. Menciptakan stabilitas kondisi politik sosial dan ekonomi;
- b. Membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi, adanya konsistensi, kejelasan, dan kepastian kebijakan pemerintah jangka panjang serta birokrasi yang efisien;
- c. Menciptakan fungsi sektor pembiayaan efektif dan sistem ketenagakerjaan yang kondusif
- d. Menciptakan sistem Perpajakan dan prosedur perdagangan ekspor impor dan domestik yang mudah dan sederhana;



- e. Mempermudah kepemilikan atau kontrak tanah perusahaan swasta, tetapi mayoritas lahan pertanian jangan sampai dikuasai asing;
- f. Membuat peraturan yang tidak menghambat kegiatan investasi;
- g. Meningkatkan investasi pemerintah yang sangat diperlukan sebagai komplemen bagi investasi swasta dan rakyat di bidang pertanian dan pariwisata.
- h. Pengembangan sektor infrastruktur agar mempercepat pertumbuhan investasi dan perekonomian rakyat.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka peluang kesempatan kerja dengan banyaknya kebijakan penarikan investasi akan sangat terbuka, dan tingkat pengangguran atau jumlah pencari kerja akan berkurang.

6.2 Rekomendasi Kebijakan Penciptaan Kesempatan Kerja

Solusi bagi permasalahan ketenagakerjaan khususnya mengurangi angka pengangguran adalah dengan membuat regulasi dan kebijakan bagi penganggur maupun setengah penganggur, hingga memberikan bantuan bagi masyarakat dalam bentuk pelatihan, pembuatan sarana penunjang maupun memberikan bantuan finansial.

Program perluasan kesempatan kerja yang harus dilakukan diantaranya adalah :

1. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG), dimana TTG adalah teknologi yang dirancang agar dapat disesuaikan dengan aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berbasis sumber daya yang telah disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada.
2. Penyediaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), dimana program ini memberdayakan TKS sebagai pendamping kelompok usaha masyarakat. Tenaga Kerja Sukarela berfungsi meningkatkan kapasitas kelompok dalam aspek manajemen usaha dan meningkatkan kemandirian kelompok usaha/wirausaha, hasilnya dapat meningkatkan output bagi masyarakat yang didampinginya. Pembekalan dan



pendampingan kepada mereka yang hendak berwirausaha dilakukan untuk membekali skill yang memadai bagi mereka.

3. Program Padat Karya. Padat Karya merupakan suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan. Kegiatan padat karya mempunyai manfaat yang sangat dibutuhkan masyarakat baik itu aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan ketenagakerjaan. Kegiatan padat karya dapat memberikan penghasilan baik yang sifatnya sementara atau berkelanjutan, menekan pengangguran dan kemiskinan, memupuk rasa kebersamaan gotong royong dan partisipasi masyarakat.
4. Penyediaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Tenaga Kerja Mandiri bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di sektor informal, dan membina serta mengembangkan kader wirausaha baru (WUB), dimana wirausaha baru ini harus mandiri dan produktif dengan berbasis sumber daya alam yang telah disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada di daerah. Wirausaha produktif berbasis rakyat bisa terus tumbuh dan berkembang dengan tata kelola yang baik, inprovisasi yang tidak kenal henti, marketing yang lebih modern dan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak.

6.2.1 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor pertanian masih merupakan sektor primadona dalam penyerapan lapangan pekerjaan. Kegiatan produksi sektor pertanian masih dijalankan secara tradisional, yang dicirikan oleh semakin sempitnya rata-rata kepemilikan tanah, dikerjakan dengan padat tenaga kerja, penggunaan teknologi rendah, tingkat produktivitas masih rendah, kualitas produksi masih relatif rendah dan nilai tukar produk



pertanian yang rendah, yang tidak mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa sektor lainnya.

Walaupun demikian karena perannya yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja, serta berfungsi sebagai benteng ketahanan pangan serta sumber penyediaan gizi, maka pengembangan sektor pertanian masih perlu diprioritaskan. Sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduk bekerja menggantungkan hidupnya pada usaha pertanian, maka lapangan usaha pertanian pada tahun-tahun mendatang tetap menjadi tumpuan penciptaan kesempatan kerja.

Pada tahun 2020 di Provinsi Jambi, kesempatan kerja yang tercipta pada sektor pertanian ini diperkirakan sebanyak 780.666 orang, dan pada tahun 2024 kesempatan kerja di sektor ini menjadi 819.274 orang atau naik sekitar 4.712 persen. Sumbangan sektor pertanian terhadap pendapatan regional bruto dan kenaikan pertumbuhan sektor ini diharapkan akan membuka kesempatan kerja baru yang lebih banyak karena seperti kita ketahui sektor pertanian masih merupakan sektor andalan bagi perekonomian Provinsi Jambi dan merupakan sektor potensial dan prioritas pembangunan Provinsi Jambi

Penyerapan kesempatan kerja di sektor pertanian semakin meningkat, maka Pemerintah Provinsi Jambi perlu menetapkan tujuan, sasaran dan strategi dalam pembangunan bidang pertanian, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, Tujuan di Sektor pertanian adalah meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian tanaman pangan, sedangkan sasarannya adalah meningkatnya ketahanan pangan dan meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan. Adapun beberapa strategi yang akan diterapkan adalah :



- a. Mengembangkan agroindustri berbasis padat karya.
- b. Menumbuhkembangkan sentra komoditas unggulan agribisnis seperti kopi, kelapa dalam, karet, kelapa sawit, casiavera, peternakan dan perikanan.
- c. Mengembangkan kemitraan usaha antara koperasi dan pengusaha besar dalam membangun agroindustri.
- d. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian, peternakan dan perikanan.
- e. Fasilitasi penerapan teknologi pertanian dan sarana prasarana teknologi pertanian. Meningkatkan produksi dan produktivitas produk pertanian, peternakan dan perikanan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin).

6.2.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Kegiatan usaha pertambangan di provinsi Jambi meliputi usaha pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, biji besi emas dan pertambangan berbagai jenis mineral, granit, andesit, pasir kuarsa, pasir dan kerikil. Sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Jambi adalah sub sektor penggalian yang dapat dikembangkan, meskipun daya serap sektor ini terhadap tenaga kerja relatif masih sangat rendah.

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki banyak sumberdaya alam ESDM. Pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara berkembang sangat pesat, hal ini ditandai banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara yang diterbitkan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota. Sebagian besar perusahaan pertambangan yang beroperasi merupakan pertambangan batu bara disamping bijih besi, emas dan kuarsa. Pertumbuhan produksi batu bara tertinggi terjadi pada tahun



2014 sebesar 7.663.282,94 ton dan produksi biji besi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 159.000 ton.

Permasalahan sektor pertambangan dan penggalan untuk di provinsi Jambi adalah :

1. Rasio elektrifikasi belum mendekati 100%.
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber sebagai sumber energi baru terbarukan.
3. Rendahnya peningkatan nilai tambah bahan galian non galian dan logam.
4. Pelaku pertambangan yang belum menerapkan prinsip good mining practise.
5. Upaya konservasi air tanah, pengendalian pengembalian air tanah akibat beralihnya fungsi wilayah reapan air.
6. Investor sektor pertambangan relatif rendah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi prioritas pembangunan ataupun kebijakan di bidang pertambangan dan penggalan di provinsi Jambi untuk Tahun 2016 sampai dengan 2021 sesuai dengan Rencana Strategi bidang perartambangan dan penggalan adalah :

1. Pembangunan sumber energi listrik dari sumber energi baru di desa.
2. Peningkatan investasi di sektor pertambangan dan penggalan.
3. Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, antara lain sinar matahari (surya), angin dan arus laut, seperti di Kabupaten Kerinci (PLTA) dan PLTU (batu bara) Kabupaten Sarolangun.
4. Pelaksanaan kaidah teknis pertambangan yang baik/good mining practice

Dengan sasaran tersebut sangat diharapkan terciptanya peluang kesempatan kerja di sektor pertambangan dan penggalan yang cukup banyak, hal ini akan terlihat dengan dibangunnya perusahaan pertambangan di bidang energi baru terbarukan di tiap kabupaten yang ada di provinsi Jambi sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia



6.2.3 Sektor Industri Pengolahan

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional.

Secara normatif sektor industri pengolahan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling dominan diantara sektor-sektor perdagangan lainnya, namun dalam proses pelaksanaannya ditemukan banyak masalah, diantaranya;

1. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antar industri kecil menengah dengan industri besar.

Jejaring kemitraan usaha antar industri kecil menengah dengan industri besar diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar, dan kurang optimalnya industri kecil menengah dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinyu yang menyebabkan keterlambatan produksi.

2. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri.

Belum optimalnya pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang focus terhadap peningkatan kualitas dan populasi industri.

3. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis dan kondisi mesin yang sudah tua.

Pelaku industri kecil menengah harus selalau melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing walau terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal dan eksternal. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana layanan teknis dapat menurunkan daya saing di sektor industri.



4. Lemahnya daya saing industri kecil dan menengah.

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan faktor faktor internal maupun faktor eksternal yang telah diidentifikasi, ditetapkan strategi pembangunan industri yang merupakan arah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis bahan lokal.
2. Pengutan struktur industri berbasis kawasan, subur daya lokal yang berkelanjutan.
3. Mendorong sinergi kebijakan dan sektor sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional.

Berdasarkan hal diatas perlu mengambil kebijakan pembangunan dalam bidang industri sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang kepala daerah, adapun kebijakan di bidang industri adalah :

1. Mendorong industri kecil menengah melalui pendampingan, pelatihan dan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial serta promosi industri kecil dan menengah.
2. Penyediaan informasi pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, sumberdaya yang ada.
3. Mendukung industri yang memberi nilai tambah komoditi utama yang potensi daerah melalui pendekatan kewilayahan.

Adapun program peningkatan daya saing kewirausahaan industri kecil dan menengah adalah dengan melaksanakan :

1. Pengembangan dan pembinaan wirausaha baru industri kecil
2. Pelatihan Training of Trainer (TOT) bagi pembina idustri kecil dan menengah.
3. Pengembangan one village one product (OVOP)



4. Pelatihan kewirausahaan industri kecil dan menengah potensial.

6.2.4 Sektor Pengadaan Listrik, Gas dan Air

Kontribusi sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja menduduki urutan paling bawah dengan proporsi hanya sebesar 0,17 persen saja. Namun demikian perkembangan sektor ini sangat terkait dengan sektor dan aspek lain seperti sektor industri, bangunan, perdagangan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu daya serap sektor ini terhadap tenaga kerja masih sangat potensial untuk dikembangkan. Peranan sektor ini menjadi sangat penting mengingat keterkaitan yang tinggi antara sektor ini dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Sub sektor listrik sangat dominan di sektor ini, dan sebagaimana diketahui bahwa listrik merupakan sumber energi yang diperlukan semua aktifitas. Walaupun hanya sedikit menyerap tenaga kerja, namun pekerja di sektor ini perlu ditingkatkan dengan tetap mempertahankan prinsip efisiensi dan produktivitas usaha.

Kebutuhan tenaga kerja di sektor ini akan meningkat sejalan dengan peningkatan konsumsi listrik, baik untuk permintaan akhir maupun industri dan pemerintahan. Konversi minyak tanah menjadi gas membuat sektor ini makin berkembang dan penyerapan lapangan pekerjaan menjadi lebih banyak.

Melihat kondisi saat ini, isu-isu strategis sektor pengadaan listrik, gas dan air di Provinsi Jambi adalah :

1. Rasio elektrifikasi belum mendekati 100%.
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber sebagai sumber energi baru terbarukan.
3. Perlunya peningkatan nilai tambah bahan galian non logam dan logam.
4. Masih banyaknya pelaku pertambangan yang belum menerapkan prinsip good mining practise.



5. Perlunya peningkatan upaya konservasi air tanah, pengendalian pengambilan airtamah akibat beralihnya fungsi rrsapan air tanah.

6. Investasi sektor pertambangan relatif rendah.

Untuk menindaklanjuti isu strategis dimaksud perlu diadakan kebijakan kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi, yaitu :

1. Terlaksananya pembangunan sumber energi listrik dari sumber sumber energi baru di desa.
2. Teralirnya listrik PLN ke desa belum berlistrik.
3. Termanfaatkannya sumber energi baru dan terbarukan.
4. Tersedianya data potensi energi sumber daya mineral guna mendukung penimngkatan investasi sektor ESDM.
5. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap IUP dan pertambangan rakyat.
6. Terlayaninya pengguna jasa informasi kegeologian.
7. Terlayaninya rekomendasi perizinan.

6.2.5 Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Berbagai persoalan lingkungan masih terus mewarnai Provinsi Jambi adalah :

1. Penebangan hutan secara liar yang mnerugikan negara.
2. Pembakaran hutan untuk pembukaan lahan baru.
3. Konflik antaramanusia dangan satwa liar.
4. Hak hak penduduk asli yang tidak terenuhi.

Melihat kondisi sumber daya dan pengelolaamn yang dilakukan pemerimtah saat ini sudah seharisnya dilakukan pembenahan yang lebih teropadu dan berkelanjutan. Agar pengelolaan sumberdaya alam yang ada bisa berdaya guna dan tepat guna dalam mengatasi persoalan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.



Adapun Kebijakan dalam sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang adalah :

1. mendorong kinerja penyediaan dan distribusi air minum,
2. meningkatkan jaringan irigasi dalam kondisi baik.
3. penyediaan alat berat sebagai fasilitas cepat tanggap untuk penataan drainase, normalisasi sungai dan perbaikan sarana pertanian masyarakat.
4. normalisasi pinggiran pantai, pembuatan tanggul, penanaman hutan bakau, pembersihan sampah.
5. Meningkatkan kinerja perusahaan dalam menerapkan tata kelola lingkungan yang baik, berupa membuat kolam netralisasi limbah.
6. Pelatihan kepada masyarakat pengelolaan sampah dan limbah industri menjadi barang kebutuhan rumah tangga.

6.2.6 Sektor Konstruksi

Jasa konstruksi adalah Suatu kegiatan untuk membangun sarana dan prasarana yang pada pengerjaannya meliputi pembangunan gedung (building construction), instalasi mekanikal dan elektrikal, dan juga pembangunan prasarana sipil (civil engineer). berdasarkan hal tersebut permasalahan ataupun isu isu eksternal yang ada adalah :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih sebagai pencapaian target universal akses terutama wilayah rawan air.
2. Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sebagai penghubung / konektivitas antar kawasan terutama daerah terisolir di pusat sentral produksi.
3. Belum optimalnya penyediaan pelayanan dasar secara layak pada kawasan perumahan dan permukiman.



4. Daya saing di pasar global yang cukup besar menuju tenaga kerja jasa konstruksi yang berkompetensi dalam persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
5. Belum optimalnya kinerja pengairan/irigasi pada daerah irigasi, rawa dan pengairan lainnya.

Berdasarkan isu-isu di bidang jasa konstruksi tersebut, maka perlu diambil kebijakan yang merupakan pedoman dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi mencapai target pembangunan yang diinginkan. Adapun kebijakannya yaitu :

1. Pembangunan prasarana pengendalian banjir kota Jambi (jambi flood control-multi years contract)
2. Pembangunan prasarana pengendalian banjir kabupaten Batanghari.
3. Pembangunan peningkatan jaringan irigasi D.I Siulak Deras, D.I Batang Asai, D.I Limun Singkut, D.I Batang Sangkir, Bendung Renah Pemetik.
4. Pembangunan prasarana pengendalian banjir kota Jambi.
5. Pembangunan jalan
 - akses pelabuhan Kuala Tungkal
 - bangko - Sp. Pulau Rengas-Sungai Penuh
 - Lingkar jambi - Talang Dukuh
 - Simpang Niam - Merlung
 - Talang Duku - Muara Sabak

Dengan program kegiatan sesuai dengan kebijakan yang tersebut seperti diatas, maka akan berdampak terhadap adanya kesempatan kerja bagi pencari kerja yang ada di Jambi. Kesempatan kerja yang ada sesuai dengan jenis program dan kegiatan yang ada, baik untuk pembangunan pengendalian banjir, jaringan irigasi, maupun pembangunan jalan, dimana akan membutuhkan banyak tenaga kerja yaitu dengan kegiatan padat karya.



6.2.7 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa adalah sangat berarti bagi perdagangan, baik perdagangan besar dan eceran serta juga terhadap reparasi mobil dan sepeda motor untuk pembelian sparepart kendaraan yang digunakan. Di sektor perdagangan yang menjadi isu strategis dan harus dimabil kebijakan adalah tentang :

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien.
2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional
3. Masih rendahnya pemahaman konsumen teradap hak dan kewajibannya.
4. Semakin banyaknya produk luar negeri yang beredar
5. Rendahnya kualitas produk industri .
6. Peralatan produksi industri kurang memadai.
7. Kurangnya pasaokan bahan baku industri.

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan di sektor perdagangan adalah :

1. Mendorong integrasi aktifitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan produk dalam negeri.
2. Memperkuat rantai suplay dan pasokan barang kosmetik terutama bagi bahan kebutuhan pokok.
3. Meningkatkan perdagangan antar wilayah/daerah.
4. Mendorong berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dan persaingan usaha yang sehat.
5. Mendorong upaya upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkelanjutan ditunjang dengan pemantauan dan pengawasan atas impor daerah.



Adapun implementasi dari kebijakan tersebut adalah dalam bentuk program dan kegiatan yaitu program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri :

1. Pengembangan pasar lelang daerah dan sistem resi gudang.
2. Penguatan kelembagaan usaha dagang kecil informal.
3. Promosi penggunaan produk dalam negeri.
4. Penyelenggaraan pasar rumah
5. Pengolahan data SIUP dan TDP.
6. Pemantauan DAK sarana perdagangan.
7. Pemantauan bahan pokok di tingkat distributor dan pasar tradisional.
8. Pendataan sarana perdagangan dan pedagang informal.

Dengan program kegiatan tersebut akan membutuhkan tenaga kerja, baik dalam hal pengadaan barang dan jasa maupun terhadap dipermudahnya untuk membuat usaha usaha baru berupa penerbitan izin perusahaan yang dipermudah proses penerbitannya.

6.2.8. Penyediaan Akomodasi dan makan minum.

Akomodasi adalah Sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misal tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian. Kategori akomodasi mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera.

Perkembangan pembangunan destinasi wisata di Provinsi Jambi pada saat ini makin meningkat, hal ini terlihat dari adanya pembangunan ataupun pengembangan destinasi baru maupun mengembangkan kembali destinasi yang ada dengan membangun wahana wahana baru.

Destinasi wisata di Provinsi Jambi yang berada di kabupaten dan Kota adalah :



1. Kota Jambi, Gentala Arasy (museum budaya), Jambi Paradise (taman air), Pasar keramik Sitimang, wisata Perahu Ketek Batanghari.
2. Kabupaten Sarolangun destinasi wisatanya Jembatan Beatrix.
3. Kabupaten Merangin destinasi wisata yang ada yaitu Air Terjun Sigerincing, Air Terjun Kolam Jodoh, Telago Biru, Hesti's Garden, Danau Kumbang, Air Terjun Talang Jaya.
4. Kabupaten Kerinci destinasi wisatanya Air Terjun Arai Indah, Gunung Kerinci (Hiking), Air Terjun Sungai Medang, Taman Telun Berasap, Danau Belibis, Danau Lingkat, Danau Kaco.
5. Kabupaten Muaro Jambi destinasi wisatanya Candi Muaro Jambi, Candi Tinggi.
6. Kabupaten Batanghari, destinasi wisatanya Danau Biru Muara Tembesi.

Dengan berkembangnya pembangunan terhadap destinasi destinasi wisata yang baru di Provinsi Jambi, juga akan mempengaruhi berkembangnya pembangunan sarana akomodasi maupun makan minum, berupa pembangunan hotel hotel baru, guesthouse guesthouse serta usaha usaha catering dan usaha kuliner serta berdirinya cafe cafe tempat nongkrong kaum melineal yang menjamur. Hal ini akan banyak menyerap jumlah tenaga kerja baru.

6.2.9 Sektor Informasi dan Komunikasi

Sub sektor Informasi dan komunikasi tingkat Pertumbuhannya meningkat setiap tahunnya. Hal ini bisa terlihat, dimana pada tahun 2020 PDRB di sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 6.125,4, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 6.462,5. Dan terlihat dari prosentasi kenaikannya rata rata sebesar 5,97 persen.

Untuk pertumbuhan dan perkiraan kesempatan kerja di lapangan usaha Informasi dan Komunikasi juga terdapat peningkatan. Dimana pada tahun 2020 sebesar 7.929 orang, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 8.152 orang, serta pada tahun



2024 meningkat menjadi 9.809 orang. Dan rata rata perkiraan kesempatan kerjanya setiap tahun akan menyerap sebanyak 8.880 orang.

Untuk mengantisipasi terhadap perkembangan informasi dan komunikasi yang begitu pesat, kebijakan di bidang informasi dan komunikasi adalah dengan mengupayakan percepatan transformasi digital melalui empat langkah :

- a. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas, dengan cara membangun jaringan backbone (serat optik yang terbentang di daratan dan lautan), middle bone (pembangunan jaringan fiberlink, microwave link, dan satelit) dan last mile (membangun Base Tranceiver Station/BTS)
- b. Pengembangan teknologi pendukung akselerasi transformasi digital. Membangun ekosistem digital yang aman, sehat dan berdaulat dengan mengupayakan berbagai kebijakan pengembangan teknologi.
- c. Pengembangan sumber daya manusia atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas memadai serta berkelanjutan. Tiga program untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk ekosistem ekonomi digital yaitu gerakan UMKUM Go-Online, petabni dan nelayan Go-Online, Gerakan Nasional 1.000 Start-up digital, dan program nexticom (The Next Indonesia Unicorn).

Dan ada beberapa program kegiatan yang mendukung terhadap kebijakan diatas yaitu :

1. Melaksanakan pelatihan bidang teknologi informasi yang bersertifikasi.
2. Melaksanakan penilaian dan pembinaan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Untuk memotivasi masyarakat dalam menggunakan teknologi dalam menjalankan usahanya.
3. Melakukan pengembangan dan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik.



6.2.10 Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Pertumbuhan industri jasa keuangan dan asuransi di Provinsi Jambi terus berkembang. Hal ini terlihat dari jaringan kantor industri keuangan di Provinsi Jambi yang terus mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan industri jasa keuangan dapat dilihat dari jumlah jaringan kantor industri jasa keuangan di Provinsi Jambi yang saat ini jumlahnya mencapai 170, dengan rincian 35 bank umum konvensional dan syariah, 19 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional, 50 asuransi jiwa dan umum, termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, ada 51 perusahaan pembiayaan, dua perusahaan penjaminan, delapan perusahaan sekuritas, serta masing masing satu modal ventura, dana pensiun, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro dan Perusahaan pengadaian. Berdasarkan data dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi, Total aset perbankan pada Tahun 2019 mencapai Rp. 44,94 Trilyun atau tumbuh sebesar 5,91 persen dari tahun sebelumnya, demikian juga dengan dana pihak ketiga tumbuh sebesar 5,42 persen dan kredit atau pembiayaan yang juga sebesar 7,60 persen. Sedangkan untuk non bank total aset tumbuh 7,86 persen, dan piutang pembiayaan tumbuh sebesar 5,67 persen.

Salah satu faktor yang mendorong industri jasa keuangan dan asuransi di Provinsi jambi dapat tumbuh positif, antara lain kemudahan produk yang ditawarkan industri jasa keuangan dan asuransi melalui digitalisasi, sehingga akses keuangan semakin mudah, misalnya pinjaman online.

Dengan pertumbuhan industri jasa keuangan dan asuransi ini mempengaruhi terhadap kebutuhan formasi lowongan kerja di sektor jasa keuangan dan asuransi, semakin banyak transaksi yang terealisasi tentu semakin banyak beban kerja yang ada, hal ini tentunya akan membutuhkan penambahan personil untuk mengerjakan pekerjaan transaksi dimaksud.



6.2.11 Sektor Jasa Perusahaan

Di sektor Jasa Perusahaan tingkat pertumbuhan ekonomi data PDRB, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 diperkirakan akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Ini bisa terlihat dimana pada tahun 2020 PDRB sektor jasa perusahaan 1.671,6 dan pada tahun 2024 menjadi 1.986,4. Dan pada perkiraan kesempatan kerja di lapangan usaha jasa perusahaan juga terjadi peningkatan. Dimana pada tahun 2020 terdapat sebanyak 18.233 orang mendapat kesempatan kerja dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 28.126 orang yang mempunyai kesempatan kerja. Jadi rata rata setiap tahun perkiraan kesempatan kerja sebesar 23.156 orang yang bisa diserap disektor jasa perusahaan.

Kebijakan untuk menstabilkan terhadap produksi, pendapatan maupun kesempatan kerja terhadap jasa perusahaan adalah :

- a. Penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya, penyediaan fasilitas penjaminan, sehingga perbankan dapat menambah kredit modal kerja kepada pelaku usaha.
- b. Dukungan insentif listrik untuk industri, bisnis dan sosial. Relaksasi tarif minimum untuk industri, bisnis dan sosial melalui penerapan aturan rekening minimum (RM), yaitu pelanggan hanya membayar sejumlah jam pemakaian dan selisihnya akan dibayarkan oleh pemerintah.

6.2.12. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pertumbuhan Produk Domestik Brutonya terjadi peningkatan setiap tahunnya, walaupun tidak signifikan. Ini terlihat pada tahun 2020 PDRB Provinsi Jambi sebesar



5.384,5, dan pada tahun 2021 naik menjadi sebesar 5.553,2, serta di perkirakan pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi akan meningkat menjadi 6.267,2.

Begitu juga terhadap perkiraan kesempatan kerja di lapangan usaha sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib juga terdapat peningkatan. Pada tahun 2020 kesempatan kerja yang tersedia sebanyak 96.887 orang, dan pada tahun 2021 meningkat sebanyak 98.031 orang dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu sebanyak 128.477 orang. Jika dilihat dari rata rata perkiraan pertumbuhan kesempatan kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, tumbuh sebanyak 110.091 orang.

Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, sementara fungsi pemerintahan dalam administrasi pemerintahan meliputi pengaturan pelayanan, pembangunan. Pemberdayaan dan perlindungan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan setiap ASN wajib mendapat Jaminan Sosial. Sesuai dengan kebutuhan dari pelaksanaan di administrasi pemerintahan, diharapkan adanya penambahan PNS maupun PPPK untuk menunjang pekerjaan administrasi di pemerintahan. Dengan meningkatnya jumlah pns dan PPPK dan kewajiban jaminan sosial serta pengembangan terhadap bidang pertahanan, termasuk pengadaan sarana dan prasarana, hal ini memerlukan penambahan jumlah karyawan baik pns, pppk maupun mitra kerja yaitu perusahaan di sektor swasta.

6.2.13. Sektor Jasa Pendidikan

Salah satu isu penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah peningkatan mutu pendidikan. Sinyalamen yang muncul berkitan dengan itu antara lain telah terjadi kemerosotan kualitas pendidikan di segala tingkatan. Menghubungkan dunia pendidikan



dengan dunia industri harus mempunyai konsep pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar industri selain pasar kerja lainnya.

Dampak globalisasi, kemajuan teknologi industri dan sistem informasi canggih, akan merubah paradigma peningkatan mutu pada jasa pendidikan.

Kebijakan di sektor jasa pendidikan yang harus diciptakan dalam memenuhi pasar kerja adalah :

- a. Membangun platform pendidikan berbasis teknologi.
- b. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi.
- c. Link and match, untuk memastikan kompetensi sumber daya manusia (SDM/ tenaga kerja) sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan industri berbasis teknologi digital.
- d. Sertifikasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi. Transformasi program dan desain pelatihan dan pendidikan harus beriringan dengan upaya masifikasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi. Strategi ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja trampil (skilled workers) sekarang dan dimasa yang akan datang.

Dengan kebijakan di sektor jasa pendidikan ini, akan menambah formasi kesempatan kerja bagi pencari kerja dan juga bagi pengangguran yang akan mencari pekerjaan, baik kegiatan berupa pendidikan vokasi, link dan match dan program sertifikasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi.

6.2.14 . Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Dengan terjadinya kondisi pandemi covid 19 yang mendunia saat ini, berdampak terhadap laju pertumbuhan produk domestik bruto dan juga perkiraan kesempatan kerja di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, untuk tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebsar



1.912,3, dan pada tahun 2021 sebesar 2.005,9, serta di perkirakan pada tahun 2024 laju pertumbuhan akan meningkat menjadi 2.364,2.

Perkiraan terhadap pertumbuhan kesempatan kerja sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial setiap tahun pertumbuhan bertambah. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan kesempatan kerja sebanyak 30.403 orang, dan pada tahun 2021 naik menjadi 31.403 orang, serta pada tahun 2024 diperkirakan akan naik menjadi 37.484 orang.

Untuk menindaklanjuti laju pertumbuhan kesempatan kerja di masa pandemi covid 19 ini, kebijakan disektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan penularan covid 19 ke kecamatan kecamatan.
2. Pemberian bantuan makanan tambahan kepada ibu hamil dan menyusui.
3. Pelatihan pembuatan masker, face shield kepada penncari kerja, yang nantinya akan menjadi pekerjaan baru dan menghasilkan masker dan face shiled yang bisa dijual kepada masyarakat.
4. Pemberian bantuan jaringan pengaman sosial; kepada msayarakat yang terdampak covid 19, yaitu pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan pekerja yang dirumahkan.

6.2.15 Sektor Jasa lainnya.

Jasa lainnya adalah pengadaaan yang sifatnya non-konsultasi, namun merupakan jasa yang membutuhkan perlengkapan metode khusus, atau ketrampilan yang telah dikenal secara luas di dunia usaha untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, contohnya jasa katering, jasa layanan kebersihan, jasa akomodasi, jasa transfortasi, dan banyak lagi jenis jenis jasa lain yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi pemerintah.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan kesempatan kerja sektor jasa lainnya cukup meningkat setiap tahunnya. Ini terlihat dimana pada tahun 2020 jumlah kesempatan



kerja yang ada sebanyak 48.602 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 53.872 orang, dan rata rata setiap tahunnya bertambah sampai dengan tahun 2024 diperkirakan sebanyak 54.064 orang.

Mengingat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa semakin meningkat dari waktu ke waktu, maka prospek pengembangan sektor ini menjadi cukup cerah. Untuk pengembangan sektor jasa diperlukan kebijakan antara lain :

- a. Optimalisasi peran subsektor swasta dalam pengembangan ekonomi Provinsi Jambi
- b. Bantuan promosi dalam pengembangan subsektor swasta
- c. Pendampingan dan pelatihan pelaku jasa subsektor swasta
- d. Bantuan akses permodalan dan informasi pasar dalam pengembangan jasa swasta.

Dan pada tahun 2021 ini pemerintah Provinsi Jambi meluncurkan Kampanye Wisata " Jelajah Jambi " dengan mengangkat tema " Expo the Hidden Paradise in Jambi", program ini merupakan upaya Provinsi Jambi meningkatkan perekonomian dan terus bertransformasi menata kembali sektor pariwisata agar adaptif dengan pandemi covid 19.

Kampanye " Jelajah Jambi - The Hidden Paradise in Jambi" merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata # di Indonesia (BBWI) yang fokus mengangkat potensi wisata dan produk unggulan daerah. Saat ini Jambi sedang bersiap menjadi tuan rumah Bangga Buatan Indonesia pada awal maret 2022. Dengan menggeliatnya sektor pariwisata tentunya akan sangat berpengaruh dengan berkembangnya usaha di sektor jasa katering, jasa layanan kebersihan, jasa akomodasi, jasa transportasi, dan banyak lagi jenis jenis jasa lain yang dibutuhkan. Hal ini tentunya membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak untuk memenuhi usaha usaha diatas sesuai dengan semakin banyak jumlah turis atau pelancong yang datang ke Jambi.



6.3 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Tambahan Angkatan Kerja

Pembangunan berbagai sektor yang dilakukan di Provinsi Jambi, sangat membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dengan kualifikasi tertentu. Berbagai lapangan pekerjaan terbuka setiap waktu dan berbagai jabatan, tetapi pencari kerja jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Dalam prosesnya ternyata pembangunan tidak hanya dihadapkan kepada keterbatasan tenaga kerja ahli, melainkan masih banyak masalah lainnya.

Permasalahan ketenagakerjaan yang ada saat sekarang ini adalah :

- a. Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, dimana jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar.
- b. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja.
- c. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Banyak terdapat tenaga kerja di perkotaan, sementara di pedesaan masih banyak sektor pertanian yang membutuhkan tenaga kerja.
- d. Pengangguran disebabkan karena terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kebijakan pengendalian tambahan angkatan kerja dapat dilakukan melalui :

1. Pembangunan infrastruktur pendidikan untuk penyediaan fasilitas pendidikan dan biaya pendidikan yang murah. Hal ini diharapkan angkatan kerja yang akan masuk ke pasar kerja dapat dikendalikan, karena mereka akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Pemberian beasiswa ke perguruan tinggi sehingga diharapkan akan terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja muda.
3. Tersedianya sekolah kejuruan yang berkualitas melalui peningkatan kerjasama dengan perusahaan perusahaan.



4. Tersedianya lembaga lembaga pelatihan yang kurikulumnya berorientasi pada dunia usaha dan dunia industri.
5. Untuk jangka panjang melalui pengendalian pertumbuhan penduduk yaitu dengan Program Keluarga Berencana.

6.4 Rekomendasi Kebijakan Pelatihan Tenaga Kerja

Tujuan diadakannya pelatihan pada hakekatnya merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi oleh individu atau sekelompok orang dalam memperoleh dan meningkatkan kemampuan kemampuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan.

Sedangkan manfaat dari pelatihan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas serta produktivitas, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi biaya kecelakaan kerja dan membantu meningkatkan pengembangan pribadi.

Tersedianya penduduk usia kerja yang terdidik dan terampil merupakan dasar dari perencanaan tenaga kerja, karena akan terbuka ketersediaan perluasan dan peluang pasar kerja yang lebih besar dan berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas otomatis akan dicari oleh berbagai pelaku usaha di dalam maupun di luar negeri.

Sumber daya Manusia yang Unggul dan Beretika adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau keterampilan yang tinggi, sehingga mampu menawarkan dan melaksanakan jasa atau layanan sesuai dengan aturan dalam bidang yang dijalannya, serta mempunyai sikap, memiliki sopan santun atau memahami aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Sumberdaya manusia tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas. Kualitas sumberdaya manusia menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan



keterampilan. Dalam hal ini pendidikan dan pelatihan merupakan aspek penting dalam membangun sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan merupakan modal dasar untuk membina dan mengembangkan karakter serta perilaku manusia di dalam menata hidup dan kehidupannya.

Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat strategis dan harus dilakukan pemerintah bersama dengan seluruh komponen masyarakat, untuk tujuan produktif. Kebijakan yang harus dilakukan di bidang pelatihan kerja adalah :

- a. Penetapan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang inklusif atau tidak mempersyaratkan (batasan) usia maupun latar belakang pendidikan sehingga masyarakat mempunyai akses atau kesempatan untuk memiliki skill atau ketrampilan.
- b. Program 3R, yaitu Re-orientasi, Revitalisasi, dan Re-branding Balai Latihan Kerja milik pemerintah. Program ini ditujukan untuk mempercepat dan masifikasi produksi sumber daya manusia yang kompeten di berbagai bidang kejuruan prioritas, sekaligus meningkatkan relevansi keluaran BLK sesuai kebutuhan pasar kerja.. Misalnya kejuruan menjahit yang telah di upgrade menjadi kejuruan fashion technology, yang melatih peserta terampil menjahit, mendesain, memproduksi dan memasarkan.
- c. Program Triple Skilling, yaitu Skilling, Up-skilling, dan Re-skilling. Skilling merupakan pelatihan bagi calon tenaga kerja yang belum siap untuk bekerja. Up-skilling adalah pelatihan bagi pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi atau karirnya. Re-skilling merupakan pelatihan bagi pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau kehilangan pekerjaan maupun alih profesi (karier baru), sehingga tetap mendapatkan pekerjaan.



- d. Program pemagangan dalam negeri, dimana pencari kerja ditempatkan di perusahaan-perusahaan untuk berlatih bekerja, yang akhirnya akan direkrut oleh perusahaan di tempat perusahaan mereka magang.
- e. Program pemagangan luar negeri yang dilaksanakan bersama sama dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri melalui kerjasama dengan Sending Organization (IM Japan, Shikamchi dan lainnya).

6.5 Rekomendasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan yang selalu dan harus mendapatkan perhatian serta mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi adalah terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya kualitas angkatan kerja, tingginya angka pengangguran, serta arus globalisasi barang dan jasa yang berdampak terhadap perpindahan manusia untuk bekerja dari suatu negara ke negara lain.

Penempatan tenaga kerja merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah pengangguran, kebijakan penempatan tenaga kerja diarahkan untuk pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan yaitu penganggur dan setengah penganggur.

Kebijakan ketenagakerjaan bidang penempatan tenaga kerja diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, yakni melalui pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, pengembangan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Keempat kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan yaitu masalah pengangguran dan setengah penganggur. Diantara kebijakan yang harus dilakukan adalah :



- a. Menyempurnakan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja.
- b. Menyediakan informasi pasar kerja yang akurat dengan mengoptimalkan bursa kerja on line dan menyebarkan informasi pasar kerja.
- c. Pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha.
- d. Program perluasan kesempatan kerja meliputi Tenaga Kerja Mandiri Terdidik, Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional, pendayagunaan TKS dalam program pendampingan wirausaha, Tenaga Kerja Mandiri, pendampingan wirausaha baru, padat karya infrastruktur, padat karya produktif,
- e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berupa optimalisasi Layanan Satu Atap Pekerja Migran Indonesia
- f. Penambahan jumlah dan peningkatan kualitas pengantar kerja serta menempatkan pegawai pengantar kerja sesuai dengan keahliannya.
- g. Meningkatkan kesempatan kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
- h. Peningkatan pelayanan pembuatan kartu pencari kerja (AK.1) terhadap pencari kerja.

Sementara itu kebijakan secara nasional bidang ketenagakerjaan adalah dengan mengeluarkan sembilan lompatan besar oleh Menteri Tenaga kerja yaitu reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial serta reformasi pengawasan.



6.6 Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Ketenagakerjaan

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan, dimana sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 taun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948NR 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, pada pasal, pada pasal 1 menyebutkan bahwa pengawasan perburuhan diadakan guna :

- a. Mengawasi berlakunya undang undang dan peratuan peraturan perburuhan pada khususnya ;
- b. Mengumpulkan bahan bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas luasnya guna membuat undang undang dan peraturan peraturan perburuhan;
- c. Menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang undang atau peraturan peraturan lainnya.

Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan.

Kebijakan pengawasan ketenagakerjaan diarahkan agar pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaku yang mendayagunakan tenaga kerja. Pengawasan ketenagakerjaan ditujukan untuk menghindari berbagai perlakuan yang tidak adil, tidak manusiawi dan diskriminatif. Bentuk pengawasan ini berlaku umum untuk seluruh kegiatan yang menyangkut upaya produksi yang melibatkan bidang ketenagakerjaan, baik formal maupun informal, untuk kelas industri berskala besar, menengah, kecil



bahkan mikro dan perorangan atau yang tidak dapat diklasifikasikan sekalipun. Hanya saja untuk proses pengukuran dan perencanaan perlindungan yang terstruktur dan sistematis perlu adanya landasan berupa data tempat usaha/perusahaan.

Dalam kondisi pandemi covid 19 ini, kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan yang harus diambil, agar pelaksanaan pengawasan terhadap berlakunya perundang undangan di bidang ketenagakerjaan, biar seimbang dengan perusahaan yang diawasi adalah :

- a. Menambah personil jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan (diklat) fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau melalui inpassing di kementerian Ketenagakerjaan.
- b. Mengupgrade pengetahuan dan ketrampilan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menggunakan perangkat elektronik, agar pelaksanaan tugas sehari sehari dapat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan sistim informasi secara digital;
- c. Peningkatan koordinasi dengan semua stake holder dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan khususnya dalam hal penegakkan hukum terhadap pelaksanaan Undang Undang Ketenagakerjaan, baik dengan kejaksaan, kepolisian, Kantor Imigrasi, BPJS ketenagakerjaan dan instansi terkait lainnya.

6.7 Rekomendasi Kebijakan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Setiap Pemberi kerja dan pekerja berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan pekerjaan dalam menghasilkan produksi barang ataupun jasa. Perlindungan tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan pengawasan norma ketenagakerjaan sebagaimana tersebut di atas. Tetapi juga menyangkut penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk penyelesaian yang bersifat antisipatif telah diundangkan berbagai peraturan yang mengatur adanya perangkat hubungan industrial



ini yaitu minimal adanya Peraturan Perusahaan (PP) atau lebih baik lagi jika ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang dapat menjadi acuan bersama bagi pekerja dan pemberi kerja/ pengusaha. Selain itu sebagaimana aturan yang berlaku secara internasional perlu dibentuk Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) yang menjamin kebebasan berpendapat bagi pekerja. Perangkat hubungan industrial yang terutama adalah adanya Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit karena diharapkan menjadi 'jembatan' utama dalam pencarian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kerjasama yang baik antara pekerja dan pengusaha akan menimbulkan ketenangan bekerja bagi pekerja karena hak-haknya akan dijamin sesuai dengan kontribusinya. Pengusaha pun akan memetik keuntungan dengan peningkatan produktivitas dan terciptanya budaya kerja yang baik. Untuk itu dari keseluruhan perangkat hubungan industrial berupa adanya PP, PKB maupun SP/SB dan tenaga mediator maka yang terbaik adalah keberadaan perangkat hubungan industrial berupa Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit. LKS Bipartit yang berfungsi baik akan meminimalisir peran pemerintah walaupun dalam kondisi harus turun tangan dan telah diwadahi melalui LKS Tripartit.

Kebijakan di bidang Hubungan Industrial agar terciptanya hubungan industrial yang kondusif adalah :

- a. Menambah personil jabatan fungsional Mediator dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan (diklat) fungsional mediator atau melalui inpassing di kementerian Ketenagakerjaan.
- b. Upgrading bagi jabatan fungsional mediator untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam menggunakan perangkat elektronik, agar pelaksanaan tugas sehari sehari dapat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan sistim informasi secara digital;



- c. Peningkatan pembinaan ke pemberi kerja/perusahaan tentang hak hak dan kewajiban, baik bagi pemberi kerja maupun pekerja, serta pembentukan LKS Bipartit, pembuatan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama dan aturan aturan lainnya yang berhubungan dengan hubungan industrial.
- d. Meningkatkan kualitas Mediator melalui : Konsolidasi Mediator; Pelatihan; Forum Konsolidasi dan Bimtek bagi Petugas Administrasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Menyiapkan pedoman pembinaan hubungan industrial; penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan penanganan mogok kerja.
- f. Membentuk Tim Deteksi Dini di Daerah yang padat industri.
- g. Menyusun peta potensi dan kondisi hubungan industrial dan pengadaan kendaraan tanggap darurat.

Upaya perlindungan tenaga kerja tetap merupakan suatu kondisi yang bersifat menyeluruh dan saling terkait. Upaya pencegahan terjadinya suatu musibah dalam lingkungan kerja harus pula diikuti dengan berbagai perangkat yang menjaga agar segala sesuatu berjalan dengan baik dan seharusnya. Jika terjadi sesuatu, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan suatu program yang menjamin kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang karena sesuatu hal.

Untuk melindungi pekerja/buruh pemerintah setiap tahun menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Perlindungan dalam bentuk UMP dan UMK ini agar para buruh/pekerja tidak memperoleh upah di bawah UMP atau UMK. Hal ini dimaksudkan agar kesejahteraan para buruh/karyawan tetap terjaga, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, serta mampu mempertahankan dan meningkatkan produktivitas kerjanya.



Setiap kabupaten/kota yang belum memiliki Upah Minimum Kota atau Kabupaten agar membentuk Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten, agar di setiap kabupaten/kota memiliki Upah Minimum sendiri.



BAB VII

PENUTUP

Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 merupakan dasar acuan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang berbasis pendayagunaan tenaga kerja melalui pengendalian tambahan angkatan kerja baru, penciptaan kesempatan kerja sektoral, serta perencanaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jamsostek serta pengawasan ketenagakerjaan. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah inii merupakan dasar penyusunan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan secara nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dokumen ini dirancang untuk mampu mengakomodir kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Perencanaan Tenaga Kerja Daerah ini dapat direview secara berkala untuk menyelaraskan berbagai kebijakan dan program yang ada terhadap perubahan dan perkembangan baru, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan daerah dan nasional.

Keberhasilan melaksanakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah ini akan sangat bergantung pada komitmen, integritas dan dedikasi seluruh *stakeholders* (pihak terkait), sehingga tujuan pembangunan ketenagakerjaan yaitu untuk pembangunan manusia di daerah khususnya, maupun pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan



masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual dapat terwujud. Masyarakat pun diharapkan agar lebih menyadari tuntunan dunia kerja dengan membekali diri dengan pendidikan, pengalaman dan keahlian yang memadai sebelum masuk dan bersaing dalam dunia kerja.



TIM PENYUSUN PERENCANAAN TENAGA KERJA (PTKD) PROVINSI JAMBI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- A. Pengarah : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
- B. Ketua : Sekretaris Dinas
- C. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- D. Koordinator : 1. Kabid P3TKP
2. Kabid pengawasan dan Hubungan Industrial
3. Kepala UPTD BLKP
- E. Penulis : 1 Candra Purnama, SH.M.Hum
Nip. 19670511 199803 1 006
2. Wahyu Ananda Putra , SE.ME
Nip. 19741007 200312 1 003
3. Hj. Elza Nirmala, SE
Nip. 19711106 199102 2 001
4. Eka Supriati, HS, SE,MM
Nip. 19650527 199210 1 001
5. Rahmania , SE
Nip. 19690421 199703 2 008
6. Tri Astuti Wihabsari, SIP
Nip. 19721030 199803 2 005
7. Asad Kadir, SP. ME
Nip. 19730805 200903 1 001



- F. Pengolah Data : 1. Sorta Mutiara, S.SH
Nip. 19680127 199103 2 004
2. M. Agung Al Ambiya, SE.ME
Nip. 19861128 201001 1 009
3. Tarsa. S.S.Kom
Nip. 19800203 201101 1 001
4. Kurniawan, SE
Nip. 19730918 200604 1 009
5. Yuli Erlina Simanungkalit, AM.KL
Nip. 19860730 201101 2 3003

- G. Editor : 1. Nova Angelia, SE. MM
Nip. 19851121 201101 2 004
2. Rahmiyati, SP
3. Sri Mulyani, SE